



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT



RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

TAHUN

2023

KABUPATEN TANAH LAUT





BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 66 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta hasil Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 Juni 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disebut KUA SKPD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II
RKPD****Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023 yang dihitung mulai Tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD serta berpedoman pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan serta memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaan dalam jangka 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
 - a. pedoman penyusunan Renja SKPD Tahun 2023; dan
 - b. pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS APBD dan Rancangan APBD dan APBD Tahun 2023.

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan Renja SKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2023 untuk:
 - a. menyusun rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2023; dan
 - b. sebagai bahan untuk menyusun RKA-SKPD Tahun 2023.
- (2) Penetapan Renja SKPD Tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ditetapkan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 66

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3 Hubungan antar Dokumen	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah	II-1
2.1.1.1.1 Letak Geografis, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.1.2 Kondisi Topografi	II-3
2.1.1.1.3 Kondisi Geologi	II-5
2.1.1.1.4 Kondisi Hidrologi.....	II-6
2.1.1.1.5 Kondisi Klimatologi	II-8
2.1.1.1.6 Karakteristik Tanah	II-11
2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan.....	II-13
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-14
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-22
2.1.1.4 Kondisi Demografi	II-31
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-35
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-35
2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	II-35

2.1.2.1.2	Struktur Ekonomi	II-39
2.1.2.1.3	Inflasi	II-41
2.1.2.1.4	Pendapatan Perkapita.....	II-42
2.1.2.1.5	Indeks Gini.....	II-43
2.1.2.1.6	Presentase Penduduk Miskin	II-45
2.1.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-48
2.1.2.2.1	Indeks Pembangunan Manusia.....	II-48
2.1.2.2.2	Angka Melek Huruf.....	II-50
2.1.2.2.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah.....	II-51
2.1.2.2.4	Angka Harapan Lama Sekolah.....	II-52
2.1.2.2.5	Angka Harapan Hidup	II-53
2.1.2.2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-54
2.1.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-55
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	II-56
2.1.3.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib.....	II-56
2.1.3.1.1	Pendidikan.....	II-56
2.1.3.1.2	Kesehatan.....	II-63
2.1.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-71
2.1.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	II-75
2.1.3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-76
2.1.3.1.6	Sosial	II-76
2.1.3.1.7	Tenaga Kerja	II-79
2.1.3.1.8	Lingkungan Hidup.....	II-83
2.1.3.1.9	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-84
2.1.3.1.10	Perhubungan.....	II-85
2.1.3.1.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.....	II-87
2.1.3.1.12	Statistik	II-89
2.1.3.1.13	Persandian	II-90
2.1.3.1.14	Kebudayaan.....	II-91
2.1.3.1.15	Perpustakaan	II-92
2.1.3.1.16	Kearsipan	II-93
2.1.3.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-93

2.1.3.2.1	Kelautan dan Perikanan	II-93
2.1.3.2.2	Pariwisata	II-98
2.1.3.2.3	Pertanian	II-102
2.1.3.2.4	Perdagangan	II-107
2.1.3.2.5	Transmigrasi.....	II-108
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-109
2.1.4.1	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-109
2.1.4.1.1	Luas Wilayah Produktif.....	II-109
2.1.4.1.2	Luas Wilayah Industri.....	II-110
2.1.4.1.3	Luas Wilayah Kebanjiran dan Kekeringan	II-111
2.1.4.1.4	Luas Wilayah Perkotaan	II-113
2.1.4.1.5	Fasilitas Jasa Perbankan.....	II-114
2.1.4.1.6	Fasilitas Hotel dan Rumah Makan	II-115
2.1.4.2	Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-116
2.1.4.2.1	Lama Proses Perizinan.....	II-116
2.1.4.3	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-118
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD Sampai dengan Tahun 2020	II-119
2.2.1	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021.....	II-119
2.2.2	Faktor Penghambat, Faktor Pendorong dan Tindaklanjut.....	II-128
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-130
2.3.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-130
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-132

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1	Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ..	III-1
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-4
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-5
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-11
3.2.3	Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	III-16

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-4
4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-5
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.....	IV-11
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023	IV-13
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP.....	VII-1
Lampiran Evaluasi RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021	

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten Tanah Laut Menurut Kecamatan	II-2
2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut, 2019	II-3
2.3 Luas Wilayah Menurut Kondisi Kelerengan, 2021	II-4
2.4 Pembagian Satuan Wilayah Sungai di Kabupaten Tanah Laut, 2020.....	II-8
2.5 Temperatur (°C) dan Kelembaban Udara (%) Kab. Tanah Laut Tahun 2020-2021	II-9
2.6 Kecepatan Angin (knot) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 – 2021	II-10
2.7 Banyaknya Curah Hujan Menurut Bulan (mm) dan Penyinaran Matahari (%), Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021	II-10
2.8 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten Tanah Laut.....	II-15
2.9 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-23
2.10 Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Tanah Laut.....	II-23
2.11 Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan, 2021	II-24
2.12 Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan, 2021.....	II-24
2.13 Data Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-25
2.14 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Tanah Laut.....	II-25
2.15 Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Tanah Laut.....	II-26
2.16 Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Tanah Laut	II-27
2.17 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Laut	II-28
2.18 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2020-2021	II-32
2.19 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-33
2.20 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kab. Tanah Laut, 2021	II-33
2.21 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 - 2021	II-36
2.22 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2017-2021	II-36
2.23 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kab.Tanah Laut (%), 2017-2021	II-39
2.24 PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021	II-43

2.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021	II-48
2.26 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021	II-52
2.27 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021.....	II-53
2.28 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021	II-54
2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut, 2018-2021	II-55
2.30 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021	II-57
2.31 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, 2021-2021	II-59
2.32 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang TK di Kabupaten Tanah Laut, 2021/2022.....	II-60
2.33 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang SD/MI di Kab. Tanah Laut, 2021/2022	II-61
2.34 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang SMP/MTs di Kab. Tanah Laut, 2021/2022.....	II-62
2.35 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021.....	II-62
2.36 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-64
2.37 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Tanah Laut, 2020.....	II-65
2.38 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Menurut Klasifikasi Desa dan Penolong Proses Kelahirandi Kab. Tanah Laut, 2021	II-66
2.39 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021.....	II-66
2.40 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, 2021.....	II-67
2.41 Jumlah Kasus HIV/AIDS dan DBD di Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-67
2.42 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021	II-68
2.43 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021	II-69
2.44 Jumlah Kematian Maternal, Jumlah Bayi Lahir Hidup dan Jumlah Bayi Lahir Mati di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2021	II-69
2.45 Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021	II-70

2.46 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2021.....	II-71
2.47 Panjang Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2021	II-72
2.48 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2021	II-72
2.49 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021.....	II-74
2.50 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021	II-75
2.51 Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2021	II-76
2.52 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perlindungan Sosial yang Diterima di Kabupaten Tanah Laut, 2021.....	II-77
2.53 Persentase Rumah Tangga dengan Jaminan Sosial Menurut Jenis dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-77
2.54 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021	II-77
2.55 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tanah Laut.....	II-80
2.56 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020-Agustus 2021	II-81
2.57 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-82
2.58 Jumlah Akta Kelahiran di Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-85
2.59 Jaringan Jalan Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-85
2.60 Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021	II-87
2.61 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kab.Tanah Laut, 2021	II-87
2.62 Jumlah KUD dan Non KUD (unit), Anggota (orang), dan Simpanan (Rp Juta), 2021	II-88
2.63 Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021.....	II-89
2.64 Nama Obyek Wisata Budaya di Kabupaten Tanah Laut, 2019	II-92
2.65 Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut di Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-94
2.66 Jumlah & Nilai Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum di Kab. Tanah Laut, 2021.....	II-96
2.67 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah Laut (Ton), 2021	II-96

2.68	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2021	II-97
2.69	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2021	II-98
2.70	Nama Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-100
2.71	Jumlah Wisatawan Asing dan Wisatawan Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-101
2.72	Jumlah Kunjungan Objek Wisata Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-101
2.73	Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Tanah Laut (ha), 2021	II-103
2.74	Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-104
2.75	Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Tanah Laut, 2019-2021	II-104
2.76	Luas Panen Jagung Menurut Kecamatan di Kab. Tanah Laut, 2021	II-105
2.77	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Karet, Kelapa, dan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021	II-106
2.78	Perkembangan Populasi Ternak dan Unggas di Kab. Tanah Laut (ekor), 2017-2021	II-107
2.79	Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-108
2.80	Jumlah Bank di Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-114
2.81	Jumlah Hotel dan Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kab. Tanah Laut, 2021	II-115
2.82	Rekapitulasi Izin Terbit dan Retribusinya menurut Jenis Permohonan Izin di Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-117
2.83	Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021	II-119
2.84	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021	II-126
2.85	Anggaran dan Realisasi Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021	II-127
2.86	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Tindaklanjut Prioritas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021	II-129
3.1.	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023	III-9
3.2.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut TA 2019 - 2023	III-16

3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023	III-18
4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kab. Tanah Laut	IV-2
4.2 Tema RKP dan Prioritas Nasional Tahun 2023	IV-9
4.3 Tema RKPD dan Prioritas Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2023	IV-13
4.4 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2013	IV-15
4.5 Tema Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023	IV-20
4.6 Keselarasan Sasaran Daerah dengan Prioritas RKPD Tahun 2023.....	IV-20
4.7 Rekapitulasi Program RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 yang Mendukung Prioritas Daerah	IV-25
4.8 Rekapitulasi Program RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 yang mendukung Prioritas Provinsi	IV-30
4.9 Rekapitulasi Program RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 yang Mendukung Prioritas Nasional	IV-43
5.1 Daftar Pagu Indikatif per SKPD untuk membiayai Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023	V-1
6.1 Target Indikator Makro.....	VI-1
6.2 Target Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	VI-2
6.3 Tabel Indikator Per urusan	VI-29

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Sistem Perencanaan Pembangunan.....	I-6
1.2 Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-7
2.1 Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut	II-2
2.2 Peta Jaringan Sungai di Kabupaten Tanah Laut, 2020.....	II-7
2.3 Persentase Luas Wilayah Menurut Tekstur Tanah, 2020.....	II-12
2.4 Piramida Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-34
2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Menurut Sektor, 2021	II-38
2.6 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021	II-38
2.7 Rerata Kontribusi PDRB Menurut Sektor di Kabupaten Tanah Laut (%), 2021	II-41
2.8 Laju Inflasi Kota Banjarmasin (persen), 2017-2021	II-42
2.9 Angka Gini Rasio Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021	II-44
2.10 Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2021	II-45
2.11 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021.....	II-46
2.12 Persentase Angka Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Prov. Kalimantan Selatan, 2020.....	II-47
2.13 Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021	II-49
2.14 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota, 2021	II-50
2.15 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, 2019	II-74
2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (Persen)	II-80
2.17 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Laut.....	II-112
2.18 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tanah Laut.....	II-112
2.19 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Tanah Laut	II-113
3.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tanah Laut 2019-2023	III-10
3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023.....	III-17

4.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia TW I Tahun 2022 IV-6

4.2 Upaya Pengendalian Covid-19 dengan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) IV-7

4.3 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan IV-8

4.4 7 Prioritas Nasional..... IV-9

4.5 Penekanan (Highlight) Major Project RKP Tahun 2023 IV-10

4.6 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kab. Tanah Laut Th. 2023 IV-24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders*

dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa proses yaitu:

1. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
2. orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
3. penyusunan agenda tim kerja tim penyusun RKPD; dan
4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Melalui SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis, merumuskan dan menelaah hal - hal sebagai berikut:

1. analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
3. analisis kapasitas riil keuangan daerah;
4. penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
5. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
6. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
7. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
8. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
9. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
10. perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
11. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Adapun penyajian rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

1. Pendahuluan.
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah.
3. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Penutup.

Rancangan awal dikonsultasi publikasi untuk mendapat masukan dan saran guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD, yang mana Rancangan Awal yang disempurnakan tersebut menjadi pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

c. Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi renja perangkat daerah yang telah disempurnakan dan berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan renja perangkat daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Tanah Laut dan penyelarasan dengan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan pemerintah maupun provinsi.

d. Pelaksanaan musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas rancangan RKPD. Pelaksanaan musrenbang RKPD dimulai dari musrenbang kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan musrenbang kabupaten.

e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten. Rancangan akhir RKPD yang sudah disempurnakan disampaikan ke Sekretaris Daerah agar dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.

f. Penetapan RKPD

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Propinsi Kalimantan Selatan ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat, propinsi dan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

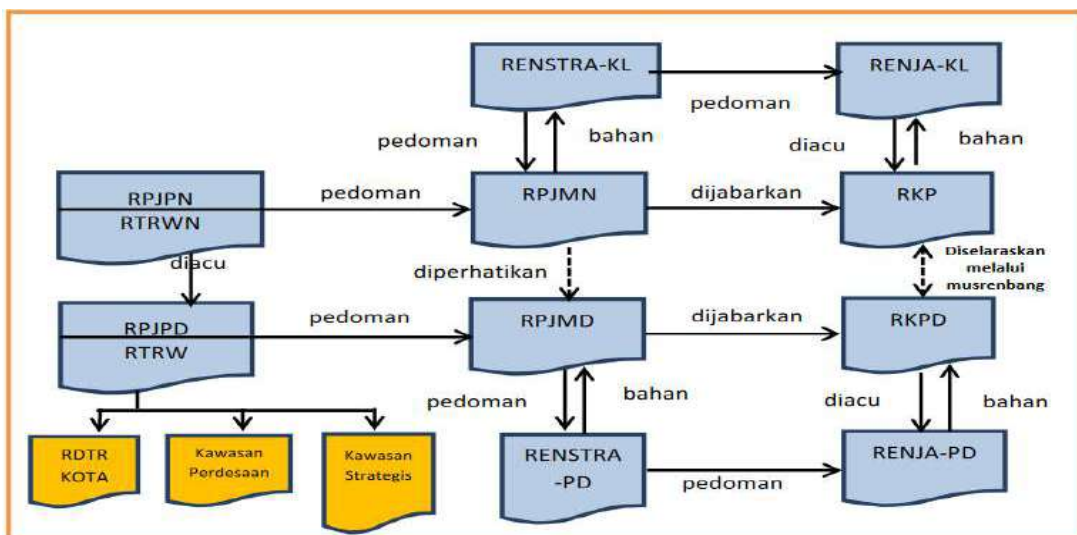
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verivikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah, dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Tanah Laut.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Selain itu juga, Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RKPD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RKPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berikut ini disampaikan diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya yang digunakan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2. Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana diagram alur diatas maka dapat dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Ketiga dokumen nasional diatas menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi, dan selanjutnya juga menjadi acuan penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD dan Renja-PD serta berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Renstra-PD dan Renja-PD juga akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD dan RKPD.

Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) dan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan yaitu RKPD dan Renja-PD. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP dan Renstra-PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat dimana penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana 5 (lima) tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra-PD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra-PD harus memperhatikan Renstra K/L.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun mengacu pada Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Nasional. Karenanya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyusun dokumen perencanaan pembangunan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 ini kemudian telah disusun rencana rincinya agar lebih operasional berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Selain itu, dengan telah ditetapkannya *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Laut juga mempedomani pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator dan target serta penganggaran terkait target TPB/SDGs.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2023 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 antara DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Bupati Tanah Laut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan, dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
 - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

VII. Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di bagian Selatan. Kabupaten Tanah Laut tidak berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin dan harus menempuh jarak kurang lebih 65 km untuk mencapainya. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 kecamatan, setiap kecamatan memiliki kondisi yang berbeda-beda baik kondisi fisik maupun non fisiknya. Uraian kondisi umum kondisi daerah akan lebih rinci dijelaskan dalam sub-sub bab selanjutnya.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

2.1.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di titik koordinat $114^{\circ}30'54,663''$ - $115^{\circ}22'38,535''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}30'37,586''$ - $4^{\circ}10'41,134''$ Lintang Selatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, luas wilayah daratan Kabupaten Tanah Laut adalah 384.852 ha dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Pelaihari. Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 kecamatan dan 130 desa dan 5 kelurahan. Secara rinci nama kecamatan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Adapun batas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

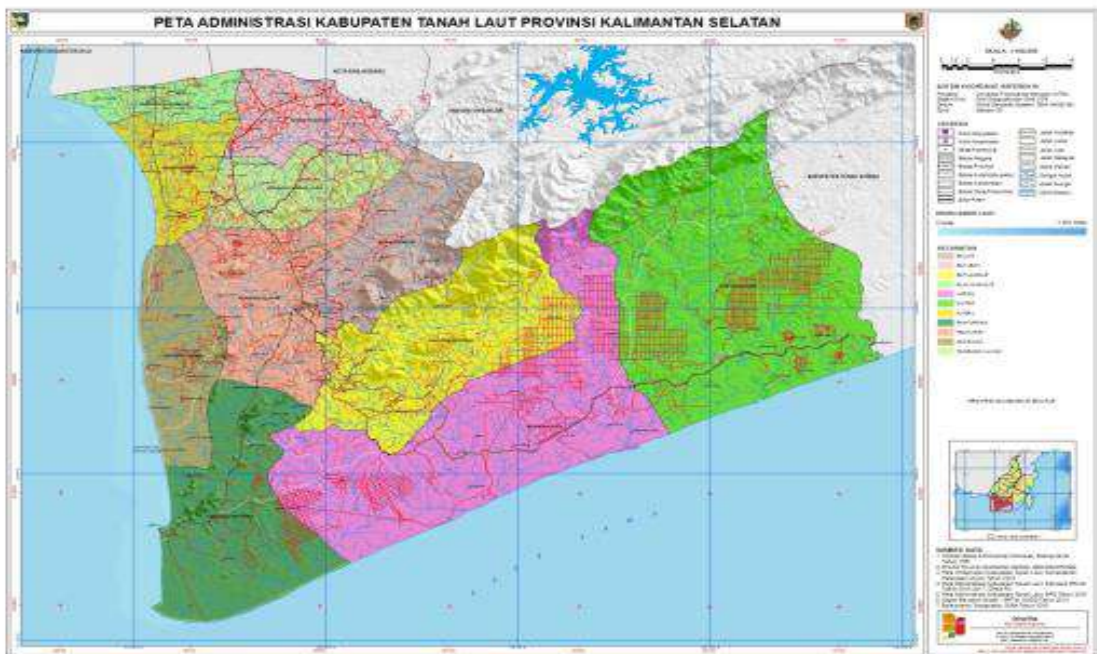
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Bumbu.

4. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten Tanah Laut Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Hektar)	Persentase (%)
1.	Jorong	628,00	17,29
2.	Kintap	537,00	14,79
3.	Batu Ampar	548,10	15,09
4.	Panyipatan	336,00	9,25
5.	Pelaihari	379,45	10,45
6.	Bajuin	196,30	5,41
7.	Takisung	343,00	9,45
8.	Bati-bati	234,75	6,46
9.	Tambang Ulang	160,75	4,43
10.	Kurau	127,00	3,50
11.	Bumi Makmur	141,00	3,88
Kabupaten Tanah Laut		3.631.35	100,0%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Laut, 2022



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Gambar 2.1 Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut

Dari 11 kecamatan yang ada, secara keseluruhan Kabupaten Tanah Laut memiliki 135 desa dan kelurahan. Wilayah yang memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari (15 desa dan 5 kelurahan), sedangkan kecamatan yang

memiliki jumlah desa sedikit adalah Kecamatan Bajuin dengan 9 desa. Rincian jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut, 2019

No.	Kecamatan	Ibukota	Desa/Kelurahan	
			Desa	Kelurahan
1.	Panyipatan	Panyipatan	10	-
2.	Takisung	Gunung Makmur	12	-
3.	Kurau	Padang Luas	11	-
4.	Bumi Makmur	Handil Babirik	11	-
5.	Bati-Bati	Padang	14	-
6.	Tambang Ulang	Tambang Ulang	9	-
7.	Pelaihari	Pelaihari	15	5
8.	Bajuin	Bajuin	9	-
9.	Batu Ampar	Batu Ampar	14	-
10.	Jorong	Jorong	11	-
11.	Kintap	Kintapura	14	-
Kabupaten Tanah Laut			130	5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Berdasarkan karakteristik geografis, kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain.

1. Kecamatan yang berada di tepi laut yakni Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap.
2. Kecamatan yang tidak memiliki wilayah laut yakni Kecamatan Bati-bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Batu Ampar.

2.1.1.1.2 Kondisi Topografi

Ditinjau dari segi topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari Barat ke Timur, mulai dari arah Selatan (Pantai Laut Jawa) ke arah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga bergunung di daerah pedalaman yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Secara umum dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi atas 2 bagian besar, yaitu: (1) Bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga berombak. Bentangan daerah ini memanjang dari Timur ke Barat dengan lebih melebar

di bagian Barat yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai, muara sungai dan Pantai Laut Jawa.(2) Bagian utara, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak, yaitu: Puncak Gunung Kemuning (750 m dpl), Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl), Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl), Puncak Gunung Kematian (951 m dpl), Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl), Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl), Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl), Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl), dan Puncak Gunung Condong (553 m dpl).

Ditinjau dari sudut ketinggian tempat (elevasi), wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi, yaitu kelas 0-7 meter, 7-25 meter, 25-100 meter, 100-500 meter, 500-1000 meter dan di atas 1000 meter. Kelas ketinggian (elevasi) lahan yang paling luas adalah kelas elevasi 0-7 meter dpl, yaitu mencapai 58.240 Ha (15.6 % dari luas daratan). Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi di atas 1.000 meter dpl, yaitu 13.661 Ha (3,7% dari luas daratan). Kelas elevasi ketinggian 0-7 meter dpl terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian di atas 500 meter terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Jika dirinci menurut kecamatan, terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Laut yang tidak memiliki wilayah pantai yaitu Kecamatan Bati-Bati, Tambang Ulang, Pelaihari, Bajuin, dan Batu Ampar. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa wilayah tertinggi di Kabupaten Tanah Laut berada di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari, dan Bati-bati. Wilayah dengan dataran rendah cukup luas tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang. Sementara itu daerah dengan ketinggian lebih dari 500 mdpl terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Kondisi Kelerengan, 2021

Kelas Lereng (%)	Deskripsi	Luas (Ha)
< 3	Datar	250.460
3 – 8	Bergelombang/agak landau	44.830
8 – 15	Bergelombang/landau	31.600
15 – 25	Berbukit	21.805
25 – 40	Bergunung	10.690
40 – 60	Bergunung curam	13.545
> 60	Bergunung sangat curam	-

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, Semakin tinggi/terjal lerengnya maka tanah semakin peka terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. 0– 3%, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 % dari luas total daratan).
2. 3 – 8%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 44.830 Ha (12,02 % dari luas total daratan).
3. 8–15%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 31.600 Ha (8,47% dari luas total daratan).
4. 15 – 25%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 21.805 Ha (5,85% dari luas total daratan).
5. 25– 40%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 10.690 Ha (2,87% dari luas total daratan).
6. 40%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timurdengan luas 13.545 Ha (3,63% dari luas total daratan).

Berdasarkan paparan diatas, terlihat bahwa wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kelas lereng 0 – 3% yaitu sebesar 77,80% dari luas total wilayah daratan. Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

2.1.1.1.3 Kondisi Geologi

Pada dasarnya Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar yang menjadi bagian dari Lempeng Mikro Sunda. Menurut Tapponnir (1982) Lempeng Asia Tenggara ditafsirkan sebagai fragmen dari lempeng Eurasia yang melejit ke Tenggara sebagai akibat dari tumbukan kerak Benua India dengan kerak Benua Asia, yang terjadi kira-kira 40 – 50 juta tahun yang lalu. Fragmen dari lempeng Eurasia ini kemudian dikenal sebagai lempeng mikro Sunda yang meliputi Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Adapun batas-batas tektonik yang paling penting disebalah timur adalah: (1) Komplek subduksi Kapur Tersier Awal yang berarah Timur laut, dimulai dari Pulau Jawa dan membentuk pegunungan Meratus sekarang, (2) Sesar

mendatar utama di Kalimantan Timur dan Utara, dan (3) Jalur subduksi di Kalimantan Utara, Serawak, dan Laut Natuna, Jalur ini dikenal dengan jalur Lupal. Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan di bagian Selatan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus terutama ditempati oleh batuan pra tersier, sedangkan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sediment tersier.

2.1.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Tanah Laut memiliki banyak sungai yang terdiri dari sungai-sungai kecil dan besar. Sungai-sungai besar tersebut merupakan induk dari beberapa sungai kecil. Kapasitas air di sungai-sungai besar relatif terjaga sehingga tidak mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Secara umum, apabila ditinjau dari kondisi fisik, sungai yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut masih menunjukkan kondisi fisik air sungai yang alami. Kondisi ini sangat ditunjang dengan adanya vegetasi yang tumbuh di sepanjang aliran sungai sebagai daerah tangkapan air hujan. Tinjauan terhadap sumberdaya air sangat *urgent* sifatnya dilakukan guna memahami potensi, bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya air. Keberadaan sungai yang wilayah alirannya (DAS) di lebih dari satu wilayah administratif menjadikan sungai harus diatur dengan sistem yang spesifik. Di Kabupaten Tanah Laut keadaan hidrologi atau sumber daya air dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Sungai atau Danau

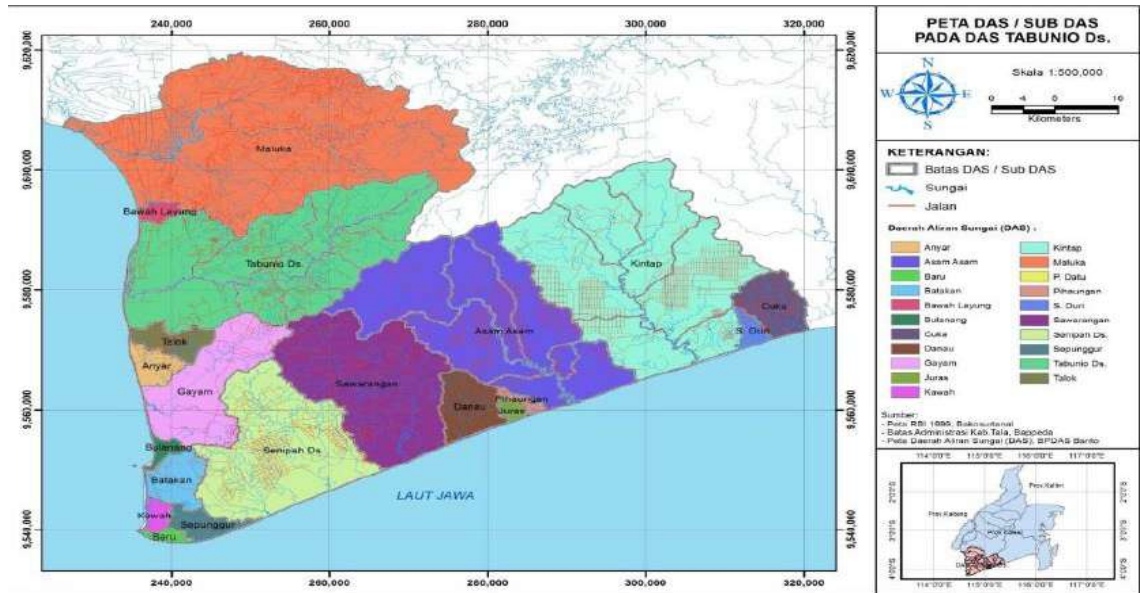
Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber daya air permukaan di Kabupaten Tanah Laut atas sungai-sungai besar dan kecil yang bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka (640 Km²), Sungai Tabanio (770 Km²), Sungai Sabulur (190 Km²), Sungai Sawarangan (580 Km²). Adapun fungsi sungai tersebut adalah untuk sumber air minum, pengairan, usaha perikanan dan sebagai sarana transportasi antara daerah/daerah timur dengan daerah-daerah Barat di Kabupaten Tanah Laut. Adapun danau-danau (rawa) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yaitu Rawa Benua Raya (6.600 Ha), Rawa Panjaratan (2.500 Ha) dan Rawa Sanipah (5.600 Ha). Pada musiman hujan terdapat wilayah yang terkena banjir, baik terus menerus tergenang maupun tergenang secara periode. Wilayah yang selalu tergenang adalah daerah Benua Raya dan Panjaratan.

2. Air Tanah

Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, jenis batuan induk dan sebagainya. Wilayah Kabupaten Tanah Laut tersusun dari batuan induk yang bervariasi dan terletak pada ketinggian 0 – 1000 m dpl. Oleh sebab itu kedalaman air tanahnya akan bervariasi, dari dangkal (daerah pantai hingga perbukitan dan pegunungan).

3. Curah Hujan

Curah hujan sebagai faktor fisik bersifat dinamis karena di pengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimasukkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi factor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh kedua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi tindakan budidaya baik terhadap teknik pengolahan tanah maupun pemilihan jenis komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Gambar 2.2 Peta Jaringan Sungai di Kabupaten Tanah Laut, 2020

Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa sungai yang membentuk beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Rincian DAS-DAS bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Pembagian Satuan Wilayah Sungai di Kabupaten Tanah Laut, 2020

No.	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
1.	DAS Kintap	Sungai Pudak, Haruan, Rantau, dan Kintap	Kecamatan Batu Ampar, Jorong dan Kintap	71.656,29
2.	DAS Tabanio	Sungai Bakar dan Tabanio	Kecamatan Bajuin, Pelaihari, Tambang Ulang, Bajuin, Kurau, dan Takisung	62.480,20
3.	DAS Asam-asam	Sungai Kaldan, Rangkan, dan asam-asam	Kecamatan Bajuin, Batu Ampar, Kintap dan Jorong	57.346,92
4.	DAS Maluka	Sungai Rangga dan Maluka	Kecamatan Bati-bati, kurau, Tambang Ulang, Bajuin, Pelaihari, dan Bumi Makmur	55.556,25
5.	DAS Sawarangan	Sungai Sawarangan	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, Batu Ampar dan Jorong	37.201,34
6.	DAS P. Datu		Kecamatan Panyipatan	2,57
7.	DAS Gayam	Sungai Batanggayam	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, dan Takisung	19.581,65
8.	DAS Pihaungan	Sungai Pihaungan	Kecamatan Jorong	1.052,23
9.	DAS Sepunggur	Sungai Sepunggur	Kecamatan Panyipatan	3.507,71
10.	DAS Danau	Sungai Danau	Kecamatan Jorong	7.036,77
11.	DAS Anyar	Sungai Anyar	Kecamatan Takisung	3.336,00
12.	DAS Juras	Sungai Juras	Kecamatan Jorong	983,92
13.	DAS Cuka	Sungai Cuka	Kecamatan Kintap	6.990,78
14.	DAS Duri	Sungai Duri	Kecamatan Kintap	1.666,41
15.	DAS Talok	Sungai Talok	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, dan Takisung	4.141,28
16.	DAS Sanipah	Sungai Sanipah	Kecamatan Panyipatan, Batu Ampar, Pelaihari dan Jorong	36.314,07
17.	DAS Bawah Layung	Sungai Bawah Layung	Kecamatan Kurau	1.522,20
18.	DAS Baru	Sungai Baru	Kecamatan Panyipatan	981,69
19.	DAS Bulanang	Sungai Bulanang	Kecamatan Panyipatan	1.307,49
20.	DAS Batakan	Sungai Batakan	Kecamatan Panyipatan	5.492,72
21.	DAS Kawah	Sungai Kawah	Kecamatan Panyipatan	1.604,19

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

2.1.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan Desember – Februari dan bulan-bulan relatif kering antara bulan Juni – Agustus. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 3.000 mm/tahun dan di wilayah Timur berkisar antara 2.000–2.500 mm/tahun. Berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspirasi bulanan, maka Kabupaten Tanah Laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang *water balance*-nya kurang dari 100 mm akan

mengalami kekurangan air. Pada musim kemarau angin bertiup dari benua Australia, keadaan angin saat itu bisa juga kencang. Pada tahun 2021, suhu udara rerata di Kabupaten Tanah Laut cenderung stabil yaitu berkisar antara 27,1-29,1°C. Suhu udara maksimum di Kabupaten Tanah Laut selama periode tersebut terjadi pada April yaitu 35,0 °C, sementara itu, untuk suhu udara minimum terendah tercatat sebesar 20,7°C pada bulan Juli 2021.

Kelembaban udara di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan tidak menentu. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 yang menunjukkan bahwa secara umum rata-rata kelembaban udara di wilayah ini berkisar antara 74,5-84,0%. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Januari yang mencapai 84,0%, sedangkan kelembaban terendah terjadi pada bulan April yaitu sebesar 74,5%.

Tabel 2.5 Temperatur (°C) dan Kelembaban Udara (%) Kab. Tanah Laut Tahun 2020-2021

No	Bulan	Rata-Rata Temperatur (°C)		Rata-Rata Kelembaban Udara (%)	
		2020	2021	2020	2021
1	Januari	27,1	27,1	80,6	84,0
2	Februari	27,8	27,8	79,8	80,8
3	Maret	28,0	28,0	79,1	79,1
4	April	29,1	29,1	78,2	74,5
5	Mei	29,1	29,1	78,7	76,3
6	Juni	28,6	28,6	78,6	76,5
7	Juli	28,3	28,3	76,1	76,5
8	Agustus	28,1	28,1	69,9	77,3
9	September	28,1	28,1	73,6	78,0
10	Oktober	28,8	28,8	74,1	77,2
11	November	28,1	28,1	79,6	80,5
12	Desember	27,7	27,7	82,2	82,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Kecepatan angin rerata di Kabupaten Tanah Laut dalam periode tahun 2021 cukup bervariasi yaitu diantara 1,2 hingga 2,5 knot. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2021, kecepatan angin rerata tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 2,5 knot dan kecepatan angin rerata terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 1,2 knot.

Tabel 2.6 Kecepatan Angin (knot) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 – 2021

No	Bulan	Rata-Rata Kecepatan Angin (knot)	
		2020	2021
1	Januari	1,5	2,5
2	Februari	1,6	2,4
3	Maret	1,5	2,1
4	April	1,6	2,2
5	Mei	1,3	1,8
6	Juni	1,6	1,6
7	Juli	1,8	1,2
8	Agustus	2,0	1,3
9	September	1,8	1,5
10	Oktober	1,7	1,2
11	November	1,4	1,5
12	Desember	1,3	1,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2021

Berdasarkan penyinaran matahari, durasi penyinaran matahari dengan presentase terendah berada di bulan Desember, yaitu hanya sekitar 16,1% per 12 jam. Sementara itu durasi penyinaran matahari yang paling tinggi terjadi pada bulan April yaitu 52,1% per 12 jam. Rincian mengenai rata-rata penyinaran matahari menurut bulan di Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2021.

Dalam periode tahun 2021, curah hujan setiap bulan di Kabupaten Tanah Laut cukup bervariasi. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2021, curah hujan bulanan tertinggi di Kabupaten Tanah Laut terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 878,6 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Oktober yang hanya sebesar 121,9 mm. Sementara itu, jumlah hari hujan tertinggi di tahun 2021 terjadi pada bulan Desember yakni mencapai 28 hari hujan. Secara rinci, jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 tampak pada tabel berikut;

Tabel 2.7 Banyaknya Curah Hujan Menurut Bulan (mm) dan Penyinaran Matahari (%), Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

Bulan	Curah hujan (mm)	Hari Hujan	Penyinaran Matahari
Januari	878,6	24	24,3
Februari	481,3	22	35,7
Maret	440,4	22	35,1
April	177,3	12	52,1
Mei	177,0	16	45,3

Bulan	Curah hujan (mm)	Hari Hujan	Penyinaran Matahari
Juni	142,8	12	48,7
Juli	178,7	13	38,0
Agustus	147,9	16	37,0
September	140,9	16	27,9
Oktober	121,9	13	29,5
November	304,4	22	26,9
Desember	389,9	28	16,1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2021

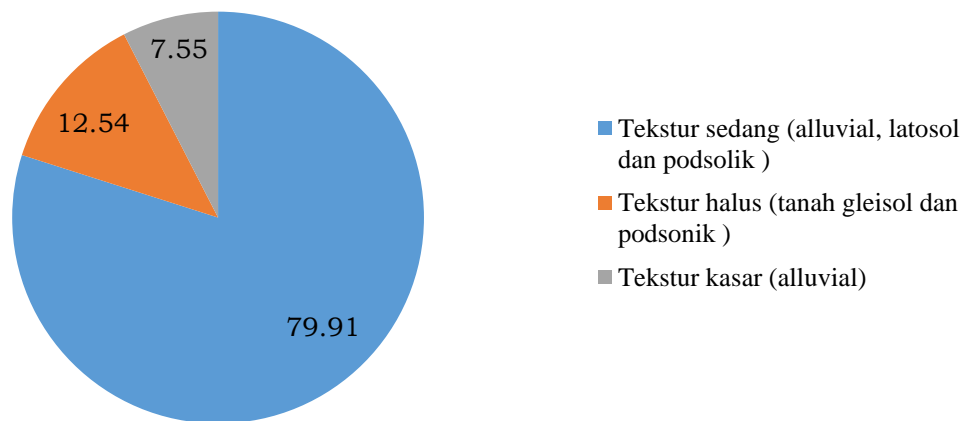
2.1.1.1.6 Karakteristik Tanah

Jenis Tanah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah podsolik, latosol, alluvial dan gleisol. Jenis tanah yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah Alluvial, Podsolik dan Laotosol. Sedangkan jenis tanah Gleisol hanya sebagian kecil saja, dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Tambang Ulang, Pelaihari dan Panyipatan.

- Jenis tanah latosol memiliki solum tanah tebal sampai sangat tebal, kandungan bahan organik 3 – 9 %, pH tanah antara 4,5 – 6,5 yaitu dari masam sampai agak masam, struktur tanahnya lemah dan konsistennya gembur. Secara keseluruhan tanah ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik, sehingga produktivitas lahannya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 108.780 Ha (29,17 % dari luas daratan seluruhnya).
- Jenis tanah Alluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 120.290 Ha (32,26 % dari luas lautan).
- Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang paling tebal yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat masam sampai sangat masam yaitu 4 – 5,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena sifat agregatnya kurang baik, sehingga mudah

terkena erosi. Produktivitasnya adalah rendah sampai sedang, menempati areal satuan 123.010 Ha (32,98 % dari luas total daratan).

Tekstur tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang digunakan secara praktis untuk memprediksi potensi penggunaan tanah. Tanah bertekstur halus (dominan liat) memiliki permukaan yang lebih halus dibanding dengan tanah bertekstur kasar (dominan pasir) sehingga tanah yang bertekstur halus memiliki kapasitas adsorpsi unsur-unsur hara yang lebih besar dan umumnya lebih subur dibandingkan dengan tanah bertekstur kasar. Tanah bertekstur kasar lebih porus dan laju infiltrasinya lebih cepat. Walaupun demikian tanah bertekstur halus memiliki kapasitas memegang air lebih besar dari pada tanah pasir karna memiliki permukaan yang lebih luas. Sementara itu tekstur tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu tekstur halus (lempung berliat hingga liat), tekstur sedang (lempung sampai lempung liat berdebu) dan tekstur kasar (lempung berpasir sampai berkerikil). Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi.



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Gambar 2.3 Persentase Luas Wilayah Menurut Tekstur Tanah, 2020

Sifat tanah yang bertekstur halus baik untuk budidaya maupun non budidaya. Pada tanah yang bertekstur halus semua tanaman dapat tumbuh dengan baik dan tahan terhadap erosi. Sedangkan pada tanah yang bertekstur sedang tanaman masih dapat tumbuh dengan baik, tetapi harus dengan perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena bertekstur sedang lebih peka terhadap erosi. Tanah dengan tekstur kasar memerlukan air

sangat tinggi, sehingga daya simpan airnya sangat rendah, akibatnya kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering. Pada umumnya tanah di Kabupaten Tanah Laut ini bertekstur sedang yang meliputi jenis tanah alluvial, latosol dan podsolik yaitu 297.285 Ha (79,91%), tanah bertekstur halus meliputi jenis tanah gleisol dan podsonik seluas 46.750 Ha (12,54%) dan tanah yang bertekstur kasar meliputi jenis tanah alluvial seluas 28.915 Ha (7,55%). Dengan demikian, di Kabupaten Tanah Laut sedikitnya terdapat 28.915 Ha (7,55%) mempunyai kendala dalam pengembangan kawasan budidaya dengan faktor pembatas tekstur tanah yang kasar.

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Ketersediaan tanah (lahan) memberikan gambaran potensi lahan dan arahan bagi kawasan yang dapat dikembangkan/dibudidayakan atau karena limitasinya tidak dapat dikembangkan sama sekali berdasarkan faktor-faktor fisik dasar. Penggunaan lahan sekarang memberi gambaran sejauh mana jenis dan tingkat pemanfaatan lahan yang telah dilakukan baik yang bersifat budidaya maupun bukan budidaya. Ketersediaan tanah pada dasarnya tidak dilepaskan dengan status atau penguasaannya sekarang. Status tanah sekarang pada dasarnya sangat menentukan mudah dan dapat tidaknya suatu bidang tanah dikuasai atau dialihkan penguasaannya oleh pihak ketiga untuk kegiatan tertentu.

Melihat dari luas wilayah yang ada dengan penggunaan lahan seluas 92.814 ha (24,6%) merupakan kawasan hutan, 71.288 ha (19,2%) merupakan lahan perkebunan, 51.122 ha (13,7%) merupakan lahan sawah dan tegalan serta sisanya 4.157 ha (1,11%) untuk kawasan pemukiman dan lain-lain, maka Kabupaten Tanah Laut telah menyiapkan beragam potensi yang masih dan dapat dikelola untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kabupaten Tanah Laut melalui kebijakan penataan ruang wilayahnya telah memprioritaskan 5 (lima) kawasan dengan masing-masing fungsi strategisnya yaitu: (1) Kawasan industri dipusatkan di Kecamatan Bati-Bati dan Jorong, (2) Pertanian di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur, (3) Perikanan laut di Kecamatan Kurau, Takisung, Panyipatan, Jorong dan Kintap, (4) Pertambangan di Kecamatan Jorong dan Kintap, dan (5) Wisata di Kecamatan Takisung, Panyipatan, Jorong dan Pelaihari.

Kebijakan penataan ruang wilayah ini dimaksudkan tidak lain untuk mengantisipasi adanya pengembangan perlintasan 2 kawasan di Kabupaten Tanah Laut, yaitu sebelah utara pengembangan dengan Banjarmasin-Banjar/Banjarmasin dan sebelah timur dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Kebijakan yang tertuang dalam program pengembangan wilayah diharapkan dapat mendukung pengembangan 2 wilayah,

sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah, terkendali yang pada akhirnya dapat tercapai hasil pembangunan yang maksimal. Penataan ruang wilayah yang tersebar dimaksudkan juga untuk membuka peluang bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya, mengenai kawasan peruntukan permukiman, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 Pasal 38, kawasan permukiman terdiri atas: (a) kawasan permukiman perkotaan; dan (b) Kawasan permukiman perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, industri, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Pelaihari, Perkotaan Bati-Bati, Perkotaan Jorong, Perkotaan Kintap, dan Perkotaan Takisung, serta masing-masing perkotaan menyediakan RTH minimum 30%. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan permukiman perdesaan meliputi kawasan permukiman perdesaan yang menyebar di sekitar daerah pertanian di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut; dan rencana pengembangan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki luas sebesar kurang lebih 37.062,48 hektar.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah, penataan ruang menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat kondisi geografis, potensi sektor pertanian secara keseluruhan, potensi pariwisata, dan potensi sumberdaya alam Kabupaten Tanah Laut. Pembangunan harus memanfaatkan berbagai sumberdaya potensial yang tersedia dimana nantinya perencanaan pembangunan harus lebih menekankan pada sektor-sektor unggulan tersebut.

Hal yang harus diupayakan dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatkan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas mengingat masih ada daerah di Kabupaten Tanah Laut yang belum terlalu maju. Pengembangan dan pemerataan infrastruktur di wilayah ini mutlak diutamakan. Hal ini

karena masih rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur dasar di semua wilayah yang akan berdampak pada terbatasnya kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Implementasi pembangunan pada masa mendatang diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berikut ini merupakan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036:

Tabel 2.8 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten Tanah Laut

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
A. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten				
1.	Sistem Perdesaan	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Pengembangan kawasan perdesaan berbasis hasil pertanian dan perkebunan	Pengembangan pusat produksi tanaman pangan sentra padi di Kecamatan Bumi Makmur, Kurau, dan Panyipatan
			Pengembangan Kawasan Perkampungan/ Desa-Desa Nelayan	Pengembangan Tanaman Perkebunan di Kintap, dan Jorong
			Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan Kawasan Peternakan di Bati-Bati
		Pengembangan Kawasan Agropolitan	Mendorong pengembangan sentra produksi jagung di Batu Ampar, Pelaihari dan Panyipatan	Perwujudan Penguatan Desa Pusat Pelayanan (DPP) di kawasan. Penciptaan dan Peningkatan Pelayanan Pusat Kawasn (pasar, dll)
				Penyediaan lahan untuk komoditas tanaman jagung. Membatasi pergantian ke komoditas lain
2.	Sistem Perkotaan	Pengembangan orde perkotaan	Pengembangan ibukota kabupaten sebagai perkotaan PKL Kota Pelaihari dan PLKp Bati-Bati	Peningkatan akses ke arah pusat
				Peningkatan fasilitas-2 pelayanan
		Pengembangan perkotaan utama sebagai perkotaan PPK dan PKL	Pengembangan perkotaan PPK Bati Bati, Kintap, Jorong dan Takisung serta PPL Kurau, tambang Ulang, Bumi makmur,	Pengembangan pelabuhan perikanan
				Pengembangan kawasan industri
Pengembangan permukiman				

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
			Batu Ampar, Bajuin dan Panyipatan	Rencana Pengembangan pelabuhan umum Rencana Pembangunan jalan lingkaran utara Pelaihari – Tambang Ulang – Batu Ampar, Tanah Laut
		Hirarki (besaran) perkotaan	Pengembangan Perkotaan Bati Bati sebagai Pendukung sistem Kawasan metropolitan Banjar Bakula	Peningkatan sarana-prasarana penunjang perkotaan skala regional dan nasional
		Sistem dan fungsi perwilayahan	Mendorong pembentukan pusat pelayanan	Peningkatan akses ke arah pusat Pelayanan
		Fasilitas perkotaan	Pengembangan Pusat-Pusat Perkotaan Pelaihari, Bati Bati dan Kintap	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan PKL, PPK dan PPL
			Pengembangan Pusat-Pusat Ibukota Kecamatan	Pengembangan Infrastruktur IKK
		Prasarana wilayah	Mewujudkan jalan internal provinsi melalui pengembangan jalan tembus	Pembangunan Jalan Lintas Utara Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Kota Banjarmasin – Jalan Pesisir Barat Kabupaten Tanah Laut. Rencana Kolektor Primer Gambut-Pulosari
		Permukiman Perkotaan	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dan Padat Perencanaan Kawasan Pengembangan Baru Perkotaan untuk Lahan Perumahan (Permukiman Tertata)
B.	Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan			
1.	Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan	Pengembangan produk unggulan	Mendorong eksporhasil pertanian unggulan daerah	Pengembangan sentra produksi-pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Kawasan Agropolitan
		Pengembangan Sistem Agropolitan	Pengembangan produk unggulan, pengolahan dan perluasan jaringan di Kecamatan Batu Ampar, Panyipatan dan Pelaihari	Pengembangan Pasar Hewan Pengembangan Terminal Agrobisnis

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
2.	Penetapan Fungsi Kawasan Perkotaan	Pelayanan Sosial Ekonomi	Pengembangan Perkotaan Sebagai Pusat Pelayanan Sosial – Ekonomi	Kota Pelaihari sebagai ibukota Kabupaten Tanah Laut Kota Panyipatan sbg kota Pelabuhan Kota Bati Bati dan Jorong sebagai Kota Industri Perkotaan Pelaihari sbg kota perdagangan regional Perkotaan Takisung, Batu Ampar dan Bajuin sebagai Penyangga Perkembangan Perkotaan Pelaihari-Ibu Kota Kabupaten
		Pengembangan Perkotaan IKK	Pemenuhan fasilitas perkotaan dan peningkatan interaksi kawasan	Penyediaan sarana penunjang
C. Pengembangan Prasarana Wilayah				
1.	Transportasi Jalan Raya	Membuka Wilayah Terisolir	Pengembangan jalan penghubung dan jalan tembus/sirip utara antar wilayah	Pengembangan Simpang Tiga Nusa Indah Bati Bati menjadi interkoneksi untuk kegiatan Terminal Agrobisnis, Pengembangan Simpang Tiga Nusa Indah Bati Bati ke arah Jalan Lingkar Utara menelusuri sisi Tahura melewati beberapa titik kawasan lindung di Bajuin, Batu Ampar, Jorong dan Kintap
		Mengantisipasi Permintaan Transportasi Akan Datang dan Mengatasi Permasalahan Transportasi	Penyediaan Sistem Jaringan dan Prasarana Transportasi	Pengembangan Jalan Arteri Primer sebagai Jalan Bebas Hambatan Peningkatan beberapa Fungsi Jalan Kabupaten menjadi Kolektor Primer Pengembangan Terminal Tipe B Ambungan Pengembangan Sub Terminal di Bati Bati, Kintap

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				Peningkatan Jalan Ambungan Tajau Pecah, Kab. Tanah Laut
				Pembangunan jalan akses kawasan pariwisata Takisung – Batakan, Tanah Laut
		Mendukung Ekonomi Regional dan Lokal	Pengembangan Sistem Jaringan Jalan untuk menunjang Kepelabuhanan	Jalur Alternatif 1 Banjarmasin – Tanjung Dewa
				Jalur Alternatif 2 Banjarmasin – Tanjung Dewa
				Jalur Alternatif 1 Kintap – Tanjung Dewa
				Jalur Alternatif 2 Kintap – Tanjung Dewa
				Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Pelaihari
2.	Transportasi Udara	Studi Alternatif Tahap Awal	Penjajakan kemungkinan pengembangan bandara udara	Studi Kelayakan Lokasi
				Studi Kebutuhan Pasar
				Pengembangan Kerjasama Bandar Udara
3.	Transportasi Sungai dan Laut	Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Air	Pengembangan Alur Sungai Sebagai Pelayaran/ Rute Sungai	Pengembangan Alur di DAS Tabanio Pengembangan Alur di DAS Kintap Pengembangan Alur di DAS Swarangan Pengembangan Alur di DAS Asam-Asam
			Pengembangan Pelabuhan Laut Alternatif	Pengembangan Pelabuhan Umum Alternatif di Pulau Datu - Tanjung Dewa
				Pembangunan, peningkatan dan pengembangan prasarana Pelabuhan Kintap, Tanah Laut
			Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP-TPI)	Pemantapan dan Peningkatan PP TPI di Kintap, Jorong, Swarangan, Tanjung Desa dan Tabanio

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
			Penyiapan kelembagaan operasional pengelola kawasan pelabuhan Tanjung Dewa dan Pelabuhan Curah Kering / Basah Jorong	Penyiapan lahan dan infrastruktur penunjang pelabuhan Menyiapkan lembaga pengelola Kawasan pelabuhan Tanjung Dewa
4.	Prasarana Telematika	Optimalisasi pelayanan	Pengembangan prasarana penunjang	Penyediaan tower BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) secara bersama
				Pengadaan sistem internet, 3G dan GPS
			Peningkatan jumlah dan mutu telematika	Penerapan teknologi telematika berbasis teknologi modern Pembangunan teknologi telematika pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan seperti di kota Pelaihari dan Bati Bati
5.	Prasarana Pengairan	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Pengembangan pengelolaan DAS Tabanio, Kintap, Jorong
				Penanaman pohon pencegah longsor
				Pembangunan dan perbaikan pintu air
				Pengelolaan mata air melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
				Pengendalian banjir, Jorong, Asam-Asam dan Kontap
				Pembangunan Pengamanan Pantai Takisung
6.	Prasarana Energi/ Listrik	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan kapasitas listrik	Penambahan dan perbaikan jaringan
				Peningkatan infrastruktur pendukung
				Pengembangan sumber listrik (PLTD dan PLTU)
				Pengembangan Gardu Induk Pelaihari (30 MVA)
7.	Prasarana Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan dan	Peningkatan Pelayanan Sanitasi Dasar	Peningkatan Prasarana dan Sarana Persampahan

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
		peningkatan sarana prasarana lingkungan		1. Pevadahan (bin kapasitas 50 l) 2. Pengangkutan (gerobak, container dan truk pengangkut) 3. Pembangunan TPS (landasan/transfer depo) Pembangunan TPST Penyediaan Komposter Aerob Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan di TPA 1. Metode Sanitary Landfill 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di TPA sesuai standar Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasana persampahan Kegiatan Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri Peningkatan SDM pegawai pengelola persampahan
D.	Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten			
1.	Kawasan Lindung	Pemantapan Kawasan Lindung	Pemantapan kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air Pemantapan Kawasan Perlindungan setempat	Pengembalian fungsi lindung dgn reboisasi Penanganan secara teknis Pengembangan hutan dan tanaman tegakan tinggi Perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional; Pengelolaan DAS Tabanio untuk air baku Waduk dan mata air, dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				<p>pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air</p> <p>Mempertahankan ekosistem pantai : hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut dan estuaria. Penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam, permukiman harus memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir</p> <p>Pemanfaatan sumber air dan waduk untuk irigasi</p>
			<p>Pemantapan kawasan Cagar Budaya</p>	<p>Memelihara nilai dan fungsinya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata, Benteng Tabanio, dll</p> <p>Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan</p>
<p>2.</p>	<p>Kawasan budidaya</p>	<p>Pengembangan Kawasan Budidaya</p>	<p>Peningkatan Kualitas Lingkungan</p> <p>Pengembangan Hutan Produksi Bernilai Ekonomi Tinggi Dengan Fungsi Lindung</p> <p>Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Pengolahan Hasil Produksi Berorientasi Peningkatan Nilai Ekonomi dan Ekspor</p>	<p>Memelihara habitat dan keaslian ekosistem</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reboisasi tanaman untuk menahan tanah. ➤ Pengembangan aneka produk olahan ➤ Mengembangkan hutan rakyat ➤ Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung Pelaihari-Batu Ampar-Panyipatan. ➤ Pengembangan Pertanian Lahan Basah di Bumi Makmur, Kurau, dan Panyipatan. ➤ Pengembangan Perikanan di Kintap,

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				Swarangan, dan Tabanio serta Industri Pengolahannya di Bati-bati
			Pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan	Pengembangan Pertambangan mineral dan batubara di 9 kecamatan
			Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil Bati Bati
				Pengembangan Industri Berbasis Sumberdaya Alam Jorong
			Pengembangan Kawasan Parwisata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan DTW Prioritas sesuai RIPPDA ➤ Pengembangan Potensi Obyek ➤ Mengkaitkan kalender wisata provinsi dan nasional ➤ Peningkatan Promosi wisata. ➤ Pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabupaten Tanah Laut berada pada posisi ke 58 secara nasional dan tertinggi se-Kalimantan Selatan dengan total Skor 178.00 pada kelas risiko Tinggi. Data yang digunakan merupakan data hasil kajian risiko yang terdiri dari data: (1) bahaya per jenis bencana, (2) jiwa terpapar per jenis bencana, (3) kerugian rupiah per jenis bencana, (4) kerusakan lingkungan (ha) per jenis bencana dan (5) kapasitas pemerintah daerah per kabupaten/kota.

Berdasarkan kondisi wilayahnya dilihat dari karakteristik ekoregionnya, Kabupaten Tanah Laut memiliki kerawanan terhadap kebakaran hutan, kekeringan, banjir dan pendangkalan sungai, erosi permukaan dan degradasi lahan karena penambangan

batubara, tanah longsor. Berdasarkan Data Jumlah Kejadian Bencana Alam menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut pada Tabel 2.10, bencana banjir masih menjadi bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Tanah Laut dengan total 79 kejadian. Disusul dengan bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 52 kejadian dan gelombang pasang sebanyak 13 kejadian.

Tabel 2.9 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2021

No.	Kecamatan	Banjir	Tanah Longsor	Kebakaran Hutan dan Lahan	Angin Puting Beliung	Gelombang Pasang
1.	Panyipatan	4	-	8	-	2
2.	Takisung	12	-	-	1	5
3.	Kurau	11	-	3	-	3
4.	Bumi Makmur	9	-	-	3	2
5.	Bati-Bati	11	-	14	2	-
6.	Tambang Ulang	3	-	10	-	-
7.	Pelaihari	8	2	7	-	-
8.	Bajuin	1	-	-	-	-
9.	Batu Ampar	3	-	-	-	-
10.	Jorong	6	-	5	-	-
11.	Kintap	11	-	5	-	1
	Tanah Laut	79	2	52	6	13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Penilaian ancaman bencana (bahaya) merupakan dasar penentuan peta dan tingkat bahaya di Kabupaten Tanah Laut. Penilaian tersebut diperoleh dari besaran luas wilayah terpapar dari setiap jenis potensi bahaya. Potensi luas bahaya tersebut dihitung berdasarkan pada parameter-parameter yang berbeda untuk setiap bahaya. Parameter tersebut mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya dari kementerian/lembaga di tingkat nasional. Tabel 2.10 menunjukkan luas bahaya dan tingkat bahaya seluruh potensi bahaya di Kabupaten Tanah Laut. Secara keseluruhan potensi bahaya di Kabupaten Tanah Laut hanya memiliki kelas sedang dan tinggi.

Tabel 2.10 Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No.	Jenis Bencana	Luas (ha)	Kelas
1.	Banjir	182.755	Tinggi
2.	Banjir Bandang	6.949	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrem	212.073	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	3.326	Tinggi
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	175.785	Tinggi
6.	Kekeringan	363.135	Sedang

7.	Tanah Longsor	26.298	Sedang
Jumlah		970.321	Tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2019

Tabel 2.11 Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan, 2021

No.	Kecamatan	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Terendam
1.	Panyipatan	41	19	-	472
2.	Takisung	866	130	8	1939
3.	Kurau	415	54	-	3036
4.	Bumi Makmur	321	43	35	3107
5.	Bati-Bati	5	11	10	2653
6.	Tambang Ulang	-	-	-	220
7.	Pelaihari	-	26	7	1005
8.	Bajuin	-	-	-	82
9.	Batu Ampar	-	-	-	243
10.	Jorong	-	-	-	804
11.	Kintap	15	2	-	1925
Tanah Laut		1663	285	67	14856

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Tabel 2.12 Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan, 2021

No.	Kecamatan	Meninggal dan Hilang	Luka-luka	Mengungsi
1.	Panyipatan	-	-	1777
2.	Takisung	-	-	8805
3.	Kurau	-	-	10921
4.	Bumi Makmur	-	-	11872
5.	Bati-Bati	-	-	9733
6.	Tambang Ulang	-	-	795
7.	Pelaihari	3	5	3542
8.	Bajuin	-	-	384
9.	Batu Ampar	-	-	745
10.	Jorong	-	-	2606
11.	Kintap	-	-	4830
Tanah Laut		3	5	56010

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Pada bulan Januari tahun 2021, telah terjadi bencana banjir yang melanda Kabupaten Tanah Laut. Pada Tabel 2.13, ditunjukkan data kejadian bencana banjir di Kabupaten Tanah Laut dengan daerah yang paling terdampak pada Kecamatan Bumi Makmur dengan total rumah terendam sebanyak 3.107 unit rumah, 3.558 KK, dan 11.146

jiwa. Selanjutnya, Kecamatan Kurau total rumah terdampak banjir sebanyak 3.036 unit rumah, 3.036 KK, dan 9.526 jiwa. Untuk Kecamatan Bati-Bati, total rumah terendam banjir sebanyak 2.671 unit rumah, 2.933 KK dan 9.708 jiwa.

Tabel 2.13 Data Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Laut, 2021

No	Kecamatan	Terdampak					
		Rumah	KK	Jiwa	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
1	Pelaihari	1.005	1.005	3.542	7	2	3
2	Bati-Bati	2.671	2.933	9.708			
3	Tambang Ulang	220	246	795			
4	Kurau	3.036	3.036	9.526			
5.	Bumi Makmur	3.107	3.558	11.146			
6.	Kintap	10	10	40			
7.	Jorong	164	168	548			
8.	Bajuin	82	129	384			
9.	Panyipatan	472	491	1.757			
10.	Takisung	1.792	1.807	4.816			
11.	Batu Ampar	93	93	281			
TOTAL		12.652	13.476	42.543	7	2	3

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2021

Kajian kerentanan merupakan penggabungan dari indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar mengkaji potensi penduduk terpapar dan indeks kerugian mengkaji potensi kerugian (dalam bentuk rupiah dan hektar lingkungan yang rusak). Melihat potensi penduduk yang terpapar, bencana kekeringan, cuaca ekstrem, dan banjir merupakan hal yang harus diwaspadai mengingat jumlah penduduk yang terpapar bencana-bencana tersebut mencapai ratusan ribu jiwa. Jumlah penduduk yang terpapar bencana kekeringan mencapai 338.291 jiwa, bencana cuaca ekstrem sebanyak 336.286 jiwa, dan banjir sebanyak 242.312 jiwa.

Tabel 2.14 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No.	Jenis Bencana	Penduduk Terpapar (jiwa)	Kelompok Rentan			Kelas
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1.	Banjir	242.312	17.739	44.761	569	Tinggi

No.	Jenis Bencana	Penduduk Terpapar (jiwa)	Kelompok Rentan			Kelas
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
2.	Banjir Bandang	4.355	176	559	7	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrem	336.286	23.652	59.333	798	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	8.148	764	1.952	26	Tinggi
5.	Kekeringan	338.291	23.809	59.698	802	Sedang
6.	Tanah Longsor	1.713	128	285	15	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2019

Bencana akan terjadi dan menimbulkan dampak kerugian bila skala dari ancaman terlalu tinggi, kerentanan terlalu besar, dan kapasitas serta kesiapan yang dimiliki masyarakat atau pemerintah tidak cukup memadai untuk mengatasinya. Ancaman atau bahaya tidak akan menjadi bencana apabila kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian baik fisik maupun korban jiwa. Secara teknis, bencana terjadi karena adanya ancaman dan kerentanan yang bekerjasama secara sistematis serta dipicu oleh faktor-faktor luar sehingga menjadikan potensi ancaman yang tersembunyi muncul ke permukaan sebagai ancaman nyata. Risiko bencana daerah dilihat melalui pengkajian risiko bencana yang dilakukan dengan menganalisis nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan nilai kapasitas suatu daerah. Risiko bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung. Adapun dampak dari kerugian bencana alam dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15 Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No.	Jenis Bencana	Potensi Kerugian (Rp juta)				Potensi Kerusakan Lingkungan	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
1.	Banjir	182.755	82.135	924.837	Tinggi	42.463	Tinggi
2.	Banjir Bandang	6.949	106.716	122.774	Tinggi	3.623	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrem	212.073	553.348	2.432.266	Tinggi	-	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	3.326	10.003	40.532	Tinggi	2.271	Tinggi
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	175.785	38.367	38.367	Tinggi	50.189	Tinggi

No.	Jenis Bencana	Potensi Kerugian (Rp juta)				Potensi Kerusakan Lingkungan	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
6.	Kekeringan	363.135	2.120	2.120	Sedang	66.583	Tinggi
7.	Tanah Longsor	26.298	53.149	59.711	Tinggi	12.771	Tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2019

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kerugian fisik terbesar bencana di Kabupaten Tanah Laut berasal dari bencana cuaca ekstrim yang mencapai Rp 1,88 triliun, sedangkan bencana banjir dapat menimbulkan kerugian fisik sebesar Rp 842,70 miliar. Untuk kerugian ekonomi, dampak kerugian terbesar ditimbulkan oleh bencana cuaca ekstrim yang mencapai Rp 553,35 miliar dan bencana banjir bandang dapat menimbulkan kerugian sebesar Rp 106,72 miliar. Jika dilihat dari potensi kerusakan lingkungan, bencana kekeringan menimbulkan dampak kerugian terbesar dimana luas areal yang terdampak dapat mencapai 66.583 ha, disusul bencana kebakaran lahan dan hutan yang seluas 50.189 ha, dan bencana banjir seluas 42.463 ha.

Kapasitas merupakan kemampuan individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Penilaian kemampuan dilakukan pada sumberdaya orang per orang, rumah tangga, dan kelompok untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan atas dampak dari ancaman bencana. Aspek kemampuan antara lain kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Penilaian kapasitas daerah ditentukan berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Tabel 2.15 menunjukkan bahwa kapasitas Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi seluruh bencana yang berpotensi berada pada tingkat rendah. Dengan kapasitas rendah, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu meningkatkan kapasitasnya guna mengurangi dampak risiko yang akan timbul apabila terjadi bencana yang sudah berpotensi terjadi.

Tabel 2.16 Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No.	Jenis Bencana	Kelas Ketahanan Daerah	Kelas Kesiapsiagaan	Kelas Kapasitas
1.	Banjir	Sedang	Rendah	Rendah
2.	Banjir Bandang	Sedang	Rendah	Rendah
3.	Cuaca Ekstrim	Sedang	Rendah	Rendah
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Sedang	Rendah	Rendah

No.	Jenis Bencana	Kelas Ketahanan Daerah	Kelas Kesiapsiagaan	Kelas Kapasitas
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Rendah	Rendah
6.	Kekeringan	Sedang	Rendah	Rendah
7.	Tanah Longsor	Sedang	Rendah	Rendah

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2019

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel 2.16. Dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kabupaten Tanah Laut. Tingkat risiko untuk 7 (tujuh) jenis bencana di Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi dengan tingkat risiko tinggi. Hal ini gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.17 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
3.	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6.	Kekeringan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang
7.	Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Tanah Laut (KRB Kab. Tanah Laut Tahun 2018 – 2023)

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, telah dipaparkan berbagai kemungkinan bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hal tersebut, telah diatur beberapa hal mengenai bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Hal yang pertama adalah mengenai kawasan rawan bencana yang tercantum pada RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036:

1. Kawasan rawan bencana alam meliputi (a) kawasan rawan banjir; (b) kawasan rawan kebakaran lahan/hutan dan permukiman; (c) kawasan rawan tanah longsor; (d)

- kawasan rawan angin puting beliung; dan (e) kawasan rawan gelombang pasang(rob) dan abrasi.
2. Kawasan potensi rawan banjir adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi: (a) Kecamatan Pelaihariterdapat di Desa Panjaratan; (b) Hampir semua desa di Kecamatan Kurau; (c) Kecamatan Bati-Bati di Desa Benua Raya dan Desa Bati-Bati; (d) Kecamatan Takisung di Desa Tabanio, Desa Kuala Tambangan, Desa Takisung, Desa Gunung Makmur, Desa Benua Tengah, dan Desa Pagatan Besar; (e) Kecamatan Jorong di Desa Sabuhur, Desa Jorong, Desa Asam-Asam, Desa Swarangan, dan Desa Muara Asam-Asam; (f) Kecamatan Panyipatandi Desa Kuringkit, Desa Batu Mulya dan Desa Bumi Asih; (g) Kecamatan Kintap di Desa Kintap, Desa Kintapura, Desa Riam Adungan, Desa Muara Kintap, Desa Salaman, Desa Kintap Kecil, dan Desa Pasir Putih; (h) Kecamatan Tambang Ulang di Desa Tambang Ulang; (i) Kecamatan Batu Ampar; (j) Kecamatan Bajuin di Desa Bajuin, Desa Kunyit, dan Desa Sungai Bakar; dan (k) Hampir semua desa di Kecamatan Bumi Makmur.
 3. Kawasan rawan kebakaran terdiri atas: (a) kawasan rawan kebakaran lahan/hutan; dan (b) kawasan rawan kebakaran permukiman.
 4. Kawasan rawan kebakaran lahan/hutan adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi: (a) Daerah gambut di Kecamatan Bati-Bati; (b) Kecamatan Kintap di Desa Riam Adungan; dan (c) Kecamatan Batu Ampar di Desa Bluru.
 5. Kawasan rawan kebakaran permukiman: tidak ada daerah yang tingkat kerawanannya tinggi.
 6. Kawasan rawan tanah longsor meliputi: (a) Kecamatan Pelaihari dengan tingkat kerawanan rendah, yakni: Desa Ujung Batu; dan (b) Kecamatan Kintap dengan tingkat kerawanan rendah, yakni : Desa Kintap.
 7. Kawasan rawan angin puting beliung meliputi sebagian besar kecamatan akan tetapi dengan tingkat kerawanan sebagian besar rendah.
 8. Kawasan rawan abrasi/ gelombang pasang terdapat pada daerah pesisir pantai, meliputi:
 - a. Empat (4) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Kurau dengan tingkat kerawanan sedang sampai dengan tinggi, yakni Desa Sungai Bakau, Desa Padang Luas, Desa Bawah Layung, dan Desa Kurau.

- b. Lima (5) lokasi desa dari 12 desa di Kecamatan Takisung dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni: Desa Tabanio, Desa Kuala Tambangan, Desa Takisung, dan Desa Telaga Langsung.
- c. Satu (1) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Jorong dengan tingkat kerawanan rendah, yakni : Desa Simpang Empat Sungai Baru.
- d. Enam (6) lokasi desa dari 10 desa di Kecamatan Panyipatan dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni: Desa Panyipatan, Desa Kandangan Baru, Desa Kandangan Lama, Desa Batakan, Desa Tanjung Dewa, dan Desa Batu Mulya.
- e. Delapan (8) lokasi desa dari 14 desa di Kecamatan Kintap dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni: Desa Pandan Sari, Desa Kintap, Desa Kintapura, Desa Muara Kintap, Desa Sumber Jaya, Desa Kebun Raya, Desa Mekar Sari dan Desa Sebamban Baru.
- f. Sepuluh (10) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Bumi Makmur dengan tingkat kerawanan sedang, yakni: Desa Sungai Rasau, Desa Handil Labuan Amas, Desa Handil Maluka, Desa Handil Suruk, Desa Handil Gayam, Desa Handil Birayang Atas, Desa Handil Birayang B

Selain hal-hal tersebut, diatur juga mengenai jalur evakuasi bencana di Kabupaten Tanah Laut. Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Perda RTRW Kabupaten Tanah Laut ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Jalur utama dari lokasi bencana banjir di Desa Nusa Indah dan Bati-bati melalui Jalan Ahmad Yani ke Kecamatan Tambang Ulang;
- b. Jalur utama dari lokasi kebakaran di daerah lahan kritis pada lahan gambut melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan;
- c. Jalur utama dari lokasi tanah longsor di Kecamatan Batu Ampar, Jorong, dan Kintap melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan; dan
- d. Jalur utama dari lokasi abrasi di sepanjang garis pantai kabupaten melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan.

Berbagai program dan rencana mitigasi bencana sebagaimana yang dimaksud diatas dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten. Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan, penanggulangan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. Sementara itu, mengenai Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 Pasal 65 huruf p ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk ;
- c. Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- d. Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini; dan
- e. Diizinkan melakukan kegiatan budidaya lain, seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi risiko yang timbul akibat bencana alam.
- f. Pemanfaatan ruang dengan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- g. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- h. Penetapan batas dataran banjir;
- i. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- j. Dilarang pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

2.1.1.4 Kondisi Demografi

Penduduk sebagai faktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk

akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk dibagi atas kelompok–kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 adalah sebanyak 354.340 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Laut selama periode 2020-2021 adalah 1.15 %.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Tanah Laut adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 78.634 jiwa (22,19%) dan memiliki pertumbuhan penduduk sebesar 1,34% sedangkan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kintap merupakan yang terendah yaitu sebesar 0,85%. Wilayah yang memiliki penduduk tertinggi kedua adalah Kecamatan Bati-Bati yaitu sebanyak 45.350 jiwa (12,80%), disusul Kecamatan Kintap sebanyak 43.555 jiwa (12,29%), dan Kecamatan Jorong sebanyak 35.124 jiwa (9,91%). Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan kurau yaitu 13.783 jiwa (3,89%). Jika dilihat dari kepadatan penduduk, wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebesar 207 jiwa per km², disusul oleh Kecamatan Bati-Bati sebesar 193 jiwa per km², dan Kecamatan Tambang Ulang sebesar 113 jiwa per km². Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah diurutkan dari yang paling kecil adalah Kecamatan Batu Ampar yaitu sebesar 51 jiwa per km², Kecamatan Jorong sebesar 56 jiwa per km², dan Kecamatan Panyipatan sebesar 76 jiwa per km².

Tabel 2.18 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2020-2021

No.	Kecamatan	2020	2021	Laju Pertumbuhan 2020-2021	Laju Pertumbuhan 2020-2021
1.	Panyipatan	25.135	25.544	1,68	1,22
2.	Takisung	32.378	32.818	1,42	1,02
3.	Kurau	13.580	13.783	1,56	1,12
4.	Bumi Makmur	13.765	13.960	1,48	1,06
5.	Bati-Bati	44.737	45.350	1,43	1,03
6.	Tambang Ulang	17.797	18.092	1,72	1,24

No.	Kecamatan	2020	2021	Laju Pertumbuhan 2020-2021	Laju Pertumbuhan 2020-2021
7.	Pelaihari	77.246	78.634	1,85	1,34
8.	Bajuin	19.150	19.480	1,78	1,29
9.	Batu Ampar	27.557	28.000	1,67	1,20
10.	Jorong	34.553	35.124	1,71	1,24
11.	Kintap	43.068	43.555	1,19	0,85
Kabupaten Tanah Laut		348 966	354.340	1,59	1,15

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Tabel 2.19 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Presentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
1.	Panyipatan	25.544	7,21	76
2.	Takisung	32.818	9,26	96
3.	Kurau	13.783	3,89	109
4.	Bumi Makmur	13.960	3,94	99
5.	Bati-Bati	45.350	12,80	193
6.	Tambang Ulang	18.092	5,11	113
7.	Pelaihari	78.634	22,19	207
8.	Bajuin	19.480	5,50	99
9.	Batu Ampar	28.000	7,90	51
10.	Jorong	35.124	9,91	56
11.	Kintap	43.555	12,29	81
Kabupaten Tanah Laut		354.340	100	98

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Karakteristik penduduk yang penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk tersebut berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 adalah sebanyak 179.012 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 169.954 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 adalah sebesar 105,30 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kabupaten Tanah Laut terdapat 105 penduduk laki-laki.

Tabel 2.20 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kab. Tanah Laut, 2021

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
1.	Panyipatan	103,3
2.	Takisung	104,5
3.	Kurau	103,0

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
4.	Bumi Makmur	104,1
5.	Bati-Bati	104,7
6.	Tambang Ulang	105,7
7.	Pelaihari	103,5
8.	Bajuin	106,2
9.	Batu Ampar	107,7
10.	Jorong	107,2
11.	Kintap	108,1
Kabupaten Tanah Laut		105,3

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Selanjutnya, berdasarkan kelompok umur pada tahun 2021, dilihat bahwa penduduk usia muda lebih dominan yaitu usia dari 10-14 Tahun. Pada dasar dan badan piramida yang cukup lebar menunjukkan kelompok penduduk ini memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua. Terkait dengan struktur penduduk, piramida penduduk Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori *expansive* dimana sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok umur muda. Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan penduduk Kabupaten Tanah Laut memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang menciut menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut, 2022

Gambar 2.4 Piramida Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2021

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Kondisi ini juga sering disebut sebagai *population boom*. Kondisi tersebut pada masa yang akan datang akan memiliki dua implikasi, jika dapat penduduk dikelola dengan baik sehingga menjadi SDM produktif akan sangat potensial untuk menjadi penggerak ekonomi wilayah dan sebaliknya jika tidak dapat terkelola dengan baik maka akan menjadi penyebab berbagai problem ekonomi dan sosial wilayah.

Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yakni menggunakan perhitungan tahun dasar 2010. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke

tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Selama periode 2016-2021, tren PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp 12.329,41 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 13.241,24 miliar pada tahun 2018 kemudian meningkat menjadi Rp 13.902,30 miliar pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 13.786,69 miliar, namun pada tahun 2021 naik kembali menjadi 14.755,19 miliar. Tren serupa juga ditunjukkan pada PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat setiap tahunnya dari Rp 9.550,76 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 9.995,21 miliar pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp 10.366,65 miliar, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 10.164,06 miliar, namun kembali meningkat menjadi Rp. 10.516,40 miliar pada tahun 2021. Dengan adanya peningkatan PDRB atas dasar konstan, maka perekonomian Kabupaten Tanah Laut terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, yaitu 3,47% pada tahun 2021, artinya Kabupaten Tanah Laut mampu merangkak naik dari tahun 2020 yang mana pertumbuhan ekonominya sebesar -1,95 %.

Tabel 2.21 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2021

Tahun	ADHB (Miliar Rupiah)	ADHK (Miliar Rupiah)
2017	12.329,41	9.550,76
2018	13.241,24	9.995,21
2019	13.902,30	10.366,65
2020*	13.786,69	10.164,06
2021**	14.755,19	10.516,40

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

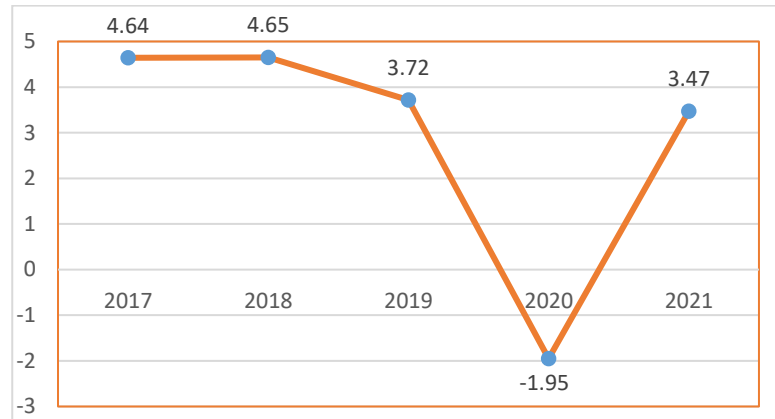
Tabel 2.22 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2017-2021

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)					Rerata
	Atas Dasar Harga Konstan 2010					
	2017	2018	2019	2020(*)	2021(**)	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,5	3,64	3,42	-0,30	1,81	2,41
Pertambangan dan Penggalian	1,81	2,36	0,73	-4,96	4,45	0,88
Industri Pengolahan	7,56	5,79	2,51	-4,27	5,01	3,32
Pengadaan Listrik dan Gas	4,56	7,5	4,07	5,02	4,78	5,19
Pengadaan Air	7,58	6,66	3,45	3,45	3,91	5,01
Konstruksi	7,64	6,95	6,26	-0,98	3,84	4,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,95	7,21	6,57	-2,89	2,48	4,26
Transportasi dan Pergudangan	6,86	6,92	5,93	-1,87	1,59	3,89
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,63	7,73	6,18	-1,23	2,29	4,32
Informasi dan Komunikasi	6,97	7,19	6,33	6,34	6,57	6,68
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,08	4,39	4,3	2,29	-1,44	3,12
Real Estate	4,91	4,93	4,72	1,90	5,10	4,31
Jasa Perusahaan	7,02	7,25	7,16	-1,74	3,49	4,64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,53	3,84	8,33	1,14	4,65	4,10
Jasa Pendidikan	6,78	7,22	6,02	2,64	0,83	4,70
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,23	5,18	4,78	7,52	8,20	6,18
Jasa lainnya	6,48	7,02	6,78	-0,86	0,84	4,05
PDRB	4,64	4,65	3,72	-1,95	3,47	3,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2021

Dilihat dari tabel di atas, secara agregat perekonomian Tanah Laut mengalami pertumbuhan sebesar 3,47% di tahun 2021. Sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi sektor terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor tersebut pada PDRB Tanah Laut tahun 2021 yaitu mencapai 22,64%. Pertumbuhan pada sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 4,45 persen. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada sektor tersebut setelah di tahun sebelumnya mengalami kontraksi.

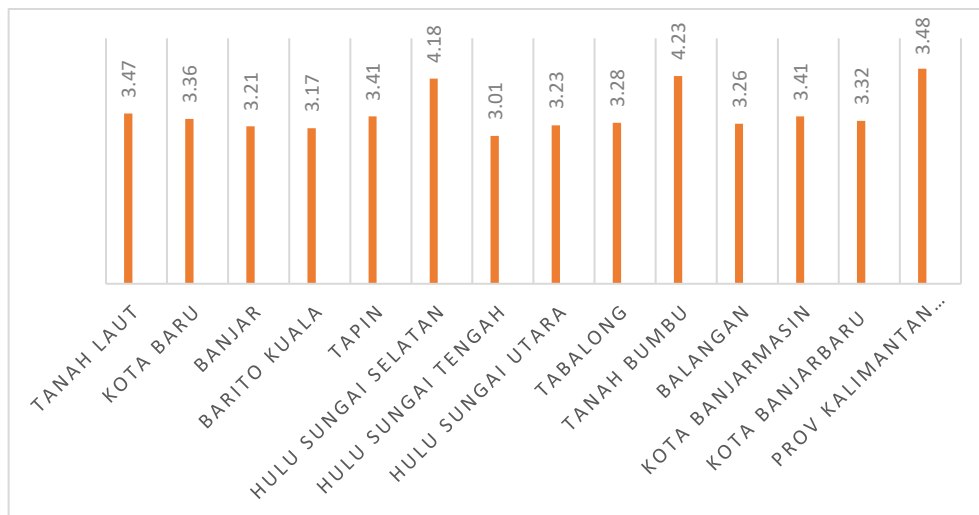
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai lapangan usaha terbesar kedua mengalami kenaikan pertumbuhan di tahun 2021 sebesar 1,81% yang mana pada tahun sebelumnya sebesar -1,81%.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Gambar 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Menurut Sektor, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi, namun dinyatakan dalam istilah nominal, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diamati dalam rentang waktu yang lebih besar, seperti tahun ke tahun (YoY), atau dekade ke dekade. Gambar 2.5 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut berkontraksi cukup dalam di angka -1,95 yang merupakan salah satu dampak dari pandemi covid-19. Namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut mampu bangkit ke angka 3,47.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Gambar 2.6 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Apabila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021, maka pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Tanah Laut berada di peringkat 3 dari 13 kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawahnya dimana pertumbuhan ekonomi provinsi pada tahun 2020 mencapai 3,48%. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Selatan ditempati Kab Tanah Bumbu 4,23% dan Hulu Sungai Selatan 4,18% (Gambar 2.6).

2.1.2.1.2 Struktur Ekonomi

Beragamnya potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di suatu wilayah memberikan warna pada struktur ekonomi pada wilayah tersebut. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusinya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

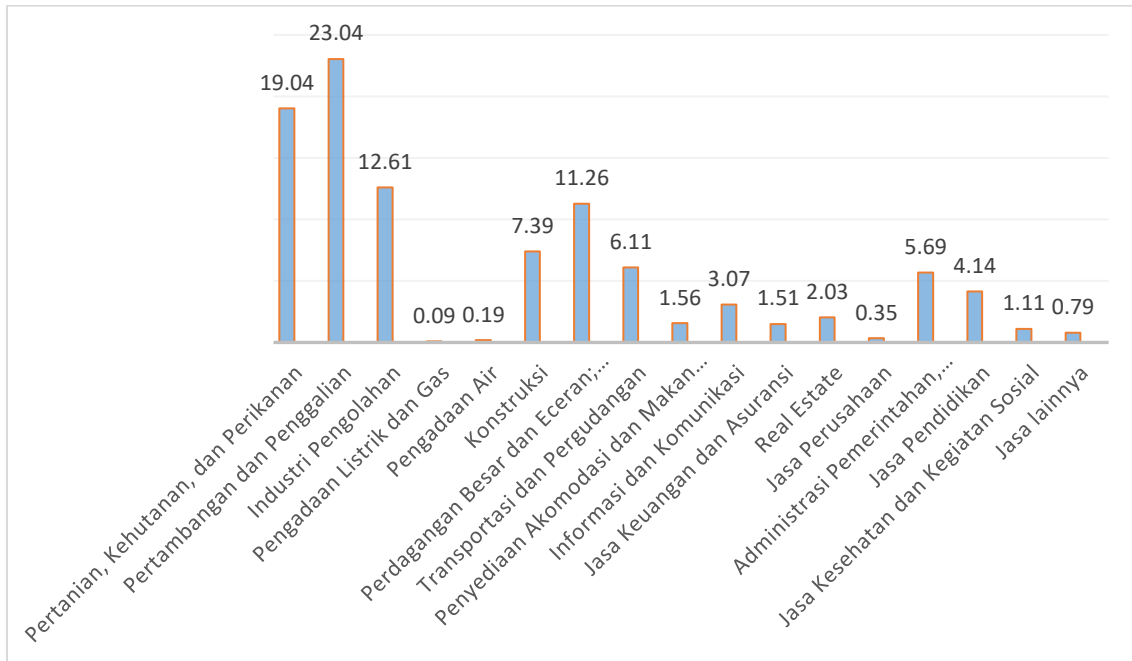
Tabel 2.23 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kab.Tanah Laut (%), 2017-2021

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Berlaku					Rerata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.23	18.92	19.01	19.28	18,74	19,04
Pertambangan dan Penggalian	24.47	23.85	22.59	21.67	22,64	23,04
Industri Pengolahan	12.89	12.79	12.52	12.29	12,56	12,61
Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.09	0.09	0.10	0,10	0,09
Pengadaan Air	0.18	0.18	0.19	0.20	0,19	0,19
Konstruksi	7.13	7.26	7.50	7.52	7,56	7,39
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.74	11.2	11.53	11.49	11,36	11,26
Transportasi dan Pergudangan	5.94	6.08	6.27	6.25	6,01	6,11

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Berlaku					Rerata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.49	1.54	1.59	1.61	1,58	1,56
Informasi dan Komunikasi	2.91	2.96	3.03	3.23	3,23	3,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.46	1.48	1.52	1.56	1,51	1,51
Real Estate	1.98	1.97	2.02	2.09	2,10	2,03
Jasa Perusahaan	0.33	0.34	0.36	0.37	0,36	0,35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.42	5.44	5.73	5.95	5,89	5,69
Jasa Pendidikan	3,96	4,06	4,16	4,37	4,17	4,14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,03	1,04	1,06	1,19	1,22	1,11
Jasa lainnya	0,76	0,78	0,81	0,82	0,78	0,79
PDRB	100	100	100	100	100	

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Dilihat dari tabel di atas, selama periode 2017-2021, perekonomian Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata kontribusi yang mencapai 23,04% per tahun. Pada sektor ini kontribusi terbesar diberikan oleh produksi batu bara, kemudian produksi bijih besi, mangan, bijih nikel, dan batu kromit. Walaupun kontribusi sektor ini mengalami penurunan selama periode 2017-2020, sektor ini mampu bangkit di tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 22,64% dan menjadikan sektor ini tetap menjadi sektor andalan di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian sektor andalan kedua di Kabupaten Tanah Laut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada kurun waktu lima tahun terakhir, distribusi sektor ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 sebesar 18,74%, menurun dari tahun 2020 yang mana distribusinya sebesar 19,28%. Industri lainnya yang perlu diperhitungkan karena distribusinya terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan. Distribusi sektor ini juga mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, namun pada tahun 2021, kontribusi mencapai 12,56%, meningkat dari 2020 distribusinya sebesar 12,29% dengan rata-rata kontribusi mencapai 12,61%. Kekayaan sumber daya alam pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang mendorong tumbuhnya sektor industri, baik formal maupun non formal.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Gambar 2.7 Rerata Kontribusi PDRB Menurut Sektor di Kabupaten Tanah Laut (%), 2021

2.1.2.1.3 Inflasi

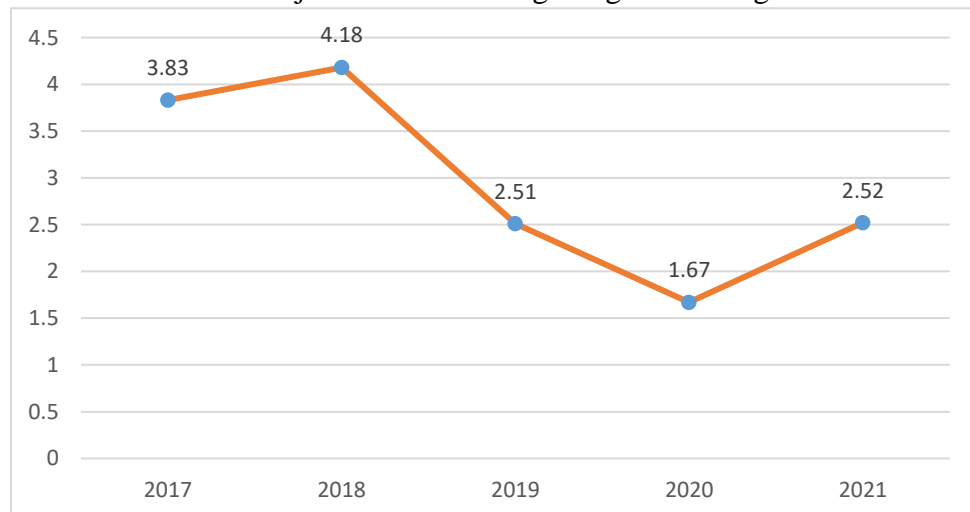
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Menurut Bank Indonesia (2020), inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian

halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2022

Gambar 2.8 Laju Inflasi Kota Banjarmasin (persen), 2017-2021

Menurut tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori yaitu inflasi ringan (< 10 persen per tahun), inflasi sedang (10-30 persen per tahun), inflasi berat (30-100 persen per tahun), dan inflasi sangat berat/hiperinflasi (> 100 persen per tahun). Pengukuran inflasi hanya dilakukan di 66 kota di Indonesia dan salah satunya di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin dijadikan sebagai salah satu rujukan angka inflasi di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga dapat diasumsikan bahwa inflasi di Kabupaten Tanah Laut akan sama dengan inflasi di Kota Banjarmasin. Pada periode 2018-2020 tingkat inflasi di Kota Banjarmasin mengalami penurunan dari 4,18% menjadi 1,67%, kemudian naik pada tahun 2021 menjadi 2,52%. Secara umum inflasi Kota Banjarmasin masih tergolong inflasi ringan.



2.1.2.1.4 Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *per capita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh

dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.

Tabel 2.24 PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020(*)	2021(**)
PDRB ADHB (Rp Ribu)	36.878,19	39.037,24	40.773,03	39.659,54	41.641,34
PDRB ADHK (Rp Ribu)	28.567,05	29.467,45	30.403,58	29.238,50	29.678,84
Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	3,06	3,15	3,18	-3,83	1,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

(*) Angka sementara

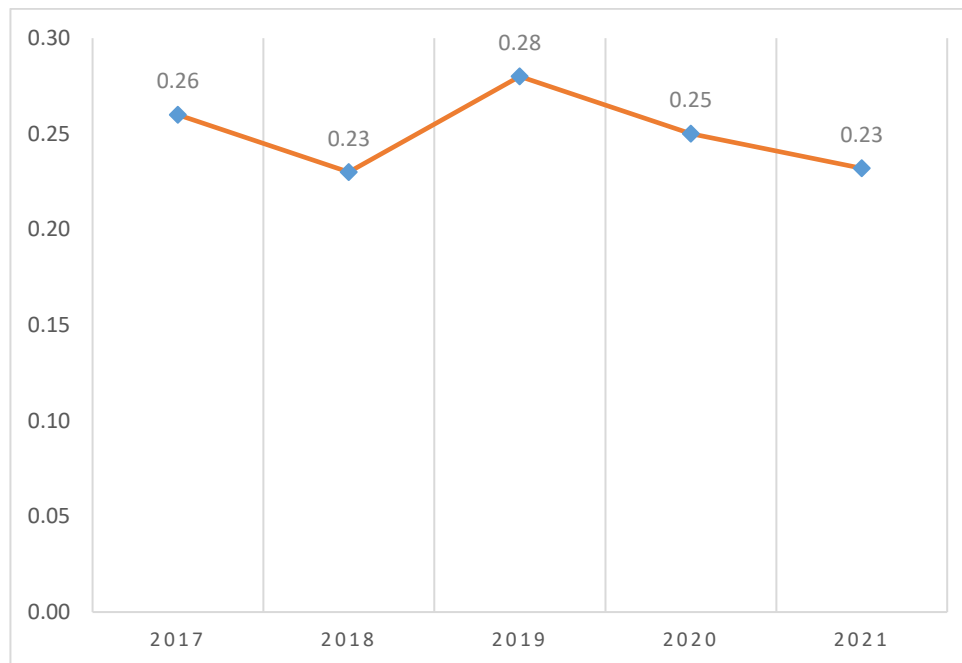
(**) Angka sangat sementara

PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut cenderung meningkat setiap tahunnya, baik untuk PDRB ADHB dan PDRB ADHK. Pada tahun 2017 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 36,88 juta dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp 41,64 juta atau tumbuh dengan rata-rata 3,23% setiap tahunnya. Sementara itu, nilai PDRB perkapita ADHK tahun 2017 terus meningkat dari Rp 28,57 juta dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp 29,68 juta. Dari sisi pertumbuhan, nilai PDRB ADHK terus tumbuh setiap tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 3,18%. Pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar -3,83%, namun pada 2021 kembali tumbuh positif sebesar 1,51%. Peningkatan dari PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut pada setiap tahunnya merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Laut. Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan pertumbuhan PDRB ADHK lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduknya sehingga cukup dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Tanah Laut lebih produktif.

2.1.2.1.5 Indeks Gini

Pengukuran tingkat pemerataan dapat dilakukan dengan pendekatan koefisien gini. Koefisien gini atau rasio gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan kumulatif penduduk. Nilai rasio gini antara 0 hingga 1. Apabila nilai rasio Gini mendekati 0, maka

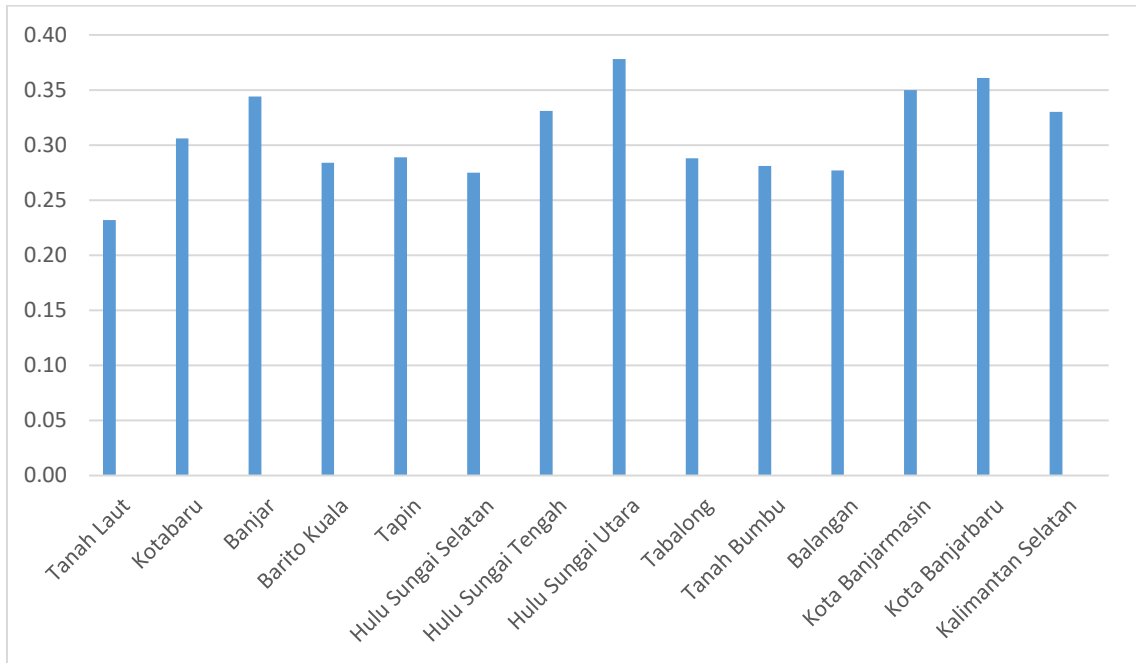
kesenjangan distribusipendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Rasio Gini dibagi dalam tiga kategori: (a) *Gini Ratio*>0,5 yang menggambarkan distribusipendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, (b) *Gini Ratio* 0,3–0,5 yang menggambarkan distribusipendapatan dengan tingkat ketidak merataan sedang, dan (c) *Gini Ratio*<0,3 yang menggambarkan distribusipendapatan dengan tingkat ketidak merataan rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

Gambar 2.9 Angka Rasio Gini Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.9, terlihat bahwa sepanjang periode 2017-2021, nilai gini rasio Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, nilai gini rasio adalah sebesar 0,26, kemudian nilai rasio gini menurun kembali menjadi 0,23 pada tahun 2018, selanjutnya tahun 2019 nilainya naik menjadi 0,28. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,25 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 0,23. Selama periode 2017-2021, dapat disimpulkan bahwa nilai rasio gini di Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori rendah yang menggambarkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Tanah Laut tingkat ketidak merataannya rendah. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang distribusi pendapatannya dengan ketidak merataan yang rendah pada tahun 2021. Wilayah dengan nilai rasio gini tertinggi adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 0,38, kemudian Banjarbaru yaitu sebesar 0,36, disusul Kota Banjarmasin sebesar 0,35.

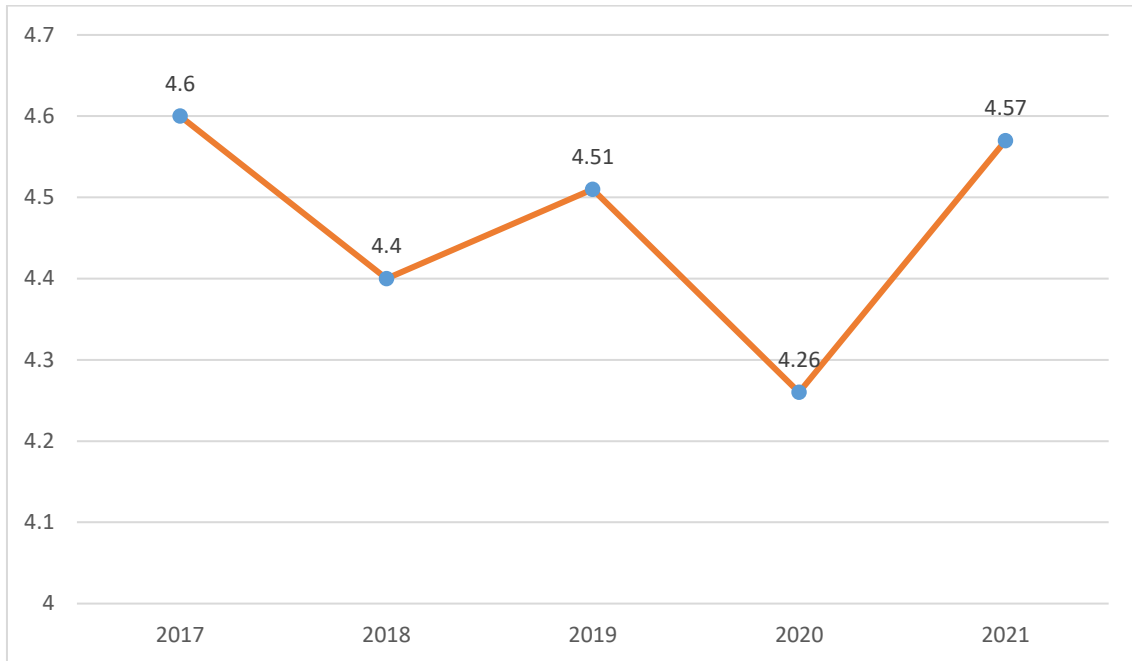


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

Gambar 2.10 Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2021

2.1.2.1.6 Persentase Penduduk Miskin

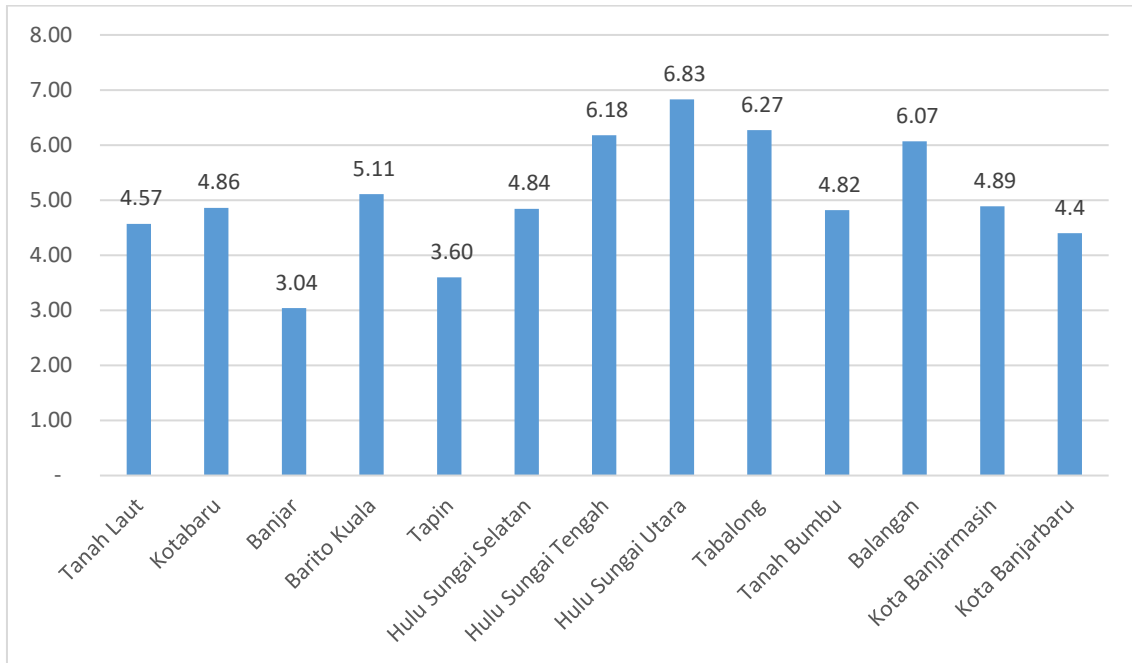
Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut, namun telah menjadi permasalahan dunia. Penduduk dikatakan termasuk dalam kategori miskin jika rata-rata pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Pada periode 2017-2021, perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut cukup fluktuatif.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

Gambar 2.11 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021

Pada tahun 2017 ke tahun 2018, terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut dari 4,60 persen di tahun 2017 turun menjadi 4,40 persen di tahun 2018. Umumnya, dinamika jumlah penduduk miskin sejalan dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah yang dicerminkan dari persentase penduduk miskin. Akan tetapi, pada tahun 2019 terjadi suatu kondisi yang berbeda. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut mengalami sedikit kenaikan dari 4,40 pada tahun 2018 menjadi 4,51 pada tahun 2019. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Akan tetapi, pada tahun 2020 kondisi tersebut dapat teratasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan yang cukup signifikan pada persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020. Penanganan kemiskinan pada tahun 2020 memang menjadi perhatian besar bagi pemerintah mengingat kondisi pandemi yang tengah berlangsung. Namun pada tahun 2021, persentase kembali meningkat menjadi 4,57 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

Gambar 2.12 Persentase Angka Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Prov. Kalimantan Selatan, 2021

Pada Gambar 2.12, menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Tanah Laut berada pada urutan ke 9 dari 13 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan. Persentase angka kemiskinan terendah dimiliki oleh Kabupaten Banjar, dan persentase tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang diukur dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap-P1*) dan Indeks Keparahannya (*Poverty Severity Index-P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2017-2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 terjadi penurunan indeks

kedalaman kemiskinan dari 0,71 menjadi 0,55, kemudian naik menjadi 0,58 pada tahun 2019 dan 2020. Dan Kembali naik pada tahun 2021 menjadi 0,68. Hal ini menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh pada garis kemiskinan. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017-2021 terjadi penurunan indeks dari 0,15 menjadi 0,14, yang menandakan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan untuk menurun dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,71	0,55	0,58	0,58	0,68
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,15	0,14	0,11	0,12	0,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

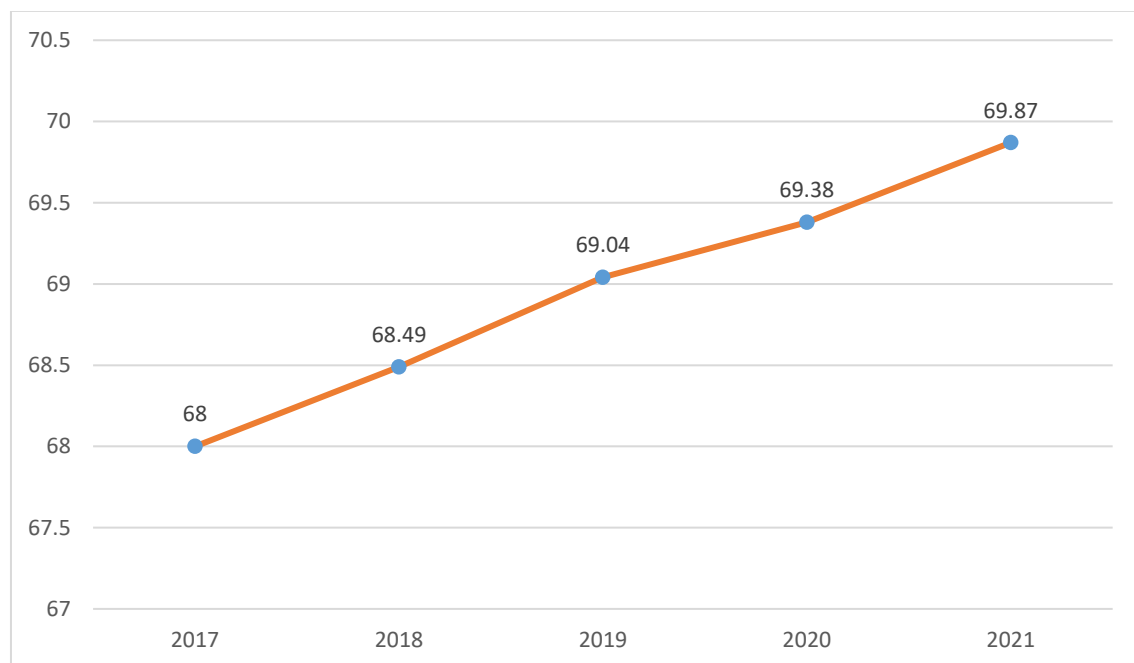
Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam perencanaan pembangunan, pembangunan manusia senantiasa berada di baris terdepan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk memanusiakan masyarakat dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Di sini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Secara praktikal, pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perhitungan IPM terdiri atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek perekonomian yang digambarkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Sebagai Indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. IPM suatu daerah/wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori menurut UNDP, yaitu (1) $IPM \geq 80$ termasuk kategori sangat tinggi; (2) $70 \leq IPM < 80$ termasuk kategori tinggi; (3) $60 \leq IPM < 70$ termasuk kategori sedang; dan (4) $IPM < 60$ termasuk kategori rendah.

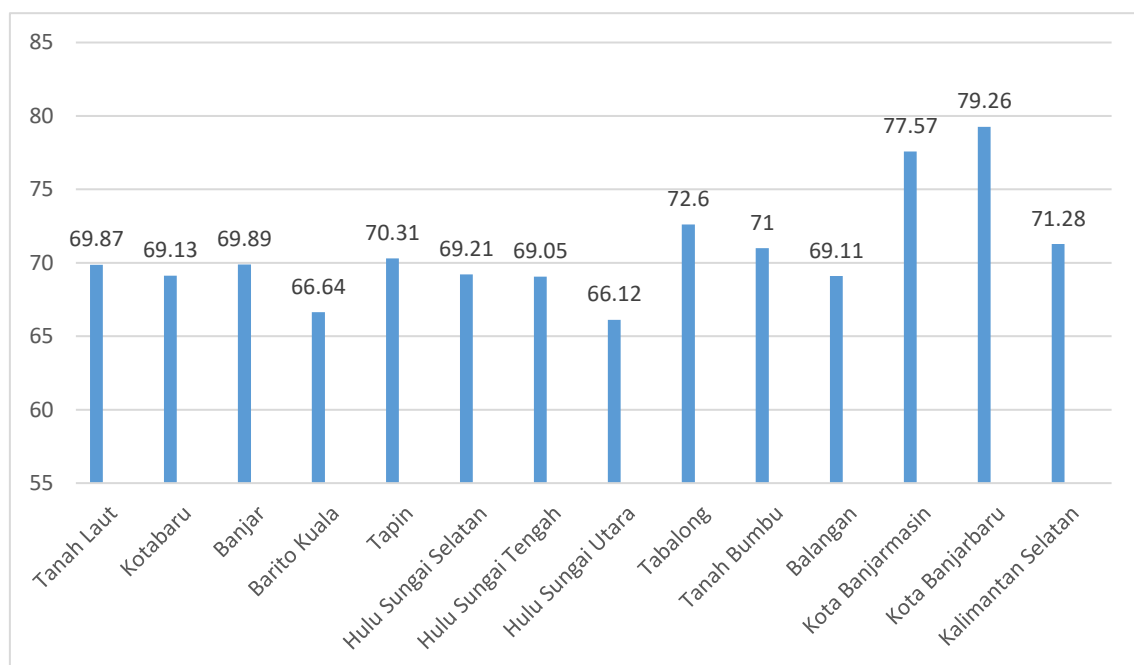


Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Gambar 2.13 Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021

Selama periode 2017-2021, perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang positif yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun

2016, IPM Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 68,00 dan kinerja IPM pada tahun 2018 adalah sebesar 68,49, tahun 2019 sebesar 69,04, tahun 2020 sebesar 69,38 dan tahun 2021 meningkat kembali menjadi 69,87. Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, IPM Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 berada pada posisi 7 dari 13 kabupaten/kota yang ada. Dengan posisi yang berada di kategori sedang, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus bekerja keras untuk meningkatkan nilai IPM tersebut melalui berbagai kebijakan pembangunan baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun sektor ekonomi lainnya agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang maksimal dalam pembangunan tersebut. Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, posisi pertama ditempati oleh Kota Banjar Baru dengan nilai sebesar 79,26, diikuti Kota Banjarmasin sebesar 77,57, dan Kabupaten Tabalong sebesar 72,60. Hanya ketiga wilayah tersebut di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki IPM dalam kategori tinggi. Kabupaten Tanah Laut sendiri bersama dengan wilayah lainnya termasuk dalam kategori IPM sedang.



Gambar 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota, 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

2.1.2.2.2 Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pendidikan adalah berkurangnya penduduk yang buta huruf. Angka melek huruf (*literacy rate*) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf

latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Selama periode 2018-2021, perkembangan penduduk yang melek huruf menunjukkan hasil yang menggembarakan dengan adanya persentase peningkatan penduduk yang melek huruf dari 98,72% pada tahun 2019 menjadi 98,74% pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat sekitar 1,26% penduduk Kabupaten Tanah Laut yang berumur 15 tahun ke atas yang masih belum/tidak dapat membaca dan menulis. Penduduk yang buta huruf diduga didominasi oleh kelompok tersulit dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun ke atas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

Pada tahun 2021, angka melek huruf di Kabupaten Tanah Laut untuk penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sebesar 98,29%, menurun dari tahun 2020. Angka melek huruf menurut agregasi jenis kelamin pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih melek huruf dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan, yaitu 99,09% untuk laki-laki dan 97,45% untuk perempuan. Lebih tingginya persentase penduduk berjenis kelamin laki-laki yang melek huruf dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan menunjukkan bahwa masih terdapat relatif sedikit ketimpangan antara penduduk berjenis kelamin perempuan dan laki-laki dalam kemampuan literasi aksara atau membaca dan menulis yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Namun demikian pemerintah tetap akan terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah sesuai dengan target SDGs yaitu mencapai pemerataan kualitas pendidikan.

2.1.2.2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). RLS pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk

umur 15 tahun ke atas. Pada penghitungan metode baru menurut BPS, RLS adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selama periode 2017-2021, RLS Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahun walaupun tidak signifikan. RLS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar 7,37 tahun, kemudian meningkat menjadi 7,38 tahun pada tahun 2018, dan meningkat kembali menjadi 7,64 pada tahun 2019. Pada tahun 2017, RLS Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 7,37 tahun, tahun 2018 sebesar 7,38, tahun 2019 sebesar 7,64 tahun dan tahun 2020 meningkat menjadi 7,88 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Tanah Laut baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Angka RLS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 sebesar 7,88 tahun dan terus meningkat menjadi 7,89 tahun pada tahun 2021, lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 8,34 tahun. Angka RLS Kabupaten Tanah Laut lebih rendah jika dibandingkan angka RLS Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dalam rangka peningkatan rata-rata lama sekolah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendidikan formal.

Tabel 2.26 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
RLS (tahun)	7,37	7,38	7,64	7,88	7,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

2.1.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah

Kemampuan bertahan seorang anak dalam dunia pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Semakin lama seorang anak mampu bertahan untuk terus bersekolah, maka sistem pendidikan yang terbangun di daerah tersebut akan semakin baik. Angka harapan lama sekolah diharapkan mampu memotret fenomena tersebut pada tiap wilayah. Sesuai dengan publikasi terbaru BPS, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen

dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.27 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
HLS (tahun)	11,82	11,95	11,96	12,01	12,31

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Angka HLS Kabupaten Tanah Laut selama periode 2017-2021 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2017 Angka HLS sebesar 11,82 tahun. Angka HLS tersebut mengalami peningkatan kembali sehingga menjadi 12,31 tahun pada tahun 2021. HLS sebesar 12,31 pada tahun 2010 berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah 12,31 tahun atau telah mencapai pendidikan di kelas 3 SMA. Angka HLS Kabupaten Tanah Laut lebih rendah jika dibandingkan HLS Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 yang mencapai 12,81 tahun. Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, angka HLS tertinggi ditempati Kota Banjarbaru yaitu sebesar 14,82 tahun. HLS di Kabupaten Tanah Laut masih berada jauh di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.

2.1.2.2.5 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Tanah Laut juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2017, AHH di Kabupaten Tanah Laut sebesar 68,89, kemudian pada tahun 2018 menjadi sebesar 69,08 pada tahun 2019 menjadi 69,31 tahun dan Kembali naik menjadi 69,59 tahun pada tahun 2021. AHH sebesar 69,31 tahun berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tanah Laut dapat menjalani hidup selama 69 tahun lebih tinggi dari AHH Provinsi sebesar 68,83 tahun. Dengan kisaran idealnya usia 25-85 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa umur panjang dan sehat penduduk Kabupaten Tanah Laut masih belum mencapai umur maksimal 85 tahun.

Perkembangan AHH setiap tahun di Kabupaten Tanah Laut tercatat tidak melebihi satu dalam satu periode jangka waktu satu tahun. Hal tersebut berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (*infant mortality rate*) di Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori *hardrock* yang artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Implikasinya adalah bahwa AHH yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk kemajuan. Kondisi tersebut juga terjadi untuk tingkat nasional dimana penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat.

Tabel 2.28 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup (tahun)	68,89	69,08	69,31	69,45	69,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

2.1.2.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidakbekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidakmungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat

disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Jika melihat data TPT pada tahun 2018 sebesar 3,28% kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 3,41%, dan pada tahun 2020 terjadi kenaikan persentase pengangguran hingga TPT menjadi sebesar 3,57%, namun pada tahun 2021 turun menjadi 3,52%.

Tabel 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut, 2018-2021

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,28	3,41	3,57	3,52

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Tanah Laut memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang cukup besar dengan potensi budaya dan nilai-nilai tradisi yang telah mengakar. Kebijakan pembangunan seni dan kebudayaan diarahkan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat daerah, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau tidak sesuai dengan budaya lokal. Namun keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala pengembangan seni budaya. Peran pemerintah di bidang kebudayaan adalah sebagai pelaksana pembangunan yang nantinya diharapkan menciptakan iklim yang nyaman agar pelaku usaha di bidang kebudayaan dapat berkembang secara efektif dan efisien. Terkait dengan sektor pariwisata secara khusus, sektor tersebut diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena memiliki *multiplier effect* yang tinggi. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk menarik minat pengunjung. Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan

masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Di bidang kepemudaan dan olah raga, pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas dan pembinaan terhadap pemuda dan cabang olah raga, mulai dari pembinaan pelatih dan fasilitasi kegiatan olah raga hingga pengembangan kapasitas SDM pemuda. Keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala bagi pengembangan seni budaya dan olah raga, misalnya belum ada gedung gedung kesenian dan olah raga yang representatif. Jadi, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, fasilitas serta sarana prasarana di bidang kepemudaan dan olah raga menjadi sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan di masa mendatang.

Pada tahun 2021, atlet berprestasi Kabupaten Tanah Laut sebanyak 136 orang. Hal ini merupakan hasil positif dari keseriusan dalam membentuk atlet-atlet di Kabupaten Tanah Laut agar berprestasi di cabang-cabang olahraga yang ada.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator pembangunan suatu wilayah. Dalam buku III RPJMN 2015-2019, dijelaskan bahwa dalam upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memperluas pembangunan maka dapat dilakukan transformasi dan akselerasi pembangunan. Untuk itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang lebih baik dan merata. Pembangunan sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa/daerah banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Makin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Indikator inilah yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Sebagai standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS SD sebesar 100% dan APS SMP sebesar 100% atau dengan kata lain semua anak usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah. Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan.

Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021

Kelompok Usia	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI [7-12]	99,40	99,83	99,76	99,41	99,54
SMP/MTs [13-15]	91,59	91,13	92,09	91,51	88,78
SMA/MA/SMK [16-18]	62,84	68,47	67,46	67,02	66,29

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi dari anak sekolah pada usia di jenjang pendidikan tertentu yang termasuk dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Selama periode 2017-2021, APS untuk kelompok umur 7-12 tahun (usia SD) dapat dikatakan cenderung fluktuatif walaupun secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, APS kelompok umur 7-12 tahun adalah sebesar 99,40%, kemudian terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 menjadi 99,83%. Untuk tahun 2019, APS kelompok umur 7-12 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 99,76%, begitu juga pada tahun 2020 menurun menjadi 99,41%. Namun meningkat menjadi 99,54% pada tahun 2021.

Hal yang sama juga ditemui pada APS kelompok umur 13-15 tahun (usia SMP) yang nilainya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, APS kelompok umur 13-15 tahun adalah sebesar 91,59%, kemudian menurun menjadi sebesar 91,13% pada tahun 2018, pada tahun 2019, APS kelompok umur 13-15 tahun mengalami kenaikan hingga menjadi

sebesar 92,09%. Kemudian menurun menjadi 91,51% pada tahun 2020, terus menurun pada tahun 2021 menjadi 88,78%. Capaian APS Kabupaten Tanah Laut masih belum memenuhi target wajar 9 tahun, sehingga ke depannya program pendidikan ini harus lebih ditingkatkan lagi. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Tanah Laut telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misalnya, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan APK menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Tanah Laut telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

APK untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2020 adalah sebesar 106,86% dan menurun di 2021 menjadi sebesar 106,04%. Hal tersebut berarti terdapat penduduk di luar usia sekolah SD (7-12 tahun) yang masih bersekolah SD dimana terlihat dari angka APK SD yang nilainya lebih besar dari 100%, namun pada 2021 persentasenya menurun. Artinya sudah ada penurunan penduduk di luar usia sekolah SD yang masih bersekolah di SD. Untuk jenjang pendidikan SMP, APK pada tahun 2021 adalah sebesar 85,73%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMP berapapun usianya di antara penduduk berumur 13-15 tahun hanya sebesar 85,73%. APK untuk jenjang pendidikan SMA adalah sebesar 87,56% yang artinya persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMA berapapun usianya di antara penduduk berumur 16-18 tahun sebesar 87,56%.

Tabel 2.31 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, 2021-2021

Jenjang Pendidikan	APK		APM	
	2020	2021	2020	2021
SD/MI	106,86	106,04	99,41	99,54
SMP/MTs	84,57	85,73	73,76	74,02
SMA/SMK/MA	85,18	87,56	55,44	55,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan caramembagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedangbersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Misalnya APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APM jenjang pendidikan SD di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 adalah sebesar 99,54%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang berusia 7-12 tahun, terdapat sekitar 99 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SD. APM jenjang pendidikan SMP pada tahun 2020 adalah sebesar 74,02% dimana hal tersebut berarti bahwa dari 100 orang yangberusia 13-15 tahun, terdapat sekitar 74 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMA pada tahun 2021 adalah sebesar 55,71%, yang berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia 16-18 tahun, terdapat sekitar 55 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA.

Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi manajemen pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan.

Pada jenjang pendidikan TK, jumlah unit TK pada tahun 2021 adalah sebanyak 215 unit dengan jumlah TK terbanyak berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 50 unit. Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan TK adalah sebanyak 9286 orang dengan guru yang mendampingi sebanyak 991 orang. Dari 215 unit TK tersebut, jumlah ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 715 ruang kelas. Dilihat dari rasio antara murid dan guru pada tahun 2021, rasionya adalah sebesar 1 : 9, yang berarti bahwa 1 orang guru TK di Kabupaten Tanah Laut mengampu sebanyak 9 murid. Sementara itu, rasio murid dan ruang kelas adalah sebesar 1 : 13, yang berarti bahwa 1 ruang kelas TK di Kabupaten Tanah Laut berisi 13 murid. Secara rinci, jumlah unit, murid, dan guru pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.32 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang TK di Kabupaten Tanah Laut, 2021/2022

No.	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Ruang Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Ruang Kelas
1.	Panyipatan	17	74	788	56	11	14
2.	Takisung	18	88	805	73	9	11
3.	Kurau	10	41	385	24	9	16
4.	Bumi Makmur	12	34	418	30	12	14
5.	Bati-bati	24	112	1008	78	9	13
6.	Tambang Ulang	12	40	467	24	12	19
7.	Pelaihari	50	286	2062	182	7	11
8.	Bajuin	15	58	502	45	9	11
9.	Batu Ampar	19	74	779	50	11	16
10.	Jorong	17	83	876	60	11	15
11.	Kintap	24	101	1196	93	12	13
Jumlah		215	991	9286	715	9	13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Pada jenjang pendidikan dasar, jumlah SD/MI di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 adalah sebanyak 244 unit. Kecamatan yang memiliki jumlah SD/MI terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 45 unit, diikuti Kecamatan Kintap dan Bati-bati masing-masing sebanyak 33 unit dan 27 unit, dan Kecamatan Takisung sebanyak 25 unit. Dari 263 unit SD/MI, jumlah ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak

1.936 unit ruang kelas. Jumlah murid yang menempuh pendidikan SD/MI pada tahun 2020 adalah sebanyak 39.857 orang, dengan jumlah guru yang mengampu sebanyak 2.899 orang. Dilihat dari rasio antara murid dan guru, rasionya pada tahun 2021 adalah sebesar 1 : 14, yang berarti bahwa 1 guru SD di Kabupaten Tanah Laut mengampu sebanyak 14 murid, sedangkan rasio murid dan ruang kelas adalah sebesar 1 : 21, yang berarti bahwa 1 ruang kelas SD di Kabupaten Tanah Laut berisi murid sebanyak 20 orang. Melihat data pada jenjang pendidikan SD/MI, terlihat bahwa fasilitas pendidikan SD/MI di Kabupaten Tanah Laut cukup memadai dimana persebarannya berada di seluruh wilayah kecamatan dan ditunjang dengan ketersediaan guru dan ruang kelas yang cukup memadai.

Tabel 2.33 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang SD/MI di Kab. Tanah Laut, 2021/2022

No.	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Ruang Kelas	Rasio Murid -Guru	Rasio Murid-Ruang Kelas
1.	Panyipatan	18	219	2384	136	14	18
2.	Takisung	24	257	3309	184	15	18
3.	Kurau	14	145	1336	131	11	10
4.	Bumi Makmur	13	84	985	99	8	10
5.	Bati-bati	24	371	3987	221	14	18
6.	Tambang Ulang	13	123	1669	91	15	18
7.	Pelaihari	45	598	6672	410	14	16
8.	Bajuin	19	185	1902	143	11	13
9.	Batu Ampar	21	241	2529	178	13	14
10.	Jorong	24	229	4043	220	19	18
11.	Kintap	29	316	4953	334	20	15
Jumlah		244	2337	33769	2147	14	16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, jumlah unit sekolah pada tahun 2021 adalah sebanyak 80 unit. Dari 80 unit SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut tersebut, jumlah ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 501 unit ruang kelas. Wilayah dengan jumlah unit SMP/MTs terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 16 unit, diikuti Kecamatan Jorong sebanyak 11 unit, dan Kecamatan Bati-Bati sebanyak 10 unit. Siswa yang sedang menempuh pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 adalah sebanyak 13.632 orang, dengan guru yang mengampu sebanyak 1.299 orang.

Rasio murid dan guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs adalah sebesar 1 : 10, yang berarti bahwa 1 guru SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut mengampu sebanyak 10 orang murid, sedangkan rasio antara murid dan ruang kelas adalah sebesar 1 : 27, yang berarti bahwa 1 unit ruang kelas menampung sebanyak 27 murid.

Tabel 2.34 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang SMP/MTs di Kab. Tanah Laut, 2021/2022

No.	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Ruang Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Ruang Kelas
1.	Panyipatan	8	152	1151	25	8	46
2.	Takisung	6	84	872	43	10	20
3.	Kurau	3	65	510	18	8	28
4.	Bumi Makmur	3	42	387	13	9	30
5.	Bati-bati	10	178	2162	70	12	31
6.	Tambang Ulang	4	51	424	26	8	16
7.	Pelaihari	16	311	3441	108	11	32
8.	Bajuin	4	55	482	45	9	11
9.	Batu Ampar	7	114	1253	46	11	27
10.	Jorong	11	127	1188	49	9	24
11.	Kintap	8	120	1762	58	15	30
Jumlah		80	1.299	13.632	501	10	27

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Tabel 2.35 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD, Mi, SMP/ Mts)	45.240 (100%)	100%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	54.727 (100%)	100%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	12.062 (100%)	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2022

Angka Pencapaian SPM dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut untuk Pendidikan Dasar yang ditargetnya sebesar 45.240 tercapai sebesar 100%. Untuk Pendidikan Kesetaraan pencapaian SPM ditargetkan sebesar 54.727 dan tercapai sebesar

100%. Sementara pada Pendidikan Anak Usia Dini SPM yang ditargetkan 12.062 tercapai sebesar 100%.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Dalam perspektif pembangunan manusia ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinter-relasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi yang layak sulit untuk dicapai. Namun sebaliknya, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik. Kesehatan merupakan bentuk investasi pada kualitas sumberdaya manusia. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik maka diharapkan kualitas manusia juga semakin baik, yakni masyarakat dapat semakin produktif. Berikut merupakan beberapa indikator yang menunjukkan kondisi kesehatan di Kabupaten Tanah Laut:

Fasilitas Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian akses masyarakat ke sarana dan prasarana kesehatan lebih mudah terutama lapisan masyarakat yang paling bawah dan terpencil. Bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakatpun tidak henti-hentinya dilaksanakan. Salah satu cara adalah dengan mengaktifkan kembali fungsi posyandu. Tidak ketinggalan juga dengan menambah tenaga medis dan meningkatkan profesionalisme tenaga medis yang ada. Sebagai contoh langkah yang ditempuh adalah memperbanyak penerimaan pegawai khususnya tenaga kesehatan. Upaya meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebab tanpa sarana yang memadai, derajat kesehatan penduduk yang baik akan sulit tercapai. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Tabel 2.36 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2021

No.	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Apotek	Poliklinik	Pustu
1.	Panyipatan	-	-	2	-	1	3
2.	Takisung	-	-	1	2	-	9
3.	Kurau	-	-	2	-	-	3
4.	Bumi Makmur	-	-	1	-	-	4
5.	Bati-bati	-	-	2	1	2	4
6.	Tambang Ulang	-	-	1	1	-	2
7.	Pelaihari	3	-	3	5	2	9
8.	Bajuin	-	-	2	-	1	4
9.	Batu Ampar	-	-	1	1	-	7
10.	Jorong	-	-	2	1	1	6
11.	Kintap	1	-	2	4	2	4
Jumlah		4	0	19	15	9	55

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Keberadaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 dapat dikatakan telah memadai. Seluruh jenis fasilitas kesehatan dasar telah tersedia di Kabupaten Tanah Laut dari rumah sakit sampai dengan Pustu. Sebagai ibukota kabupaten, Kecamatan Pelaihari memiliki fasilitas kesehatan yang paling lengkap yaitu 3 unit rumah sakit, 3 unit Puskesmas, 5 unit Apotek, 2 unit Poliklinik, dan 9 unit Pustu. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 tersebar merata di seluruh kecamatan dengan jumlah keseluruhan Puskesmas sebanyak 19 unit.

Tenaga Kesehatan

Selain fasilitas kesehatan, tersedianya tenaga kesehatan juga berperan dalam peningkatan kualitas kesehatan di suatu wilayah. Tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 terbagi ke dalam 5 kelompok yaitu Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, dan Tenaga Kefarmasian.

Terkait dengan jumlah tenaga medis pada tahun 2021, tenaga medis di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian. Jumlah dokter umum pada tahun 2021 adalah sebanyak 110 orang yang tersebar di seluruh kecamatan se Kabupaten Tanah Laut. Untuk dokter gigi, jumlahnya pada tahun 2021 adalah sebanyak 23 orang yang tersebar di seluruh kecamatan. Perawat di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 600 orang dengan perawat terbanyak ada di Kecamatan

Pelaihari yaitu 380 orang. Untuk tenaga bidan sebanyak 449 orang tersebar seluruh Kabupaten Tanah Laut, dan tenaga kefarmasian sebanyak 124 orang.

Tabel 2.37 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Tanah Laut, 2021

No.	Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian
1.	Panyipatan	2	2	15	22	5
2.	Takisung	3	1	18	17	4
3.	Kurau	4	0	21	14	4
4.	Bumi Makmur	2	1	6	16	3
5.	Bati-bati	5	1	25	28	5
6.	Tambang Ulang	2	2	11	13	3
7.	Pelaihari	70	7	380	214	76
8.	Bajuin	5	2	19	23	4
9.	Batu Ampar	2	1	23	21	4
10.	Jorong	4	2	24	28	2
11.	Kintap	11	4	58	53	14
Jumlah		110	23	600	449	124

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Penolong Kelahiran

Kesehatan balita merupakan salah satu indikator kesejahteraan bangsa. Artinya bahwa, suatu bangsa akan dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik apabila tingkat kesehatan balita memiliki angka yang baik pula. Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh faktor lain di antaranya adalah penolong kelahiran. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, keluarga atau lainnya. Penolong kelahiran tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi saja, namun juga angka kematian ibu sebagai risiko proses kelahiran. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara kemungkinan keselamatan ibu atau anak yang dilahirkan. Keduanya harus diselamatkan dalam risiko besar sebuah kelahiran. Jika dilihat dari klasifikasi wilayah, baik desa yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan, seluruh proses persalinannya menggunakan jasa tenaga kesehatan. Wilayah perdesaan, kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan adalah

sebesar 99,98%. Untuk wilayah perkotaan, penolong kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan sebesar 99,98%.

Tabel 2.38 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Menurut Klasifikasi Desa dan Penolong Proses Kelahirandi Kab. Tanah Laut, 2021

No.	Klasifikasi Desa	Nakes	Non Nakes	Jumlah
1.	Perdesaan	99,98	0,02	100,00
2.	Perkotaan	99,98	0,02	100,00

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Imunisasi Balita

Imunisasi balita merupakan pemberian imunisasi kepada balita yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh balita dari berbagai penyakit. Hal ini dilakukan juga sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas kesehatan. Beberapa jenis imunisasi bagi balita antara lain imunisasi BCG, Campak, DPT, Polio, dan Hepatitis B. Pada tahun 2017, persentase balita yang telah mendapat imunisasi terbesar pada jenis imunisasi di Kabupaten Tanah Laut yaitu 95,4% balita telah mendapat imunisasi BCG, 79,2% balita telah mendapatkan imunisasi campak, 89,8% balita telah mendapat imunisasi DPT 1, 96,7% balita telah mendapat imunisasi polio 1, dan 85% balita telah mendapat imunisasi hepatitis B. Secara keseluruhan pada tahun 2021, imunisasi Polio 4 merupakan imunisasi yang paling banyak didapat oleh balita dan imunisasi DPT 3 merupakan imunisasi yang paling sedikit didapat oleh balita di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2021, persentase balita yang mendapatkan imunisasi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun tahun sebelumnya dimana dari 10 jenis imunisasi yang diberikan, seluruh jenis imunisasi sudah mencapai angka persentase di atas 80%.

Tabel 2.39 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021

No.	Jenis Imunisasi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	BCG	95,40	95,23	88,3	87,5	89,5
2.	Campak	79,20	76,92	90,5	78,3	93
3.	DPT 1	89,80	93,18	90,6	88,1	89,1
4.	DPT 2	88,20	93,18	90,3	85,4	86,5
5.	DPT 3	81,20	93,18	87,0	82,1	83,5
6.	Polio 1	96,70	95,86	91,5	83,8	92,6
7.	Polio 2	89,40	95,86	90,3	88,2	87,8
8.	Polio 3	84,00	95,86	89,9	85,0	85,1

No.	Jenis Imunisasi	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Polio 4	78,40	95,86	88,6	82,3	96,9
10.	Hepatitis B	85,00	93,55	89,3	91,2	87,4

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2021

Jumlah Kasus Penyakit

Kualitas kesehatan dapat dilihat pula melalui kasus penyakit yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Hal ini merupakan indikator eksternal selain indikator internal seperti fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Terdapat 10 kasus penyakit terbanyak yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021, yaitu hipertensi primer, ISPA, Dyspepsia, Nasopharingitis Akut, Demam, Penyakit Pulpa & Jaringan Periapikal, Gastritis, Cepalgia, Penyakit Gusi dan Jaringan Periodental, dan Myalgia. Pada tahun 2021, jenis penyakit yang paling banyak diderita adalah hipertensi primer yaitu sebanyak 13.434 kasus, disusul dyspepsia sebanyak 6.770 kasus, dan Kencing Manis (DM) sebanyak 5.053 kasus.

Tabel 2.40 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, 2021

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1.	Hipertensi Primer	13.434
2.	Dyspepsia	6.770
3.	Pemeriksaan Kehamilan	4.946
4.	Kencing Manis (DM)	5.053
5.	Infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas	3.295
6.	Cepalgia	3.022
7.	Hipertensi Sekunder	2.879
8.	Gastritis	3.260
9.	Myalgia	3.781
10.	Nasopharingitis akuta (common cold)	2.585

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Selain itu, penyakit lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah HIV/AIDS dan DBD. Pada tahun 2021, kasus penyakit HIV/AIDS kumulatif sebanyak 123 kasus, dengan daerah terbanyak terdapat di Kecamatan Kintap. Untuk DBD, pada tahun 2021 terdapat 36 kasus, dengan daerah terbanyak ada di Kecamatan Takisung.

Tabel 2.41 Jumlah Kasus HIV/AIDS dan DBD di Kabupaten Tanah Laut, 2021

No.	Kecamatan	HIV/AIDS	DBD
1.	Panyipatan	4	-
2.	Takisung	7	14

3.	Kurau	7	-
4.	Bumi Makmur	4	-
5.	Bati-bati	14	2
6.	Tambang Ulang	15	3
7.	Pelaihari	20	9
8.	Bajuin	6	-
9.	Batu Ampar	6	3
10.	Jorong	17	2
11.	Kintap	23	3
Jumlah		123	36

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Bayi Gizi Buruk

Jumlah kelahiran bayi di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2017-2021 berada di kisaran 6.000an bayi lahir. Pada tahun 2021 jumlah bayi lahir adalah sebanyak 6.367 bayi dengan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 452 bayi dan bayi gizi buruk sebanyak 1 bayi.

Tabel 2.42 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021

Tahun	Bayi Lahir	BBLR	BBLR Dirujuk	Gizi Buruk
2017	6 367	390	49	2
2018	6 400	432	133	2
2019	6 491	409	125	1
2020	6 510	376	-	2
2021	6.367	452	-	1

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Kunjungan Ibu Hamil

Jumlah ibu hamil di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2017-2021 menunjukkan peningkatan dari sebanyak 6.608 ibu hamil menjadi sebanyak 7.490. Pada tahun 2020, dari 7.490 ibu hamil, yang melakukan kunjungan K1 adalah sebanyak 7.154 ibu hamil dan yang melakukan kunjungan K4 sebanyak 6.012 ibu hamil. Ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis (KEK) sebanyak 1.033 ibu hamil dan yang mendapatkan zat besi sebanyak 6.307 ibu hamil.

Tabel 2.43 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tabler Zat Besi (Fe) di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021

Tahun	Jumlah Ibu Hamil	Kunjungan K1	Kunjungan K4	Kurang Energi Kronis (KEK)	Mendapat Zat Besi
2017	7.728	7.045	5.966	1.204	5 561
2018	7.728	7.080	6.065	1.175	5 612
2019	7.489	7.231	5.922	1.071	6 889
2020	7.490	7.154	6.012	1.033	6 307
2021	6.616	6.616	5.817	889	5.976

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Kematian Ibu dan Bayi

Kasus kematian ibu terbanyak di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 3 kasus yaitu di Kecamatan Pelaihari dan Kecamatan Jorong. Sementara itu, jumlah bayi lahir hidup di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 6.367 bayi lahir hidup dan bayi lahir mati sebanyak 17 kasus. Jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Batu Ampar yaitu sebanyak 2 kasus.

Tabel 2.44 Jumlah Kematian Maternal, Jumlah Bayi Lahir Hidup dan Jumlah Bayi Lahir Mati di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2021

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Maternal		Bayi Lahir Hidup		Bayi Lahir Mati	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	Panyipatan	-	1	426	465	-	-
2.	Takisung	1	-	547	548	1	-
3.	Kurau	-	-	248	240	2	1
4.	Bumi Makmur	-	-	282	250	-	-
5.	Bati-Bati	1	1	810	782	-	-
6.	Tambang Ulang	1	1	338	306	1	-
7.	Pelaihari	3	4	1435	1405	4	1
8.	Bajuin	-	3	337	335	1	1
9.	Batu Ampar	1	-	539	491	1	2
10.	Jorong	-	4	708	724	-	-
11.	Kintap	1	3	840	821	1	-
	Jumlah	8	17	6510	6367	11	5

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Tabel 2.45 Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	Target	CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN																	
				PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV			PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB			PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)			PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS			PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI			PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT		
				Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%
1	PANYIPATAN	PANYIPATAN	100%	132	126	95,5	192	5	2,6	15	14	93,3	124	240	193,7	808	1026	127,0	1276	165	12,9
2		BATAKAN	100%	297	45	15,2	198	6	3,0	21	16	76,2	167	346	207,2	1089	932	85,6	1314	61	4,6
3	JORONG	JORONG	100%	283	111	39,2	214	5	2,3	20	18	90,0	160	207	129,6	1041	391	37,5	1419	330	23,3
4		ASAM -ASAM	100%	305	425	139,3	304	4	1,3	28	12	42,9	227	103	45,4	1479	461	31,2	2017	301	14,9
5	BATU AMPAR	TAJAU PECAH	100%	653	420	64,3	426	8	1,9	39	22	56,4	315	99	31,4	2056	677	32,9	2830	989	34,9
6	KINTAP	KINTAP	100%	566	213	37,6	417	4	1,0	38	43	113,2	308	328	106,4	2011	1281	63,7	2767	138	5,0
7		SEI CUKA	100%	335	322	96,1	244	2	0,8	23	18	78,3	183	114	62,4	1192	492	41,3	1620	501	30,9
8	PELAIHARI	PELAIHARI	100%	915	105	11,5	688	47	6,8	64	60	93,8	511	587	114,9	3333	892	26,8	4570	1149	25,1
9		SEI RIAM	100%	138	13	9,4	104	3	2,9	10	10	100,0	78	20	25,6	509	205	40,3	690	274	39,7
10		ANGSAU	100%	649	672	103,5	417	37	8,9	38	38	100,0	309	309	99,9	2017	866	42,9	2766	910	32,9
11	BAJUIN	TANJUNG HABULU	100%	150	136	90,7	108	0	0,0	10	8	80,0	81	131	162,6	525	641	122,0	717	295	41,1
12		TIRTA JAYA	100%	309	160	51,8	191	1	0,5	18	25	138,9	142	237	167,4	923	2722	294,8	1269	772	60,8
13	TAKISUNG	TAKISUNG	100%	665	658	98,9	509	10	2,0	47	47	100,0	376	508	135,0	2455	1266	51,6	3379	594	17,6
14	BATI - BATI	BATI - BATI	100%	815	474	58,2	564	28	5,0	52	40	76,9	417	209	50,1	2723	643	23,6	3753	710	18,9
15		KAIT - KAIT	100%	170	150	88,2	127	4	3,1	12	8	66,7	95	54	56,8	620	245	39,5	845	77	9,1
16	TAMBANG ULANG	TAMBANG ULANG	100%	301	14	4,7	279	1	0,4	26	22	84,6	207	207	99,8	1353	851	62,9	1855	439	23,7
17	KURAU	KURAU	100%	70	70	100,0	60	0	0,0	6	6	100,0	45	45	99,6	295	360	122,2	400	83	20,8
18		PADANG LUAS	100%	225	172	76,4	154	0	0,0	14	12	85,7	115	34	29,5	752	255	33,9	1020	327	32,1
19	BUMI MAKMUR	BUMI MAKMUR	100%	309	334	108,1	213	9	4,2	20	20	100,0	158	47	29,8	1030	156	15,1	1411	383	27,1
		SPM Bidang Kesehatan	100%	7287	4620	63,0	5409	174	3,2	501	439	88	4018	3825	95,20	26211	14362	55	35918	8498	23,66

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2022

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara umum, kondisi dari suatu daerah yang terkait dengan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat digambarkan melalui indikator kondisi jalan serta kondisi infrastruktur pendukung lainnya. Dengan kondisi jalan yang baik, berperan mendukung pertumbuhan ekonomi maupun kondisi sosial budaya melalui kemudahan akses antarwilayah. Kondisi infrastruktur pendukung lainnya juga menjadi modal dalam meningkatkan kondisi perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi akan dicapai apabila didukung oleh kondisi jalan dan infrastruktur yang baik dan memadai.

Kondisi Jalan

Pembangunan jalan menjadi hal penting dalam upaya peningkatan akses antarwilayah. Dengan kondisi jalan yang baik, maka akan mendorong peningkatan perekonomian penduduk di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2021, panjang jalan di Kabupaten Tanah Laut yang berada pada kondisi baik yakni sepanjang 605,69 km, dalam kondisi sedang yakni sepanjang 628,28 km, dalam kondisi rusak yakni sepanjang 82,08 km, dan dalam kondisi rusak berat yakni sepanjang 510,58 km. Secara keseluruhan, panjang jalan yang dikelola oleh Kabupaten Tanah Laut adalah sepanjang 1826,63 km.

Tabel 2.46 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2021

Kondisi Jalan			
Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
605,69	628,28	82,08	510,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Laut 2022

Apabila dilihat per kecamatan, Kecamatan Pelaihari merupakan kecamatan yang memiliki kondisi jalan baik terpanjang di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 yakni sepanjang 605,69 km. Kecamatan Jorong memiliki kondisi jalan rusak terpanjang di Kabupaten Tanah Laut yakni sepanjang 12,3 km. Untuk kondisi jalan rusak berat, Kecamatan Kintap merupakan kecamatan yang memiliki kondisi jalan rusak berat terpanjang di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 yakni sebesar 123,47 km.

Tabel 2.47 Panjang Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2021

No.	Kecamatan	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1.	Panyipatan	68,1	84,32	5,2	40,54
2.	Takisung	77,82	24,47	10,73	41,9
3.	Kurau	12,25	9	2,6	17,65
4.	Bumi Makmur	12,0	25,9	1,2	13,88
5.	Bati-Bati	51,11	52,08	10,1	24,9
6.	Tambang Ulang	44,71	28,8	15,1	32,9
7.	Pelaihari	136	155,43	10,03	100,74
8.	Bajuin	20	39,5	2,8	56,7
9.	Batu Ampar	75,18	79,94	5,1	21,51
10.	Jorong	64,92	63,04	12,3	36,4
11.	Kintap	43,6	65,8	6,92	123,47
Jumlah		605,69	628,28	82,08	510,59

Sumber: Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut, 2022

Dilihat berdasarkan jenis permukaan, sepanjang 1097,53 km jalan di Kabupaten Tanah Laut memiliki permukaan aspal, sepanjang 574,85 km jalan memiliki permukaan kerikil, sepanjang 149,46 km memiliki permukaan tanah, dan sepanjang 4,80 km jalan berpermukaan beton. Apabila dirinci per kecamatan pada tahun 2021, Kecamatan Pelaihari memiliki jalan dengan permukaan aspal terpanjang yakni sepanjang 264,43 km dan Kecamatan Kurau memiliki jalan dengan permukaan aspal terpendek yakni sebesar 18,20 km. Kemudian, Kecamatan Kintap memiliki jalan dengan permukaan kerikil terpanjang yakni sepanjang 114,24 km dan Kecamatan Kurau memiliki jalan dengan permukaan kerikil terpendek yakni sepanjang 7,00 km. Kecamatan Pelaihari juga menjadi kecamatan yang memiliki jalan dengan permukaan tanah terpanjang yakni sepanjang 35,90 km.

Tabel 2.48 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2021

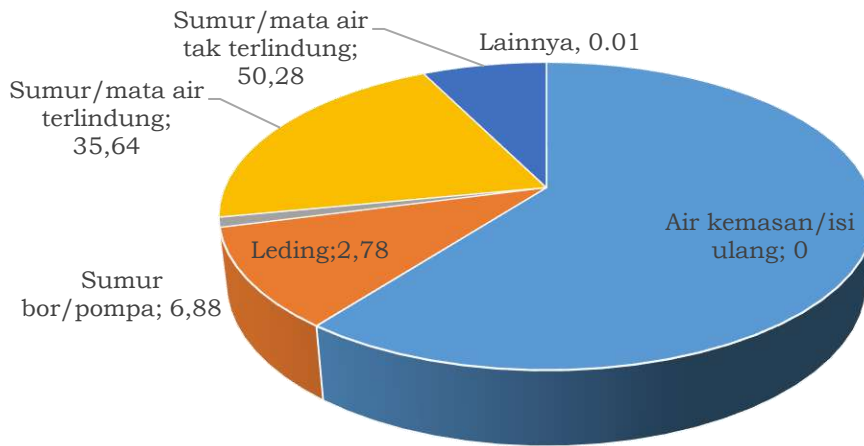
No.	Kecamatan	Jenis Permukaan			
		Aspal	Kerikil	Tanah	Beton
1.	Panyipatan	134,73	51,62	8,41	3,40
2.	Takisung	102,29	43,23	9,40	-
3.	Kurau	18,20	7,00	16,30	-
4.	Bumi Makmur	29,70	22,48	0,60	0,20
5.	Bati-Bati	94,69	42,30	-	1,20
6.	Tambang Ulang	63,71	33,90	23,90	-
7.	Pelaihari	264,43	101,87	35,90	-
8.	Bajuin	44,40	71,10	3,50	-
9.	Batu Ampar	146,42	35,31	-	-
10.	Jorong	115,96	51,80	8,90	-
11.	Kintap	83,00	114,24	42,55	-
Jumlah		1097,53	574,85	149,46	4,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Laut, 2022

Sumber Air Minum

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup utama bagi makhluk hidup. Kebutuhan air minum, tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga dari kualitas air minum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, air minum dikatakan aman untuk kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Kualitas air minum dapat dilihat dari hasil uji laboratorium terkait kandungan air minum. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan air minum di rumah tangga dapat diukur dari akses ke air minum layak. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap akses adalah jenis sumber air utama yang digunakan untuk minum, sumber air utama yang digunakan untuk memasak dan mandi/cuci, serta jarak sumber air ke penampungan limbah (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Pada tahun 2019 mayoritas rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut menggunakan air kemasan atau air isi ulang sebagai sumber air minum utama, yaitu sebanyak 60,41%. Selanjutnya adalah air sumur atau mata air terlindung sebanyak 20,74%, menurun dari tahun 2018. Penurunan angka persentase penggunaan sumur pada rumah tangga ini kemungkinan karena rumah tangga mulai beralih ke sumber air minum air kemasan bermerek atau air isi ulang dan sumber air minum lainnya seperti mata air. Kondisi ini sangat terlihat dari fenomena yang cukup menarik, dimana tahun 2016 pengguna air sumur atau mata air terlindung di Kabupaten Tanah Laut ada sebanyak 68,87% sedangkan pengguna air kemasan atau air isi ulang ada sebanyak 20,64%. Kondisi tersebut berkebalikan dengan kondisi di tahun 2019. Pada Tahun 2019 air minum layak pada Kabupaten Tanah Laut sebesar 48,17%.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2019

Gambar 2.15 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, 2019

Selanjutnya berdasarkan jenisnya sumber air minum dapat dikelompokkan menjadi sumber air minum bersih dan tidak bersih. Sumber air minum bersih terdiri dari air minum yang bersumber dari air minum kemasan, air ledeng, sumur bor, sumur terlindung, atau mata air terlindung. Khusus untuk air minum yang bersumber dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi jarak lebih dari sama 10 meter dari penampungan akhir tinja terdekat. Pada tahun 2017, sebanyak 1 dari 2 rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut sudah menggunakan sumber air minum berupa air bersih. Persentase yang menggunakan air tidak bersih masih tergolong cukup tinggi yaitu mencapai 52,55% rumah tangga. Jika dilihat dari kuintil pengeluaran rumah tangga, persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih ada sebanyak 28,58% untuk kuintil 1, berbeda jauh dengan kuintil teratas yaitu sebanyak 61,51%. Penggunaan air minum tidak bersih banyak digunakan oleh rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga yang rendah ditunjukkan dari pembagian akses air minum berdasarkan kuintil. Hal tersebut tentu seharusnya menjadi perhatian pemerintah karena air minum bersih berkaitan erat dengan kualitas kehidupan rumah tangga terkait.

Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2021 di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
----	-----------------------	----------------------	--------	---------

1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	36.271 (100%)	36.843 (101,57%)
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	46.133 (100%)	46.533 (100,87)

Sumber: Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut, 2022

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebutuhan akan papan yang ditunjukkan melalui perumahan diperlukan dalam menunjang kehidupan manusia. Hal ini sebagai salah satu bentuk upaya pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Kualitas dari perumahan menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di suatu wilayah. Semakin baik kualitas dari perumahan masyarakat maka semakin baik pula tingkat kesejahtraannya. Kesejahteraan rumah tangga dapat diukur melalui beberapa indikator. Beberapa indikator tersebut dijadikan sebagai dasar dalam target pencapaian SPM.

Adapun pencapaian SPM di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.50 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	517 unit (100%)	517 unit (107%)
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	-	-

Sumber: Dinas PRKPLH Kab. Tanah Laut, 2022

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas yang terjadi pada wilayah tersebut dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Tabel 2.51 Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1	Pelayanan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum dan perkara	115 orang (100%)	115 orang (100%)
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang (100%)	Orang (100%)

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanah Laut, 2022

2.1.3.1.6 Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dalam rangka memfasilitasi penduduk miskin, Pemerintah mencanangkan berbagai program perlindungan sosial mulai dari bantuan beras hingga bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kabupaten Tanah Laut, persentase rumah tangga yang menerima bantuan berupa Raskin/Rastra/BPNT pada tahun 2021 adalah sebesar 7,77%, Program Indonesia Pintar sebesar 7,15%, Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar 7,05%, dan Program Keluarga Harapan sebesar 3,90%.

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Program jaminan sosial berupa jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada tahun 2020 persentase rumah tangga yang memiliki maupun menerima jaminan sosial di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 17,8%.

Tabel 2.52 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perlindungan Sosial yang Diterima di Kabupaten Tanah Laut, 2021

Jenis Program	Persentase (%)
Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)	7,77
Program Indonesia Pintar	7,15
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	7,05
Program Keluarga Harapan	3,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Tabel 2.53 Persentase Rumah Tangga dengan Jaminan Sosial Menurut Jenis dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Laut, 2021

Maksud Utama	Persentase Rumah Tangga
Jaminan Pensiun/ Hari tua*	8,18
Asuransi/PHK**	9,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

*Jaminan pensiun/hari tua terdiri dari: Jaminan pensiun dan Jaminan hari tua

** Asuransi/PHK terdiri dari: Asuransi kematian, Jaminan kecelakaan kerja, dan Pesangon PHK

Adapun pencapaian SPM di Bidang Sosial pada Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.54 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021

No	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase Penyandang Disabilitas Dasar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	100%	$\frac{368}{368} \times 100\% = 100\%$
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar luar panti yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dasar	100%	$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Persentase lanjut usia terlantar luar panti yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dasar	100%	$2574/2754 \times 100 = 100\%$
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh	100%	$5/5 \times 100\% = 100\%$

		elayanan rehabilitasi sosial dasar		
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupate/kota	Persentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	$53.198/53.252 \times 100\% = 100\%$

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, 2022

Analisis realisasi SPM Dinas Sosial dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menjadi ketetapan Standar Pelayanan minimal adalah:
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
 - b. Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar di luar panti
 - c. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti
 - d. Rehabilitasi sosial dasar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
 - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban bencana Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Data Penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Laut relatif tinggi yaitu mencapai angka 3044 Pada Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut menetapkan untuk memeberikan pelayanan Rrehabilitasi Sosial dasar berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelatihan keterampilan kepada 368 orang penyandang Disabilitas. Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di Kabupaten Tanah laut pada tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 368 orang (100 %).
3. Rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, telah dilaksanakan terhadap 10 anak terlantar. Jenis pelayanan dasar yang diberikan adalah berupa berupa penjangkauan dan layanan rujukan. 10 anak terlantar tersebut telah mampu mengakses layanan pendidikan dan keterampilan serta mendapat jaminan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

4. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di Kabupaten Tanah Laut terlaksana bagi 2754 orang. Bentuk pelayanan lanjut usia terlantar yang diberikan adalah berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usi yang potensial dan pemberian jaminan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan terhadap 5 orang gelandangan dan pengemis. Pengemis yang ada di Kabupaten Tanah Laut masih bersifat musiman yaitu pada hari-hari tertentu saja, kebanyakan mereka adalah pendatang atau bukan penduduk Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan untuk gelandangan telah diberikan layanan rujukan kepanti tuna sosial di Banjarbaru.
6. Kabupaten Tanah Laut termasuk wilayah rawan bencana baik bencana alam yaitu banjir, angin puting beliung, abrasi maupun bencana sosial (kebakaran). Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana selalu dilaksanakan sesuai dengan jumlah korban yang terdampak, pencapaian program pada tahun 2021 jumlah warga terdampak bencana sebanyak 53.252 jiwa dan yang telah mendapat perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 53.198 jiwa atau mencapai 99,90%.

2.1.3.1.7 Tenaga Kerja

Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat mengkaji berbagai permasalahan mengenai ketenagakerjaan dalam upaya mencari solusinya. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang masih dapat ditemui hingga saat ini adalah pengangguran. Pengangguran terjadi ketika pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja. Dengan menggunakan berbagai data yang tersedia, maka pemerintah dapat menyusun serta merumuskan kebijakan sebagai upaya penyelesaian masalah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula

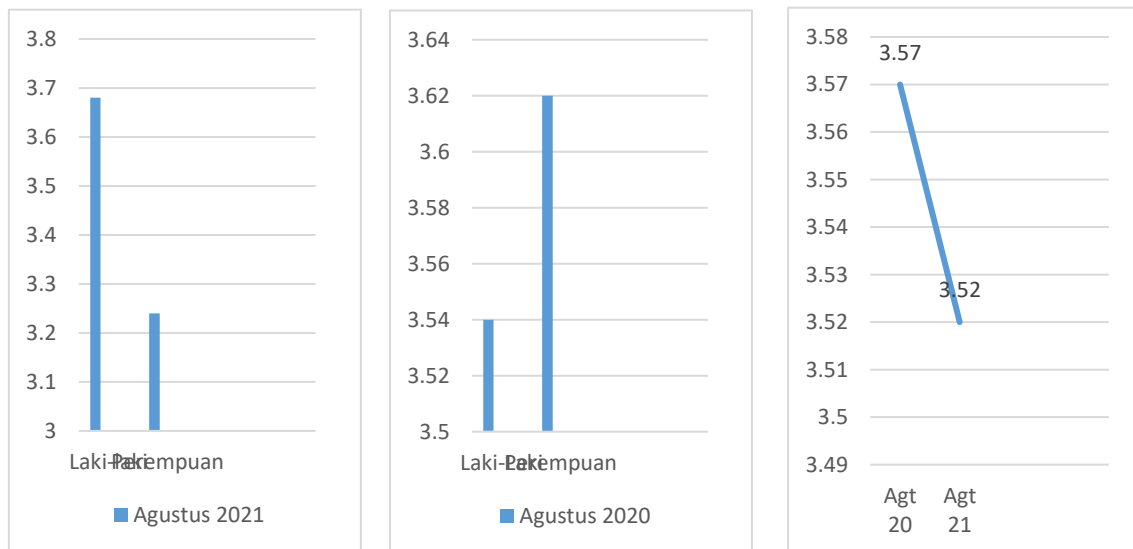
harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian besar dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan dan menjadi penganggur (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2021).

Tabel 2.55 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tanah Laut, 2021

Pendidikan Tertinggi	2021
SD	21,36
SMP	11,42
SMA ke Atas	56,61
Perguruan Tinggi	10,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Berdasarkan jenjang pendidikan, tingkat Pendidikan yang angka penganggurannya paling tinggi di Kabupaten Tanah Laut adalah tingkat SMA yaitu sebesar 56,61% pada tahun 2021.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Laut, 2022

Gambar 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (Persen), Agustus 2020-Agustus 2021

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidakbekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasimasaalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Jika melihat data TPT pada Agustus 2021 turun 0,05 persen poin dibanding Agustus 2020.

Tabel 2.56 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020-Agustus 2021

Komponen	Agustus 2020	Agustus 2021	Perubahan Ags 2020 - Ags 2021	
	Orang	Orang	Orang	Persen
Pengangguran¹ Karena COVID-19	977	1.563	586	59,98
Bukan Angkatan Kerja (BAK)² Karena COVID-19	626	505	-121	-19,33
Sementara Tidak Bekerja³ Karena COVID-19	985	1.126	141	14,31
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19	23.611	14.756	-8.855	-37,50
Total	26.199	17.950	-8.249	-31,49
Penduduk Usia Kerja (PUK)	252.428	256.054	3.626	1,44
	persen	persen	Persen poin	
Persentase terhadap PUK	10,38	7,01	-3,37	

Sumber : BPS Kab. Tanah Laut, 2022

Keterangan:

Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015

1. Pengangguran Karena COVID-19 adalah penganggur yang pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020

2. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020

3. Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19 adalah penduduk bekerja namun karena COVID-19 menjadi sementara tidak bekerja

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: a) Pengangguran Karena COVID-19; b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19; c) Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19; dan d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19. Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.

Pada Tabel 2.56 dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2021 sebanyak 256.054 orang, mengalami penurunan sebanyak 3.636 orang atau sebesar 1,44 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari 1.563 orang pengangguran karena COVID-19; 505 orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; 1.126 orang sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan 14.756 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Komponen pengangguran karena COVID-19 dan Sementara Tidak Bekerja karena COVID-19 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 59,98 persen poin dan 14,31 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Sementara komponen Bukan Angkatan Kerja karena COVID-19 dan Pengurangan Jam Kerja karena COVID-19 mengalami penurunan masing-masing sebesar 19,33 persen poin dan 37,50 persen poin.

Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota. Dapat diketahui bahwa lapangan pekerjaan di Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perubahan.

Tabel 2.57 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Tanah Laut, 2021

Lapangan Pekerjaan	2021
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	48,82
Pertambangan dan Penggalian	3,62

Industri Pengolahan	5,74
Listrik, Gas, dan Air	0,59
Bangunan	5,30
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	19,54
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	2,28
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	1,07
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	13,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar karena pemerintah memberikan perhatian yang besar pada upaya peningkatan produksi beberapa komoditas pangan utama. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, komoditas pangan utama yang ditetapkan sebagai sasaran pembangunan prioritas nasional ketahanan pangan adalah padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Sedangkan di Kabupaten Tanah Laut sendiri, komoditas jagung digadang-gadang menjadi komoditas yang seharusnya diunggulkan dari Kabupaten Tanah Laut (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2022).

2.1.3.1.8 Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bagi setiap daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang salah satunya memperhitungkan aspek lingkungan hidup dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur melalui beberapa indikator seperti Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan, Pengelolaan Limbah, dan sebagainya. Selain didukung dengan data dan penjelasan dari beberapa indikator tersebut, perlu adanya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPLH perlu memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Selain itu, RPPLH juga memuat rencana mengenai pemanfaatan dana

atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dokumen ini diperlukan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang.

Dalam perencanaan pembangunan, aspek kualitas lingkungan hidup menjadi perhatian utama dimana dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) menjadi persyaratan dalam pengesahan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Layanan yang diberikan oleh dinas yang mengurus kewenangan lingkungan hidup diantaranya adalah izin lingkungan. Pada tahun 2018, izin lingkungan diberikan kepada Rumah Sakit Ammariz, PT Charoen Pokphand Jaya, PT Megah Mulia Jaya Persada, dan beberapa perusahaan lainnya. Pada tahun 2017, izin lingkungan diberikan diantaranya kepada PT Akbar Mitra Jaya, PT Gawi Makmur Kalimantan, PT Berkat Panyipatan Jaya, Endik Medical Clinic, dan perusahaan lainnya.

2.1.3.1.9 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Arsip kependudukan seperti KTP, akte kelahiran, akte nikah, atau akte kematian merupakan dokumen penting yang perlu dimiliki oleh setiap penduduk. Dokumen tersebut digunakan untuk berbagai macam keperluan serta menjadi syarat administrasi mulai dari pendaftaran sekolah, mendaftarkan pekerjaan, administrasi perbankan, pembuatan paspor, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengadministrasian serta pencatatan dokumen tersebut perlu menjadi fokus bagi pemerintah sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi syarat administrasi.

Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu arsip kependudukan mengenai pencatatan kelahiran yang penting dimiliki oleh setiap penduduk. Pembuatan akta kelahiran ini diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran merupakan suatu dokumen negara yang berisi identitas anak, tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang dalam mengesahkan dokumen tersebut. Beberapa fungsi dari kepemilikan akta kelahiran adalah sebagai bukti sah hubungan anak dengan orang tua, identitas diri anak, syarat administrasi sekolah, syarat pembuatan KTP, SIM dan paspor, hingga melamar pekerjaan. Data menunjukkan

pada Tahun 2021 jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran keseluruhan kecamatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar 105.874

Tabel 2.58 Jumlah Akta Kelahiran di Kabupaten Tanah Laut, 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 0-17 th (Jiwa)	Jumlah Penduduk Usia 0-17 th yang sudah Memiliki Akta (Jiwa)	%
1	Takisung	9.534	9.359	98,16
2	Jorong	11.113	10.881	97,91
3	Pelaihari	23.826	23.453	98,43
4	Kurau	4.133	4.039	97,73
5	Bati-Bati	13.295	12.992	97,72
6	Panyipatan	7.445	7.289	97,90
7	Kintap	14.580	14.188	97,31
8	Tambang Ulang	5.649	5.536	98,00
9	Batu Ampar	8.325	8.183	98,29
10	Bajuin	5.864	5.766	98,33
11	Bumi Makmur	4.257	4.188	98,38
	JUMLAH	108.021	105.874	98,01

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, 2021

2.1.3.1.10 Perhubungan

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang sedang giat melaksanakan pembangunan di semua sektor ekonomi. Untuk itu, sarana dan prasarana transportasi yang bagus merupakan syarat mutlak yang diperlukan dan menjadi salah satu fokus utama dari pembangunan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik akan mempermudah masyarakat dalam mobilitas antar kecamatan, ibukota kabupaten maupun ibukota provinsi. Pengembangan sistem jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut terdiri atas sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, sistem jaringan perkeretaapian, dan sistem jaringan transportasi udara. Sistem jaringan transportasi darat dibagi menjadi jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten, jaringan jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan, terminal penumpang, dan jaringan pelayanan angkutan umum. Pada Tabel 2.82 berikut dipaparkan jenis jalan yang menghubungkan berbagai tempat di Kabupaten Tanah Laut tahun 2019:

Tabel 2.59 Jaringan Jalan Kabupaten Tanah Laut, 2021

Jenis	Keterangan
Sistem jaringan jalan nasional	a. jaringan jalan kolektor primer K-1, meliputi :

Jenis	Keterangan
	<p>1. sp. Liang Anggang – Desa Liang Anggang (Batas Kabupaten Tanah Laut);</p> <p>2. Ds. Liang Anggang (Batas Kabupaten Tanah Laut) – Bati Bati;</p> <p>3. Bati Bati – Batas Kota Pelaihari;</p> <p>4. Batas Kota Pelaihari – KP. Asam Asam;</p> <p>5. KP. Asam Asam – Kintap;</p> <p>6. Kintap – Desa Sungai Cuka (Batas Kabupaten Tanah Bumbu);</p> <p>7. Jalan Gunung Kayangan;</p> <p>8. Jalan KH. Mansyur;</p> <p>9. Jalan Muslimin (Pelaihari);</p> <p>10. Jalan Kemakmuran (Pelaihari);</p> <p>11. Jalan Sarang Halang (Pelaihari);</p> <p>12. Jalan Perkantoran Gagas (Pelaihari).</p> <p>13. jaringan jalan bebas hambatan (jalan tol), meliputi :</p> <p>14. Lianggang-Pelaihari dan</p> <p>15. Pelaihari-Pagatan.</p> <p>b. jaringan jalan strategis nasional rencana(Arteri Primer), meliputi :</p> <p>1. rencana pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis Jorong,</p> <p>2. Jalan akses menuju pelabuhan Pelaihari :</p> <p>3. Jalan akses pelabuhan pelaihari 4 km(bagian dari rencana pembangunan jalan missing link 1000 km),</p> <p>4. Jalan Kurau Pulau sari,</p> <p>5. Jalan Ambungan – Tajau Pecah dan Tajau Pecah – pelabuhan Swarangan,</p> <p>6. Jalan Gunung Kayangan (Pelaihari). Untuk akses Utara : Pelabuhan Swarangan – Salaman – Riam Adungan – utara(Kab. Banjar).</p>
Sistem jaringan jalan provinsi	<p>a. jaringan jalan kolektor primer K-2, meliputi:</p> <p>1. Banjarbaru – Bati-bati,</p> <p>2. Gambut – Pulau Sari,</p> <p>3. Pelaihari – Takisung, dan</p> <p>4. Pelaihari – Batakan;</p> <p>b. jaringan jalan kolektor primer K-3, meliputi:</p> <p>1. Jalan Antasari (Pelaihari),</p> <p>2. Jalan arah Takisung dan</p> <p>3. Jalan arah Batakan.</p>
Sistem jaringan jalan Kabupaten	<p>Jaringan jalan lokal primer, meliputi : seluruh ruas jalan lokal di Pelaihari</p>

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

2.1.3.1.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada dasarnya, Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan rakyat masyarakat. Secara defimisi Koperasi juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha. Keberadaan Koperasi di Kabupaten Tanah Laut jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh kecamatan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif diharapkan dapat memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan, guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran. Melihat potensi koperasi yang tersebar di seluruh kecamatan ini, dan sesuai dengan asas ekonomi kerakyatan yang dewasa ini mendapat perhatian serius dari pemerintah, maka keberadaan koperasi harus terus dikembangkan dengan meningkatkan profesionalitas manajemen para pengurus koperasi. Di Kabupaten Tanah Laut terdapat beberapa jenis koperasi seperti Koperasi Unit desa (KUD), Koperasi Pegawai Negeri (KPN), dan jenis-jenis koperasi lainnya.

Tabel 2.60 Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021

Tahun	KUD	KPR	KPN	Lainnya	Jumlah
2017	38	-	16	107	161
2018	38	14	16	78	146
2019	38	15	17	80	150
2020	38	17	16	92	163
2021	38	16	16	98	168

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Pada tahun 2020, total koperasi di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 163 koperasi. Jumlah tersebut terdiri dari 38 Koperasi Unit Desa, 16 Koperasi Pegawai Negeri, 17 KPR dan 92 Koperasi jenis lainnya. Pada tahun 2021 jumlah total naik menjadi 168 koperasi karena penambahan koperasi lainnya sebanyak 5 koperasi, sementara KUD dan KPN jumlahnya tetap sedangkan KPR terjadi pengurangan. Secara mendetail, komposisi jumlah koperasi per kecamatan pada tahun 2021 tampak pada Tabel 2.61 berikut ini:

Tabel 2.61 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kab.Tanah Laut, 2021

No.	Kecamatan	Jenis Koperasi		
		KUD	Non KUD	Jumlah
1.	Panyipatan	3	5	8

No.	Kecamatan	Jenis Koperasi		
		KUD	Non KUD	Jumlah
2.	Takisung	4	8	12
3.	Kurau	1	2	3
4.	Bumi Makmur	3	1	4
5.	Bati-Bati	3	7	10
6.	Tambang Ulang	2	7	9
7.	Pelaihari	4	51	55
8.	Bajuin	5	-	5
9.	Batu Ampar	3	13	16
10.	Jorong	5	18	23
11.	Kintap	5	18	23
Jumlah		38	130	163

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Dari jumlah KUD sebanyak 38 unit pada tahun 2021, wilayah yang memiliki jumlah KUD terbanyak adalah Kecamatan Bajuin, Jorong, dan Kintap yang masing-masing memiliki 5 unit KUD. Jumlah keseluruhan anggota KUD pada tahun 2021 adalah 12.441 anggota dimana jumlah anggota KUD terbanyak berasal dari Kecamatan Pelaihari yaitu 2.509 anggota. Secara keseluruhan jumlah simpanan anggota KUD adalah sebesar Rp 3,8 miliar dimana simpanan terbesar berada di Kecamatan Batu Ampar yaitu sebesar Rp 802 juta. Sementara itu, dari jumlah koperasi Non KUD sebanyak 130 unit, sebagian besar koperasi berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 51 unit. Jumlah anggota koperasi Non KUD di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 adalah sebanyak 17.123 anggota dengan jumlah simpanan sebesar Rp 67,249 miliar.

Tabel 2.62 Jumlah KUD dan Non KUD (unit), Anggota (orang), dan Simpanan (Rp Juta), 2021

No.	Kecamatan	KUD			Non KUD		
		Jumlah	Anggota	Simpanan	Jumlah	Anggota	Simpanan
1.	Panyipatan	3	614	592.139	5	889	1.225.800
2.	Takisung	4	1.039	601.992	8	914	5.041.598
3.	Kurau	1	48	43.240	2	71	(8.492)
4.	Bumi Makmur	3	534	27.751	1	32	6.750
5.	Bati-Bati	3	309	145.398	7	1.505	9.637.488
6.	Tambang Ulang	2	1.223	45.364	7	345	443.536
7.	Pelaihari	4	2.509	473.404	51	6.218	12.631.975
8.	Bajuin	5	1.300	147.747	-	-	-
9.	Batu Ampar	3	1.580	802.418	13	2.835	3.148.714
10.	Jorong	5	1.891	283.535	18	945	30.411.713
11.	Kintap	5	1.394	729.898	18	3.369	4.710.007
Jumlah		38	12.441	3.875.841	130	15.103	67.249.089

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

2.1.3.1.12 Statistik

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan BPS Kabupaten Tanah Laut telah merangkum berbagai statistik Kabupaten Tanah Laut. Urusan statistik yang dimaksud merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kabupaten Tanah Laut. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain (1) Buku Kabupaten dalam angka; (2) Buku Statistik Daerah; dan (3) Buku PDRB Kabupaten. Penyusunan ketiga buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Berdasarkan ketersediaan ketiga buku tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.98. Kabupaten Tanah Laut telah menunjukkan kemajuan pesatnya dengan hasil selama periode 2012-2019 rangkuman statistik buku-buku tersebut selalu tersedia.

Buku Kabupaten Tanah Laut dalam angka pada dasarnya setiap tahunnya berisi dengan rangkuman statistik mengenai geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, pariwisata, keuangan daerah, dan pendapatan regional. Buku Kabupaten Tanah Laut dalam angka tersebut merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Tanah Laut dan dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat umum sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan pembangunan.

Tabel 2.63 Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021

No.	Capaian Pembangunan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku Statistik Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2021

Dalam versi yang lebih ringkas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menyediakan Buku Statistik Daerah sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan. Publikasi Buku Statistik Daerah Kabupaten Tanah Laut tiap tahunnya diterbitkan oleh BPS Kabupaten Tanah Laut berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kabupaten Tanah Laut yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami

pembangunan serta potensi yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Publikasi ini mengemas kondisi terkini, perkembangan pembangunan yang ditampilkan dalam bentuk yang lebih informatif, dan bersifat analisis. Materi yang disajikan dalam Buku Statistik Daerah Kabupaten Tanah Laut memuat berbagai indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Tanah Laut dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Terkait dengan aktivitas ekonomi, pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menyediakan buku PDRB Kabupaten Tanah Laut baik menurut lapangan usaha maupun pengeluaran. Selama Periode 2014-2019, buku-buku tersebut selalu tersedia dan dapat diakses melalui situs BPS Kabupaten Tanah Laut. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor neto antar daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi terbaru telah menggunakan tahun dasar 2010 serta sudah menerapkan *konsep System of national Accounts* 2008 seperti yang telah direkomendasikan oleh *United Nations*. Tidak hanya data statistik yang bersumber dari Publikasi BPS, langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang memuat seluruh data hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan juga adanya Tanah Laut Integrasi Data dimana hasil pencapaian indikator kinerja yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan target indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat terkumpul dalam satu data integratif sehingga memudahkan dalam perencanaan di masa yang akan datang.

2.1.3.1.13 Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh Perangkat Daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam Pemetaan Urusan Persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-

Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per-bulannya.

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, 2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan Persandian dan Telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut.

2.1.3.1.14 Kebudayaan

Walaupun mayoritas penduduk Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh Suku Banjar dan Suku Jawa, namun terdapat beberapa suku bangsa lainnya seperti Suku Madura, Sunda, Bukit, Bakumpai, Mandar, dll. Suku Dayak yaitu suku bangsa asli di Kalimantan yang tersebar di beberapa lokasi. Salah satu lokasinya berada di Kabupaten Tanah Laut. Suku Dayak atau sering disebut Suku Dayak Maratus yang berada di Kabupaten Tanah Laut adalah Dayak Bukit. Penduduk Suku Dayak yang tinggal di pedalaman biasanya memiliki kebiasaan dan tradisi yang khas, seperti pola huniannya. Pola hunian utama Suku Dayak yaitu pola rumah tunggal berbentuk rumah panggung yang mengelompok dan pola hunian di balai dengan tata ruang seragam. Dengan berbagai suku yang tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut, maka berbagai budaya yang dimiliki

oleh masing-masing suku tersebut menjadi sebuah kekayaan yang bernilai bagi perkembangan seni budaya di Kabupaten Tanah Laut.

Kabupaten Tanah Laut juga memiliki tarian khas yaitu Tari Batatungkal, tarian ini diangkat dari upacara adat Suku Biaju dari Bajuin, upacara ini dilakukan untuk mengusir roh jahat yang mengganggu dan untuk memperoleh semangat batu agar mendapatkan hasil panen yang lebih berkah. Selain itu terdapat pula upacara adat Balian, upacara adat ini merupakan kegiatan tradisi yang menggambarkan aturan-aturan dari nenek moyang Suku Dayak Maratus dan bertujuan untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar kampungnya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pelaksanaan upacara adat ini dikelola oleh pemilik Belian yaitu meliputi Masni (Kepala Pimpinan Balian), Anang Idar, Nayan, Jainuddin sebagai penerjemahsaat penari belian dimasuki roh-roh nenek moyang Suku Dayak Maratus. Lokasi pelaksanaan acara adat Balian dilaksanakan di dalam balai kampung Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap (kalsel.kemenag.go.id).

Pada Tabel 2.64 dapat dilihat bahwa terdapat empat obyek wisata budaya di Kabupaten Tanah Laut yang tersebar di beberapa kecamatan. Kawasan cagar budaya Desa Riam Adungan yang berlokasi di Kecamatan Kintap, situs sejarah di Desa Tabanio Kecamatan Takisung, dan juga Bunker Jepang terletak di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin (Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036).

Tabel 2.64 Nama Obyek Wisata Budaya di Kabupaten Tanah Laut, 2019

No.	Nama Obyek Wisata	Lokasi
1.	Benteng Belanda Tabanio	Tabanio, Takisung
2.	Cagar Budaya Desa Riam Adungan	Riam Adungan, Kintap
3.	Bunker Jepang	Sungai Bakar, Bajuin

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

2.1.3.1.15 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah bahan pustaka yang disediakan untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu. Tujuan dari perpustakaan sendiri yaitu untuk meningkatkan angka melek huruf, meningkatkan peran budaya baca dalam menyerap pengetahuan, meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, dan juga sebagai salah satu penunjang keberlangsungan pendidikan. Kabupaten Tanah Laut memiliki satu unit perpustakaan umum yaitu Perpustakaan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang berlokasi di Angsau, Kecamatan Pelaihari.

2.1.3.1.16 Kearsipan

Berbagai macam kegiatan operasional maupun program kerja yang dijalankan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem pengarsipan yang baik agar dapat menyajikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Terlebih untuk menciptakan tata kelola administrasi yang baik juga diperlukan pemeliharaan dan pelestarian arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah perlu menyadari pentingnya arsip, sehingga akan mempermudah dalam penyelenggaraan program kearsipan.

Dalam menjalankan program-program tersebut pengalokasian anggaran dari pemerintah menjadi hal yang penting. Pada umumnya alokasi dana untuk bidang kearsipan menjadi satu dengan urusan perpustakaan, sehingga sulit untuk membedakan pos dana untuk kearsipan atau perpustakaan. Program-program yang ada di urusan perpustakaan antara lain program pengumpulan data kearsipan, program pemeliharaan jaringan informasi kearsipan, dan program penyelamatan dan pelestarian dokumen. Sedangkan indikator pencapaian bidang kearsipan dilihat dari persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dan juga dari peningkatan SDM pengelola kearsipan yaitu dengan menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Garis pantai Kabupaten Tanah Laut yang berbatasan dengan Laut Jawa menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup potensial, yang meliputi sektor perikanan, wisata, perhubungan laut, dan konservasi. Akan tetapi, potensi di bidang kelautan dan perikanan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga di masa mendatang melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai sumber devisa, pemenuh kebutuhan konsumsi masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Walaupun demikian kondisi perairan juga dipengaruhi oleh perubahan musim yaitu musim dari barat ke timur atau sebaliknya yang akan menyebabkan perubahan kondisi fisik seperti perubahan suhu, salinitas, gelombang, dan lain-lain.

Selain mengembangkan potensi yang ada pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab atas kelestarian sumberdaya perairan sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan perubahannya Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengamanatkan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Di dalam suatu ekosistem pesisir yang terdiri dari komponen hayati dan nirhayati saling berhubungan saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga ketika terjadi perubahan pada salah satu dari komponen tersebut akan berdampak pada keseluruhan baik dalam kesatuan struktur fungsional maupun dalam keseimbangannya. Oleh karena itu dalam menjamin kelestarian sumber daya alam juga perlu memperhatikan hubungan ekologis yang berlangsung diantara komponen-komponen sumber daya alam yang menyusun suatu sistem. Program utama pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya perairan yaitu dengan mempertahankan ekosistem pantai seperti hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, dan estuaria.

Kawasan konservasi atau lindung laut berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 yaitu meliputi kawasan konservasi tanaman bakau pesisir pantai dan Kawasan Suaka Margasatwa Batakan. Kawasan konservasi pesisir pantai ini berada di Kecamatan Bumi Makmur dengan luas lahan kurang lebih 267,97 Ha. Sedangkan Kawasan Suaka Margasatwa Batakan merupakan kawasan suaka alam Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, luas Kawasan Suaka Margasatwa Batakan kurang lebih 3.068,38 hektar, yang terdiri dari kawasan konservasi pesisir dan kawasan permukiman. Kawasan konservasi pesisir menurut peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan memiliki luas kurang lebih 443,8685 Ha. Selain kawasan suaka margasatwa Desa batakan Kecamatan Panyipatan juga memiliki kawasan taman wisata alam Pantai Batakan dengan luas 1.368,02 hektar.

Melihat produksi per jenis ikan pada perikanan tangkap laut, terdapat 4 jenis komoditas ikan yang paling banyak ditangkap nelayan adalah udang lainnya dengan produksi sebesar 9.035 ton, diikuti udang putih sebesar 5.892 ton, ikan Manyung 5.818, dan Ikan lainnya sebesar 5.457 ton. Data tersebut menunjukkan bahwa ada beragam jenis komoditas perikanan tangkap laut di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki nilai produksi tinggi terutama jenis udang-udangan, ikan demersal, dan ikan pelagis besar.

Tabel 2.65 Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut di Kabupaten Tanah Laut, 2021

No.	Jenis Ikan	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp Ribu)
1	Peperek	2.635	18.445.000
2	Manyung	5.818	116.360.000
3	Geret-Geret	-	-
4	Bambangan	858	42.900.000
5	Kakap Putih	1.624	56.840.000
6	Gulamah	2.812	42.180.000
7	Cucut	-	-
8	Pari	2.695	29.950.000
9	Bawal Hitam	-	-
10	Bawal Putih	1.855	55.650.000
11	Selar	2.633	26.330.000
12	Belanak	52	936.000
13	Kuro/Senangin	186	6.510.000
14	Teri	688	8.256.000
15	Tembang	78	624.000
16	Golak-golak/Perang	-	-
17	Tenggiri Papan	2.358	176.850.000
18	Tongkol	2.532	63.300.000
19	Tenggiri	2.722	272.000.000
20	Udang Windu	2.640	343.200.000
21	Udang Putih	5.892	353.520.000
22	Udang Lain	9.035	451.750.000
23	Sotong	27	405.000
24	Cumi-cumi	2.917	72.925.000
25	Kembung	778	19.700.000
26	Ikan Lainnya	5.457	68.212.500
27	Ikan Sebelah	17	221.000
28	Rajungan	3.645	328.050.000
29	Ikan Layur	-	-
Jumlah		59.964	2.555.114.500

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Jika dilihat dari sisi produksi per jenis ikan pada perairan umum, produksi ikan terbesar adalah komoditas betok/papuyu yaitu sebesar 759 ton, disusul oleh gabus sebesar 735 ton, sepat siam sebesar 592 ton, sepat rawa sebesar 561 ton, dan tawes sebesar 396,6 ton. Nilai produksi keseluruhan perikanan tangkap perairan umum pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 129,375 miliar. Secara rinci, jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap perairan umum pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.66 Jumlah & Nilai Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum di Kab. Tanah Laut, 2021

No.	Jenis Ikan	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp Ribu)
1.	Betok / Papuyu	759	30.360.000
2.	Baung	324	6.480.000
3.	Sepat Rawa	561	6.732.000
4.	Sepat Siam	592	8.880.000
5.	Gabus	735	36.750.000
6.	Lele	72	1.440.000
7.	Tawes	396,6	3.966.000
8.	Ikan Lainnya	350	2.800.000
9.	Udang Galah	494,6	24.730.000
10.	Udang Lainnya	178	4.450.000
11.	Lais	37,1	742.000
12.	Patin Jambal	81,8	2.045.600
Jumlah		4.581,1	129.375.600

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Selain perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum Kabupaten Tanah Laut juga memiliki produksi perikanan yang berasal dari perikanan budidaya. Jenis budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut adalah tambak, kolam, keramba, dan jaring apung. Pada tahun 2021 produksi tambak adalah sebesar 469,82 ton dimana produksi berasal dari Kecamatan Bumi Makmur, Kintap sebesar 390,23 ton, dan Kurau sebesar 185,42. Untuk kolam, produksinya berasal dari seluruh kecamatan dengan produksi total mencapai 272,39 ton. Produksi kolam terbesar berasal dari Kecamatan Pelaihari yang mencapai 53,95 ton, diikuti Kecamatan Batu Ampar sebesar 42,62 ton, dan Kecamatan Bati-bati sebesar 37,32 ton. Pada budidaya keramba, produksinya sebesar 34,38 ton dan berasal dari Kecamatan Bati-bati, sedang produksi jaring apung sebesar 34,55 ton berasal dari Kecamatan Pelaihari.

Tabel 2.67 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2021

No.	Kecamatan	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung
1.	Panyipatan	-	22,72	-	-
2.	Takisung	-	26,26	-	-
3.	Kurau	185,42	26,03	-	-
4.	Bumi Makmur	469,82	26,27	-	-
5.	Bati-Bati	-	37,31	34,38	-
6.	Tambang Ulang	-	10,77	-	-
7.	Pelaihari	-	53,95	-	34,55
8.	Bajuin	-	4,58	-	-

No.	Kecamatan	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung
9.	Batu Ampar	-	42,62	-	-
10.	Jorong	-	16,55	-	-
11.	Kintap	390,23	5,33	-	-
Jumlah		1.045,47	272,39	34,38	34,55

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Pada budidaya tambak, jenis ikan yang diproduksi adalah bandeng yaitu sebesar 826,6 ton, disusul udang windu sebesar 218,9 ton. Untuk budidaya kolam, jenis ikan yang diproduksi adalah lele (130,9 ton), patin (74,5 ton), nila (28,9 ton), dan ikan mas (21,08 ton). Pada budidaya keramba, komoditas yang dikembangkan adalah ikan mas dan nila dengan produksi masing-masing sebesar 15,6 dan 18,6 ton, sedangkan ikan yang dikembangkan pada budidaya jaring apung adalah nila dengan produksi sebesar 18,6 ton. Nilai produksi budidaya tambak pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 33,925 miliar, kolam sebesar Rp 4,851 miliar, keramba sebesar Rp 999 juta, dan jaring apung sebesar Rp 967 Juta.

Tabel 2.68 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2021

No.	Kecamatan	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung
1.	Bandeng	826,6	-	-	-
2.	Udang Windu	218,9	-	-	-
3.	Udang Putih	-	-	-	-
4.	Ikan Mas	-	21,08	15,6	-
5.	Nila	-	28,9	18,6	18,6
6.	Lele	-	130,9	-	-
7.	Patin	-	74,5	-	-
8.	Lainnya	-	16,9	-	-
Jumlah		1.045,5	272,28	34,2	18,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Rumah tangga perikanan yang terlibat dalam kegiatan perikanan budidaya pada tahun 2021 adalah sebanyak 662 unit. Kecamatan yang paling banyak memiliki rumah tangga perikanan budidaya adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 131 unit, disusul Kecamatan Bati-Bati sebanyak 83 unit, dan Kecamatan Bumi Makmur sebanyak 81 unit. Dari sisi jenis budidaya, jumlah rumah tangga perikanan terbanyak adalah rumah tangga perikanan budidaya kolam yaitu sebanyak 511 unit, disusul rumah tangga perikanan budidaya tambak sebesar 107 unit, rumah tangga perikanan budidaya jaring apung sebanyak 31 unit, dan rumah tangga perikanan budidaya keramba sebanyak 13 unit.

Tabel 2.69 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2021

No.	Kecamatan	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung
1.	Panyipatan	-	43	-	-
2.	Takisung	-	70	-	-
3.	Kurau	21	55	-	-
4.	Bumi Makmur	26	55	-	-
5.	Bati-Bati	-	70	13	-
6.	Tambang Ulang	-	4	-	-
7.	Pelaihari	-	100	-	31
8.	Bajuin	-	30	-	-
9.	Batu Ampar	-	43	-	-
10.	Jorong	-	31	-	-
11.	Kintap	60	10	-	-
Jumlah		107	511	13	31

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

2.1.3.2.2 Pariwisata

Secara makro optimalisasi sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu industri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan taraf hidup, yang pada akhirnya secara simultan dapat menggerakkan sektor-sektor produksi lain. Sementara itu menurut Bappenas (2015), arah kebijakan pengembangan sektor pariwisata nasional meliputi pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan agar mampu bersaing di dalam maupun luar negeri, pembangunan industri pariwisata nasional dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk maupun jasa pariwisata nasional di setiap lokasi pariwisata yang ingin dipasarkan, dan pembangunan kelembagaan pariwisata yaitu melalui pembangunan sumberdaya manusia dan organisasi kepariwisataan nasional.

Keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut merupakan potensi yang cukup besar untuk dijadikan tujuan wisata, terlebih terdapat berbagai jenis obyek wisata yang dapat dikunjungi seperti wisata pantai, wisata sejarah dan budaya, wisata alam, dan wisata taman. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Laut (2022), hingga saat ini terdapat 25 obyek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Walaupun demikian masih ada beberapa obyek wisata yang belum dikunjungi para wisatawan yang mungkin disebabkan oleh kurangnya promosi dan juga kurang memadainya sarana dan prasarana yang mendukung.

Hampir di setiap kecamatan memiliki tempat wisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, alangkah lebih baik bila destinasi pariwisata tersebut dipasarkan secara bersama-sama terutama destinasi-destinasi wisata unggulan seperti Pantai Takisung dan Pantai Batakan. Selain pemasaran juga perlu dilakukan beberapa upaya seperti membangun akses menuju kawasan wisata, sarana pendukung wisata misalnya hotel dan restoran, serta mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas. Sehingga harapannya dengan pengembangan ekonomi kreatif dibidang pariwisata akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Tanah Laut. Berikut adalah daftar obyek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.70 Nama Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut, 2021

No.	Nama	Lokasi	Jenis	Aksesibilitas (dari Kota Pelaihari)
1	Pantai Takisung	Takisung, Takisung	Wisata bahari	20 km
2	Pantai Batakan	Batakan, Panyipatan	Wisata bahari	60 km
3	Gunung Kayangan	Ambungan, Pelaihari	Alam	10 km
4	Taman Mina Tirta	Angsau, Pelaihari	Buatan	3 km
5	Air Terjun Bajuin	Kec. Bajuin	Alam	15 km
6	Pantai Swarangan	Kec. Jorong	Alam	52 km
7	Pantai Batu Lima	Kuala Tambangan Kec. Takisung	Alam	35 km
8	Pantai Kintap	Desa Muara Kintap	Alam	90 km
9	Pantai Turki	Kec. Jorong	Alam	45 km
10	Pantai Asmara	Desa Asam-asam	Alam	50 km
11	Pantai Cemara 1	Desa Muara Kintap	Alam	90 km
12	Pantai Cemara 2	Desa Mjara Kintap	Alam	90 km
13	Pantai Tanjung Dewa	Desa Tanjung Dewa	Alam	35 km
14	Pulau Datu	Desa Tanjung Dewa	Alam	35 km
15	Gunung Birah	Desa Kandangan Lama	Alam	20 km
16	Taman Labirin	Desa Ambungan	Alam	10 km
17	Desa Wisata Karang Taruna	Desa Karang Taruna	Wisata Edukasi	10 km
18	Taman Bunga Meisya	Desa Telaga Langsung	Wisata Buatan	15 km
19	Wisata Mangrove	Desa Pagatan Besar	Wisata Mangrove	25 km
20	Kerbau Rawa	Desa Benua Raya	Kerbau Rawa	20 km
21	Taman Hijau Rindang	Desa Takisung	Taman, Pantai	20 km
22	Danau Sari Ambun	Desa Imban, Bentok	Danau, Bentok	10 km
23	Bukit Teletubbies	Desa Tampang	Gunung	10 km
24	Surai Bekantan Panjaratan	Desa Panjaratan	Susur Sungai	17 km
25	Wisata Mahuni	Desa Padang	Rekreasi	26 km

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Data wisatawan asing dan domestik di tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya wisatawan domestik sepanjang tahun cukup berfluktuatif. Pengunjung domestik tertinggi di tahun 2021 pada bulan Oktober yaitu sebanyak 42.856 wisatawan, disusul pada bulan

Juni sebanyak 33.836 wisatawan, dan Januari sebanyak 31.900 wisatawan. Sedangkan pengunjung terendah pada bulan Februari yang hanya sebanyak 3.640 wisatawan.

Pada tahun 2021, obyek wisata yang diminati di Kabupaten Tanah Laut adalah pantai. Jumlah kunjungan tertinggi wisatawan di Kabupaten Tanah Laut adalah di Pantai Batakan yang dikunjungi 50.256 wisatawan. Obyek wisata selanjutnya yang menjadi favorit adalah Pantai Takisung yaitu sebanyak 45.630 wisatawan, dan Air Terjun Bajuin sebanyak 29.911 wisatawan.

Tabel 2.71 Jumlah Wisatawan Asing dan Wisatawan Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Tanah Laut, 2021

No.	Bulan	Wisatawan Domestik	Wisatawan Asing
1.	Januari	31.900	-
2.	Februari	3.640	-
3.	Maret	18.616	-
4.	April	10.955	-
5.	Mei	17.090	-
6.	Juni	33.836	-
7.	Juli	29.791	-
8.	Agustus	4.213	-
9.	September	25.771	-
10.	Oktober	42.856	-
11.	November	18.358	-
12.	Desember	10.857	-
Jumlah		247.613	-

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Tabel 2.72 Jumlah Kunjungan Objek Wisata Kabupaten Tanah Laut, 2021

NO	NAMA OBJEK WISATA	JUMLAH
Dikelola Pemda (Dinas Pariwisata)		
1	Gunung Kayangan	0
2	Air Terjun Bajuin	29,911
3	Taman Mina Tirta	
	- Sepeda Air	0
	- Kereta Wisata	80
	- Orchid	0
	- Hutan Kota	0
4	Pantai Takisung	45,630
5	Pantai Batakan	50,256
6	Pantai Swarangan	0
7	Pantai Batu Lima	0

Dikelola Oleh Masyarakat / Desa		
8	Pantai Kintap	97
9	Pantai Cemara Satu	0
10	Pantai Cemara Dua	0
11	Pantai Tanjung Dewa	235
12	Pantai R.Piungan	0
13	Pulau Datu	446
14	Kerbau Rawa	400
15	Mangrove Pagatan Besar	14,372
16	Gunung Birah	4,901
17	Dewa Katar	25
18	Surai Bekantan Panjaratan	424
19	Wisata Mahuni	4,200
Dikelola oleh Pribadi		
20	Pantai Karindangan	963
21	Pantai THR	1,795
22	Pantai Turki	29,900
23	Pantai Asmara	8,480
24	Taman Permana	1,556
	TOTAL JUMLAH	193,671

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, 2022

2.1.3.2.3 Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor penting karena memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan pokok atau primer bagi kehidupan manusia di dunia, termasuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Dalam arti luas sektor pertanian tidak hanya mencakup kegiatan dalam hal tanaman pangan seperti jagung dan padi, tetapi juga hortikultura (sayur dan buah), perkebunan, dan peternakan. Pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan tanaman pangan memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Tanah Laut. Lebih lagi, dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan juga akan terus meningkat.

Tanaman Pangan

Perkembangan sektor pertanian tidak bisa dipisahkan dengan aspek luas lahan karena suatu kegiatan pertanian pastilah membutuhkan sejumlah lahan untuk memproduksi hasil pertanian dari kegiatan tersebut. Luas lahan sawah di Kabupaten Tanah Laut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sawah irigasi dan non irigasi (tadah hujan). Secara keseluruhan, luas lahan sawah di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 mencapai 71.719 ha yang terdiri dari sawah irigasi seluas 6.637 ha dan sawah non irigasi

seluas 65.082 ha. Sawah non irigasi di Kabupaten Tanah laut tersebar di seluruh kecamatan, sedangkan sawah irigasi hanya terdapat di 7 kecamatan. Luas lahan sawah terbesar berada di Kecamatan Pelaihari yang mencapai 1.936 ha, sedangkan sawah non irigasi terluas berada di Kecamatan Bati-bati yaitu seluas 11.501 ha. Berdasarkan data luas sawah pada tabel dibawah maka dapat dikatakan bahwa sawah non irigasi mempunyai wilayah yang sangat luas dibandingkan sawah irigasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa infrastruktur pengairan sangat diperlukan, sehingga pengairan sawah tidak akan hanya bergantung pada air dari alam yang nantinya dapat digunakan untuk mendorong peningkatan produksi tanaman pangan dan kemandirian pangan.

Tabel 2.73 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Tanah Laut (ha), 2021

No.	Kecamatan	Jenis Pengairan		Jumlah
		Irigasi	Non Irigasi	
1.	Panyipatan	1.389	7.900	9.289
2.	Takisung	1.625	5.646	7.271
3.	Kurau	-	8.257	8.257
4.	Bumi Makmur	-	4.757	4.757
5.	Bati-Bati	-	11.500	11.500
6.	Tambang Ulang	-	6.530	6.530
7.	Pelaihari	1.936	11.051	12.987
8.	Bajuin	1.249	5.133	6.382
9.	Batu Ampar	122	632	754
10.	Jorong	141	2.538	2.679
11.	Kintap	175	945	1.120
Jumlah		6637	64.889	71.526

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Selain lahan sawah, Kabupaten Tanah Laut juga memiliki lahan tegal/kebun, ladang/huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan. Berdasarkan data luas lahan yang ada, lahan yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar sudah dimanfaatkan. Hal ini terlihat pada luas lahan yang sementara tidak digunakan mempunyai luas yang kecil yaitu sebesar 8.089,64 ha dibandingkan jumlah ladang yaitu sebesar 9.770 ha. Secara keseluruhan, luas lahan tegal/kebun di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 sebesar 34.166 ha. Kecamatan dengan luas lahan tegal/kebun terbesar berturut-turut adalah Kecamatan Takisung dengan luas 7.585 ha, disusul Kecamatan Jorong dengan luas 5.972 ha, dan Kecamatan Panyipatan dengan luas 5.507 ha. Sementara itu, luas ladang/huma di Kabupaten Tanah laut pada tahun 2021 adalah sebesar

9.770 ha. Luasan ladang/huma terbesar berada di Kecamatan Kintap yaitu sebesar 1.830 ha, diikuti oleh Kecamatan Pelaihari sebesar 1.813 ha, dan Kecamatan Bajuin sebesar 1.297 ha.

Tabel 2.74 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2021

No.	Kecamatan	Jenis Lahan		
		Tegal/Kebun	Ladang/huma	Sementara Tidak Diusahakan
1.	Panyipatan	5.507	690	200
2.	Takisung	7.585	-	2.335
3.	Kurau	450	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-	-
5.	Bati-Bati	1.500	1.120	1.542
6.	Tambang Ulang	1.904	1.295	1.445
7.	Pelaihari	3.329	1.813	205
8.	Bajuin	1.289	1.297	227
9.	Batu Ampar	5.500	833	296,64
10.	Jorong	5.972	892	1.139
11.	Kintap	1.130	1.830	700
Jumlah		34.166	9.770	8.089,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2021

Menurut jenis tanaman pangan yang dihasilkan, tanaman pangan yang dibudidayakan penduduk Kabupaten Tanah Laut diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Padi merupakan salah satu bahan makanan terpenting yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Padi, terutama padi sawah merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Tanah Laut. Luas panen dan produksi padi menurut periode panen di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019-2021 tersaji dalam table 2.75 berikut:

Tabel 2.75 Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Tanah Laut, 2019-2021

Jenis	Luas Panen (Ha)			Produksi (ton GKG)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Padi	28.454	24.729	21.015	117.728	97.019	79.662

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan, 2022

Salah satu tanaman pangan lain yang dibudidayakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut adalah jagung. Sama seperti padi sawah, jagung juga menjadi salah satu komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan yang memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Tanah Laut setelah padi. Luas panen jagung seluas 20.013,8 ha. Kecamatan dengan luas panen jagung tertinggi adalah Kecamatan Panyipatan yaitu seluas 7.586 ha.

Tabel 2.76 Luas Panen Jagung Menurut Kecamatan di Kab. Tanah Laut, 2021

No.	Kecamatan	Jagung
		Luas Panen (ha)
1.	Panyipatan	7.586
2.	Takisung	1.100
3.	Kurau	51
4.	Bumi Makmur	-
5.	Bati-bati	378
6.	Tambang Ulang	570
7.	Pelaihari	3.217
8.	Bajuin	907,8
9.	Batu Ampar	3.984
10.	Jorong	1.610
11.	Kintap	610
Jumlah		20.013,8

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Tanaman Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang potensial menjadi tanaman andalan adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman karet, termasuk luas area yang belum menghasilkan dan rusak, mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2017-2021. Luas area perkebunan karet pada tahun 2020 adalah seluas 9.964 ha dan menurun tahun 2021 menjadi seluas 14.892 ha. Pada tahun 2020, produksi karet adalah sebesar 6.722,53 ton dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 13.267,59 ton. Produksi dan luas areal yang ditunjukkan pada tabel-tabel perkembangan luas areal dan produksi tanaman perkebunan di bawah tidak termasuk luas dan produksi perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta.

Tabel 2.77 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Karet, Kelapa, dan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021

Tahun	Karet		Kelapa		Kelapa Sawit	
	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
2017	14.746	6.437,2	1.034	883,96	11.821	17.109,7
2018	9.678	7.250,82	902	889,19	18.953,05	18.953,05
2019	14.966	7.619	911	822,44	11.916	21.975,3
2020	14.964	6.722,53	910	761,1	11.735	22.105,15
2021	14.892	13.267,59	896,5	1.631,74	12.453	49.936

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Komoditi lainnya seperti kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan potensial di Kabupaten Tanah Laut. Luas areal maupun produksi kelapa sawit selama periode 2017-2021 mengalami peningkatan pada tahun 2021. tahun 2020 sebesar 22.105,15 ton sedangkan di tahun 2021 yaitu 49.936 ton.

Sama hal dengan produksi dan luas areal komoditi kelapa yang terus meningkat, luas areal dan produksi komoditi kelapa cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2020, luas areal komoditi kelapa adalah seluas 910 ha dengan produksi sebesar 761,1 ton. Pada tahun 2021 produksi kelapa meningkat mencapai 1.631,74 ton dengan luas areal 896,5 ha.

Peternakan

Kabupaten Tanah Laut dikenal sebagai salah satu pusat peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis ternak yang dibudidayakan penduduk di Kabupaten Tanah Laut meliputi jenis ternak besar (sapi dan kerbau), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), dan ternak unggas (ayam buras, ayam ras, dan itik). Selama periode 2017-2021, populasi ternak besar, ternak kecil, maupun ternak unggas cenderung berfluktuatif. Populasi sapi perah pada tahun 2020 adalah sebanyak 38 ekor, selanjutnya menurun menjadi 23 ekor pada tahun berikutnya. Populasi sapi potong pada tahun 2020 adalah sebanyak 102.015 ekor dan mengalami penurunan pada tahun 2021 populasi sapi potong menjadi 77.045 ekor. Selama periode 2017-2021, populasi kerbau terbanyak terjadi pada tahun 2019 dengan populasi sebanyak 4.166 ekor. Pada tahun 2020, populasi kerbau menjadi 4.110 ekor. Pada tahun 2021, populasi kerbau di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 1.645 ekor.

Tabel 2.78 Perkembangan Populasi Ternak dan Unggas di Kab. Tanah Laut (ekor), 2017-2021

Jenis Ternak	Populasi (ekor)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ternak Besar					
Sapi Perah	24	35	34	38	23
Sapi Potong	75.641	85.086	90.064	102.015	77.045
Kerbau	3.692	4.072	4.166	4.110	1.645
Ternak kecil					
Kambing	20.808	25.776	27.453	29.340	29.777
Domba	178	137	95	106	72
Babi	-	-	-	-	
Ternak Unggas					
Ayam Buras	2.426.741	2.584.797	2.734.522	3.936.103	5.809.199
Ayam Petelur	6.729.689	7.394.025	7.783.193	9.017.154	10.477.956
Ayam Pedaging	51.375.593	48.342.321	71.115.644	43.908.725	38.162.194
Itik	192.333	198.282	208.235	247.514	293.552

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Populasi ternak kecil seperti kambing mengalami peningkatan di sdetiap tahunnya dibandingkan tahun sebelumnya. Populasi kambing terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 29.777 ekor, sementara untuk domba populasinya cenderung mangalami penurunan. Pada tahun 2017-2019, populasi domba mengalami penurunan sampai 95 ekor, namun pada 2020 kembali meningkat menjadi 106 ekor dan turun Kembali pada tahun 2021 menjadi 72 ekor. Berbeda dengan ternak besar dan kecil yang rata-rata mengalami kenaikan dan penurunan pada populasinya, populasi jenis unggas cenderung mengalami peningkatan selama periode 2017-2021. Pada tahun 2021 populasi ayam buras dan ayam ras adalah 5.809.199 ekor ayam buras, 10.477.956 ekor ayam petelur, dan 38.162.194 ekor ayam pedaging. Sementara itu, populasi itik di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan pada priode 2017-2021, menjadi 293.552 pada tahun 2021

2.1.3.2.4 Perdagangan

Unit usaha perdagangan di Kabupaten Tanah Laut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu perdagangan besar, perdagangan menengah, dan perdagangan kecil. Jumlah pedagang besar pada tahun 2021 adalah sebanyak 2 unit usaha yaitu di Kecamatan Bati-Bati Untuk perdagangan besar, jumlahnya pada tahun 2021 untuk perdagangan menengah adalah sebanyak 13 unit yang tersebar di beberapa kecamatan. Sebagai pusat perekonomian Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Pelaihari memiliki jumlah unit perdagangan menengah terbesar yaitu sebanyak 4 perdagangan unit, sama hal seperti

Kecamatan Bati-bati yaitu sebanyak 4 unit. Untuk pedagang kecil, jumlahnya pada tahun 2021 adalah sebanyak 131 unit. Sama seperti pada pedagang menengah, unitnya tersebar di beberapa kecamatan dengan kecamatan yang paling banyak memiliki unit perdagangan kecil adalah Kecamatan Pelaihari (63 unit).

Tabel 2.79 Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2021

No.	Kecamatan	Perdagangan Besar	Perdagangan Menengah	Perdagangan Kecil
1.	Panyipatan	-	-	6
2.	Takisung	-	2	5
3.	Kurau	-	-	1
4.	Bumi Makmur	-	-	1
5.	Bati-bati	2	4	10
6.	Tambang Ulang	-	-	-
7.	Pelaihari	-	4	63
8.	Bajuin	-	-	3
9.	Batu Ampar	-	1	13
10.	Jorong	-	1	16
11.	Kintap	-	1	13
Jumlah		2	13	131

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

2.1.3.2.5 Transmigrasi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemerataan penduduk yaitu dengan perpindahan penduduk dari kawasan padat penduduk ke kawasan yang jarang penduduknya melalui program transmigrasi. Transmigrasi lokal yaitu transmigrasi yang dilakukan masih dalam satu provinsi dan biasanya dilakukan secara massal. Transmigrasi swakarya adalah jenis transmigrasi yang bertujuan untuk memberikan pekerjaan dan jaminan hidup selama beberapa bulan kepada transmigran. Sedangkan transmigrasi bedol desa adalah transmigrasi yang dilakukan bersama-sama oleh penduduk satu desa beserta aparatur pemerintahan dari desa tersebut. Tujuan dari transmigrasi selain untuk pemerataan penduduk adalah untuk penyediaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup para transmigran, serta pemerataan pembangunan. Transmigrasi di Kabupaten Tanah Laut terakhir berjalan pada tahun 2008 dengan jumlah transmigran sebesar 100 KK.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur adalah salah satu faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah, karena dengan infrastruktur yang baik akan mempermudah kehidupan suatu wilayah. Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur jua pada akhirnya akan mendorong pekonomian daerah kerana adanya kemudahan aksesibilitas.

2.1.4.2.1 Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut seluas 3.631,35 km². Rencana Kawasan budidaya yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas seluas 5.204,96 ha di Kecamatan Kintap, hutan produksi tetap seluas 68.764,87 ha, dan hutan produksi konversi seluas 9.739,52 ha. Untuk kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tanah Laut meliputi kawasan pertanian tanaman pangan yang terdiri dari kawasan pertanian lahan basah seluas 42.322,38 ha, kawasan pertanian lahan kering seluas 44.904,74 ha, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 39.425,54 ha, dan proyeksi untuk cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 2.680,82 ha. Kawasan hortikultura di Kabupaten Tanah Laut tersebar di 10 kecamatan dengan luasan keseluruhan sebesar 786 ha. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan pusat agropolitan di Kecamatan Pelaihari, Batu Ampar, Panyipatan, dan Kurau. Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut seluas 106.233,30 ha yang tersebar di seluruh kecamatan termasuk Kawasan agropolitan. Kawasan peternakan yang dikembangkan merupakan pengembangan komoditas sapi, sapi perah, kerbau rawa, dan kerbau darat.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebesar kurang lebih 3.969,35 ha, termasuk didalamnya kawasan Minapolitan seluas kurang lebih 530,95 ha terdiri atas: (1) perikanan budidaya air tawar meliputi jenis ikan introduksi dan jenis ikan lokal tersebar di setiap kecamatan; (2) perikanan budidaya air laut meliputi ikan, udang, kepiting, kerang-kerang, serta rumput laut di Kecamatan Kintap, Jorong, Panyipatan, Takisung,

Kurau, dan Bumi Makmur; dan (3) perikanan budidaya air payau meliputi udang, bandeng dan kepiting terdapat di Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Takisung, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Kintap. Kawasan pengolahan hasil perikanan meliputi industri kecil rumah tangga berbasis minapolitan terdapat di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan; dan Kawasan konservasi seluas kurang lebih 3.080,09 ha terdapat di Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung, dan Kecamatan Kurau.

2.1.4.2.2 Luas Wilayah Industri

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 kawasan industri atau pusat kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Kecamatan Jorong. Selain berfungsi sebagai kawasan industri, Kecamatan Jorong juga berfungsi sebagai pusat kawasan industri berat dan pusat kawasan pertambangan. Kawasan ekonomi khusus ini dibentuk untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, impor, dan perdagangan dalam rangka mendorong perekonomian suatu wilayah. Lebih dari itu kawasan ekonomi khusus juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah, dan juga membangun daya saing dengan memanfaatkan potensi wilayah yang dimiliki. Sedangkan kawasan industri bertujuan untuk mengendalikan tata ruang, meningkatkan upaya industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri dan investasi, serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait. Komoditi unggulan industri pengolahan adalah industri pengolahan makanan yang memiliki jumlah perusahaan, tenaga kerja, dan nilai produksi terbanyak di Kabupaten Tanah Laut. Walaupun jumlah investasi dan nilai produksi terbesar berada di Kecamatan Bati-Bati lalu setelah itu disusul oleh kecamatan Jorong. Namun demikian, dengan adanya penetapan Kecamatan Jorong sebagai kawasan industri diharapkan kedepannya mampu bersaing dengan Kecamatan Bati-Bati.

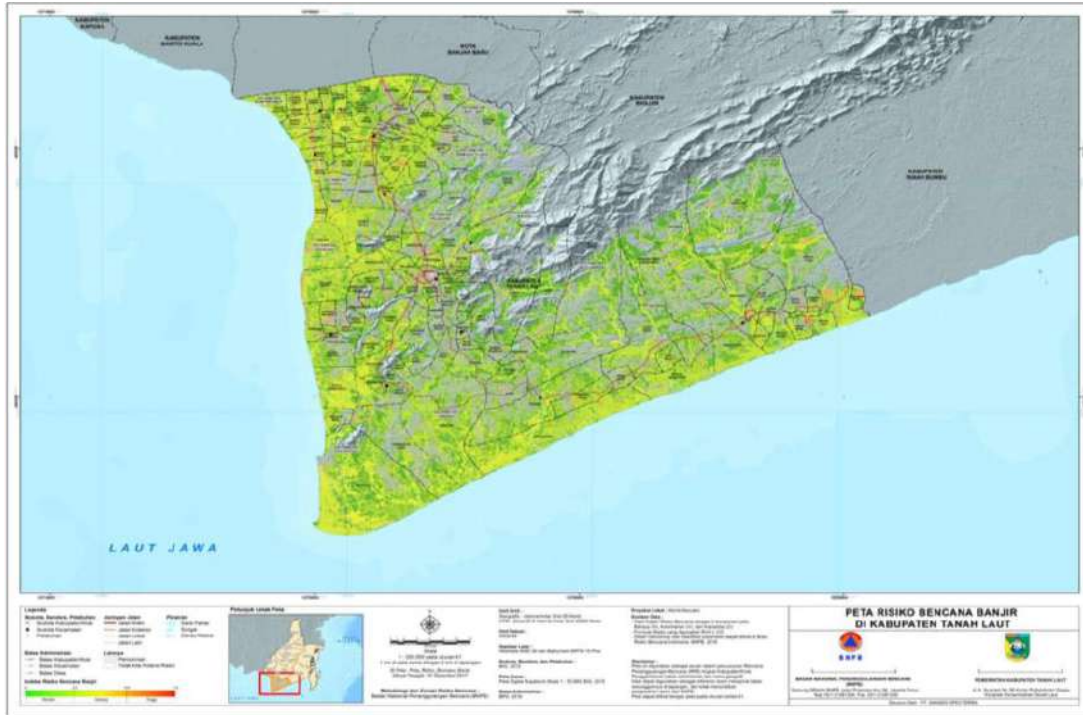
Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 10.878,50 ha yang terdiri atas kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah, dan kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga. Rencana kawasan

peruntukan industri besar meliputi industri pertambangan dan perkebunan di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap. Rencana kawasan peruntukan industri menengah terdiri dari pengembangan industri pengolahan dan industri pertanian di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang dan pengembangan industri pengolahan hasil laut sebagai penunjang minapolitan di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang. Rencana kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.

2.1.4.2.3 Luas Wilayah Kebanjiran dan Kekeringan

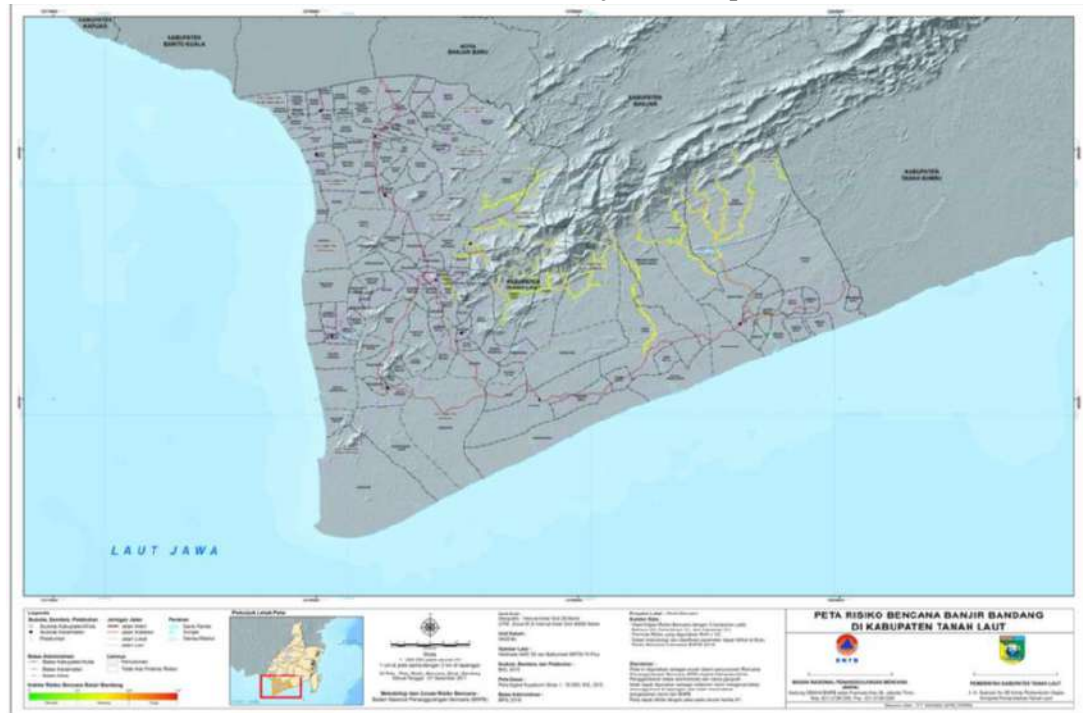
Kawasan potensi rawan banjir adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi (a) Kecamatan Pelaihari terdapat di Desa Panjaratan; (b) hampir semua desa di Kecamatan Kurau; (c) Kecamatan Bati-Bati di Desa Benua Raya dan Bati-Bati; (d) Kecamatan Takisung di Desa Tabanio, Kuala Tambangan, Takisung, Gunung Makmur, Benua Tengah, dan Pagatan Besar; (e) Kecamatan Jorong di Desa Sabuhur, Jorong, Asam-Asam, Swarangan, dan Muara Asam-Asam; (f) Kecamatan Panyipat di Desa Kuringkit, Batu Mulya dan Bumi Asih; (g) Kecamatan Kintap di Desa Kintap, Kintapura, Riam Adungan, Muara Kintap, Salaman, Kintap Kecil, dan Pasir Putih; (h) Kecamatan Tambang Ulang di Desa Tambang Ulang; (i) Kecamatan Batu Ampar; (j) Kecamatan Bajuin di Desa Bajuin, Kunyit, dan Sungai Bakar; dan (k) hampir semua desa di Kecamatan Bumi Makmur. Ancaman bahaya banjir di Kabupaten Tanah Laut termasuk pada kelas tinggi dengan areal yang terdampak bisa mencapai 182.755 ha.

Untuk bencana kekeringan, potensi bahayanya termasuk dalam kategori sedang dengan luasan terdampak dapat mencapai 363.135 ha. Potensi penduduk yang terpapar kekeringan adalah sebanyak 338.291 jiwa dimana kelompok umur rentan yang terpapar mencapai 23.809 jiwa, penduduk miskin sebanyak 56.698 jiwa, dan penduduk cacat sebanyak 802 jiwa. Potensi kerugian akibat kekeringan di Kabupaten Tanah Laut dapat mencapai Rp 2,12 miliar dengan potensi kerusakan lingkungan seluas 66.583 ha. Di satu sisi, kelas ketahanan daerah dalam menghadapi kekeringan masih dalam kategori sedang dengan kelas kesiapsiagaan yang rendah sehingga kelas kapasitas daerah masih dalam kategori rendah.



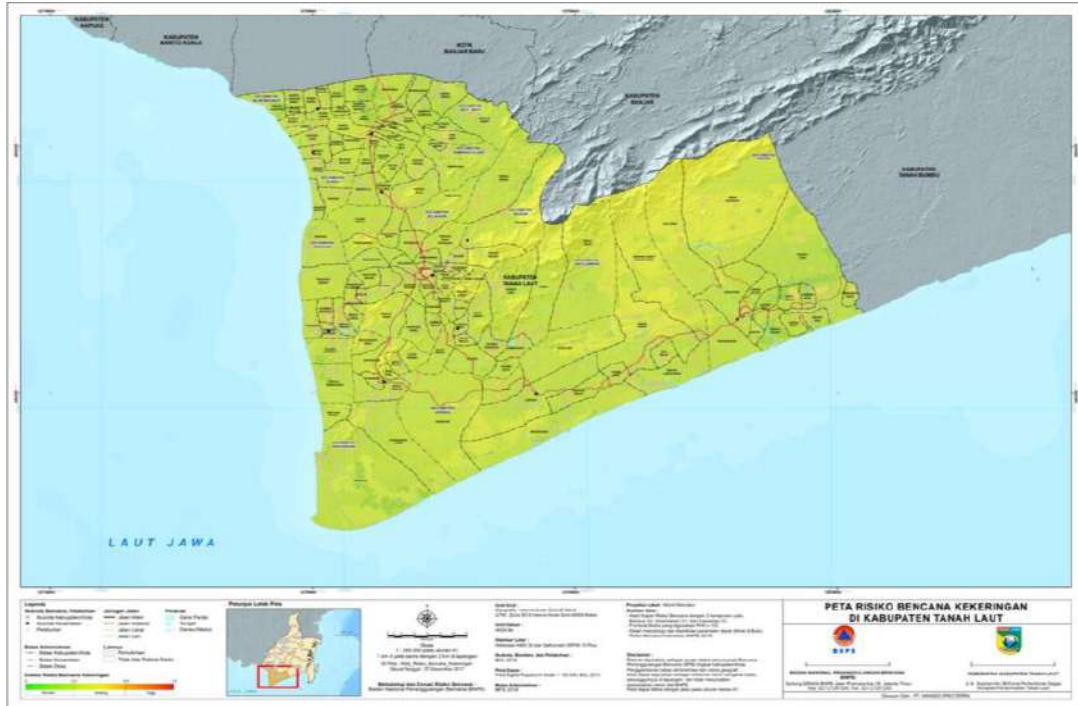
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.17 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Laut



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.18 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tanah Laut



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.19 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Tanah Laut

2.1.4.2.4 Luas Wilayah Perkotaan

Pemerintah Kabupaten telah menyusun Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut 2016-2036. Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah wilayah yang kegiatan utamanya bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sistem perkotaan terdiri dari Pusat kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pusat kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Pelaihari yaitu sebagai Ibukota Kabupaten Tanah Laut dengan luas daerah perkotaan sekitar 60 km². Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yakni Perkotaan Bati-Bati sebagai salah satu Kota Satelit Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Perkotaan Banjar Bakula dengan luas perkotaan kurang lebih 28 km², dan Perkotaan Jorong sebagai Kawasan Strategis Nasional Jorong sebagai kawasan industri, luas Perkotaan Jorong kurang lebih 76 km². Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri dari Perkotaan Takisung dan Kintap. Perkotaan Takisung berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat kegiatan baik itu pertanian, perkebunan, perdagangan maupun jasa dalam skala kecamatan, dan juga

sebagai pelayanan kegiatan pariwisata di beberapa desa untuk skala lokal dan provinsi. Luas kawasan perkotaan takisung sekitar 45 km². Sedangkan Perkotaan Kintap berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, perdagangan dan jasa skala kabupaten dan beberapa kecamatan, luas Perkotaan Kintap sekitar 48 km². Kabupaten Tanah Laut juga menetapkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL menurut RTRW Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Desa Kurau Kecamatan Kurau, Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur, Desa Tambang Kecamatan Tambang Ulang, Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar, Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan. Dan Desa Bajuin Kecamatan Bajuin.

2.1.4.2.5 Fasilitas Jasa Perbankan

Fasilitas jasa perbankan merupakan hal yang penting dalam mendukung aspek daya saing daerah. Perbankan memiliki peran penting yakni memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait dengan transaksi keuangan. Selain itu, bank juga memberikan fasilitas penyimpanan dana serta penyaluran dana kepada masyarakat. Sehingga bank dapat menjadi salah satu pihak yang membantu perputaran roda perekonomian suatu daerah. Di Kabupaten Tanah Laut, terdapat 8 bank nasional yang beroperasi yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank BTPN, Bank Danamon, Bank Kalsel, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah baik berupa bank cabang, cabang pembantu, atau bank unit.

Tabel 2.80 Jumlah Bank di Kabupaten Tanah Laut, 2021

No.	Nama Bank	Jumlah (unit)	Jenis dan Lokasi
1.	BNI	2	Kantor Kas BNI KK Asam-Asam
			Kantor Bank BNI KCP Pelaihari
2.	BRI	16	Kantor Kas BRI Teras Pasar Batu Ampar
			Kantor Kas BRI Teras Sarang Halang
			Kantor Kas BRI Teras Angsau
			Kantor Kas BRI Teras Nusa Indah
			Kantor Kas BRI Teras Pasar Pelaihari
			Kantor Kas BRI Teras RSUD H. Boedjasin
			BRI Teras Keliling
			KCP Bank BRI Unit Sungai Cuka
			KCP Bank BRI Unit Kintap
			KCP Bank BRI Unit Bati-Bati
			KCP Bank BRI Unit Gagah
			KCP Bank BRI Unit Pelaihari Kota
			KCP Bank BRI Unit Takisung
			KCP Bank BRI Unit Jorong
KCP Bank BRI Unit Asam-Asam			
Kantor Cabang BRI Pelaihari			

No.	Nama Bank	Jumlah (unit)	Jenis dan Lokasi
3.	BTN	7	Kantor Kas BTN Pelaihari
			Kantor Kas BTN Takisung
			Kantor Kas BTN Kurau
			Kantor Kas BTN Kintap
			Kantor Kas BTN Tajau Pecah
			Kantor Kas BTN Batu Tungku
			Kantor Kas BTN Bat-Bati
4.	Bank Mandiri	2	Kantor Fungsional Bank Mandiri Pasar Pelaihari
			KCP Bank Mandiri Pelaihari
5.	Bank Syariah Indonesia	1	KCP Bank Syariah Indonesia
6.	Bank Kalsel	8	KCP Bank Kalsel Unit Asam-Asam
			KCP Bank Kalsel Unit Bati-Bati
			KCP Bank Kalsel Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
			Bank Kalsel Keliling
			Layanan Syariah Bank Kalsel KCP Pemkab Tanah Laut
			Layanan Syariah Bank Kalsel LS Unit Asam-Asam
			Layanan Syariah Bank Kalsel LS Cabang Pelaihari
7.	Bank BTPN	1	KCP BTPN Pelaihari

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

2.1.4.2.6 Fasilitas Hotel dan Rumah Makan

Pengembangan sektor pariwisata perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan. Perkembangan jumlah penginapan sendiri dapat menunjukkan perkembangan perekonomian suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Jumlah hotel di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 adalah sebanyak 14 hotel yang berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Pelaihari sebanyak 11 unit dan Kecamatan Jorong sebanyak 3 unit. Ketersediaan kamar pada hotel-hotel tersebut adalah sebanyak 262 kamar dengan tempat tidur sebanyak 380 unit. Sedangkan jumlah rumah makan/restoran tahun 2021 yaitu sebanyak 30 unit, dengan lokasi restoran terbanyak berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sejumlah 17 unit.

Tabel 2.81 Jumlah Hotel dan Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kab. Tanah Laut, 2021

No.	Kecamatan	Hotel			Rumah Makan
		Jumlah Hotel	Kamar	Tempat Tidur	
1.	Panyipatan	-	-	-	-
2.	Takisung	-	-	-	1
3.	Kurau	-	-	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-	-	-
5.	Bati-bati	-	-	-	-
6.	Tambang Ulang	-	-	-	4

No.	Kecamatan	Hotel			Rumah Makan
		Jumlah Hotel	Kamar	Tempat Tidur	
7.	Pelaihari	11	218	322	17
8.	Bajuin	-	-	-	-
9.	Batu Ampar	-	-	-	1
10.	Jorong	3	44	58	5
11.	Kintap	-	-	-	2
Jumlah		14	262	380	30

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Penanaman modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, karena selain dapat memberikan keuntungan kepada penanam modal, penanaman modal juga berfungsi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk menyusun kebijakan yang mendorong penguatan daya saing perekonomian nasional. Investasi asing dan domestik yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan, salah satu caranya adalah dengan memberikan kemudahan perizinan dalam proses pembuatan administrasi investasi.

2.1.4.2.1 Lama Proses Perizinan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan panduan terkait proses perizinan di Kabupaten Tanah Laut. Panduan pelayanan tersebut ditujukan untuk kemudahan akses dan kepastian perizinan bagi kegiatan Penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan Dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Tanah Laut, telah ditetapkan berbagai perizinan dalam memulai usaha di Kabupaten Tanah Laut. Proses perizinan tersebut telah ditampilkan pada situs resmi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut di alamat http://dpmpptsp.tanahlautkab.go.id/website/web/page/40/informasi_izin. Jenis dan jumlah perizinan yang ada di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.82 Rekapitulasi Izin Terbit dan Retribusinya menurut Jenis Permohonan Izin di Kabupaten Tanah Laut, 2021

No.	Jenis Perizinan	Jumlah
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	121
2.	Izin Mendirikan Menara BTS	3
3.	Izin Reklame	134
4.	Izin Penggilingan Padi	2
5.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	24
6.	Izin Penelitian	71
7.	Izin Limbah Cair	4
8.	Izin Limbah B3	5
9.	Izin Lingkungan	6
10.	Izin Peternakan	2
11.	Izin Kursus	2
12.	Izin Usaha Toko Swalayan	14
13.	Izin Usaha Pelatihan Kerja	1
14.	Izin Usaha Perkebunan	1
15.	Izin Usaha Perkebunan Budaya	1
16.	Izin Toko Obat	2
17.	Izin Apotek	11
18.	Izin Operasional Klinik	4
19.	Izin Operasional Puskesmas	2
20.	Izin Operasional Rumah Sakit	1
21.	Izin Praktek Perawat	237
22.	Izin Praktek Apoteker	36
23.	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	56
24.	Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	16
25.	Izin Praktek Ahli Tekonologi Laboratorium Medik	43
26.	Izin Praktek Tenaga Psikologi Klinis	2
27.	Izin Praktek Tenaga Anastesi	3
28.	Izin Praktek Tenaga Gizi	12
29.	Izin Praktek Tenaga Sanitarian	1
30.	Izin Praktek Dokter	135
31.	Izin Praktek Bidan	224
32.	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi	15
33.	Surat Izin Kerja Refraksionis	1
34.	Surat Izin Kerja Sanitarian	18
35.	Surat Izin Kerja Promotor Kesehatan	11
36.	Surat Izin Kerja Fisioterapis	2
37.	Surat Izin Kerja Tenaga Rekam Medis	10
38.	Surat Izin Kerja Radiologi	6
39.	Surat Izin Kerja Tenaga Okupasi Terapi	1
40.	Surat Laik Higiene Depo Air Minum	4
41.	Surat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga	1
42.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	20
43.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	2
44.	Surat Keterangan Tata Ruang	79
45.	Persetujuan/Penolakan Izin Lokasi	12
46.	Surat Keterangan Berusaha Perorangan	602
47.	Surat Keterangan Perusahaan CV	289
48.	Surat Keterangan Berusaha PT	176
49.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	22
50.	Tanda Daftar Gudang	3
51.	Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	91
52.	Tanda Daftar Perusahaan Perorangan	102

No.	Jenis Perizinan	Jumlah
53.	Tanda Daftar Perusahaan CV	24
54.	Tanda Daftar Perusahaan PT	18
55.	Tanda Daftar Perusahaan KOP	6
56.	Tanda Daftar Perusahaan Badan Usaha Lainnya (BUL)	3
57.	Surat Izin Usaha Perdagangan	154
58.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisonal	1
	TOTAL	2849

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Laut, 2022

2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aspek penting dalam pembangunan daerah maupun nasional, karena manusia merupakan obyek dan subyek pembangunan. Oleh karena itu, harapannya pembangunan SDM dapat meningkatkan etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, dan mampu memanfaatkan serta mengembangkan ilmu dan teknologi yang inovatif yang berguna untuk mendorong pembangunan nasional. Aspek daya saing SDM Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan ratio ketergantungannya.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD DAN REALISASI RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

2.2.1. Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD Tahun 2021 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja terhadap indikator tujuan daerah dan indikator sasaran daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tanah Laut Tahun 2021. Angka-angka realisasi masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 2.83

Tabel 2.83 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 1: BERKARYA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERBASIS TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA					
Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68.7	69.87	BPS
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	89	7.89	BPS
		Harapan lama sekolah	13.41	12.31	BPS
	Meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja	500	999	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian
Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68.7	69.87	BPS
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	69.3	69.59	BPS
		Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call	100	100	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya		Indeks Kepuasan Masyarakat	76,5	84.53	Bagian Organisasi Setda Kab. Tanah Laut
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	1.38	2.32	BPS
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil	100	100	Dinas Dukcapil
		Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	Kecamatan
	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		Indeks Pembangunan Pemuda	46	NA	
		Jumlah Atlet yang berprestasi	74	136	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	100	Dinas Kominfo
Misi 2: MENCIPTAKAN INOVASI DI SEGALA SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI					
Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik		Jumlah penghargaan inovasi public	1	1	Bagian Organisasi Setda Kab. Tanah Laut

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2 inovasi	6 inovasi	Bagian Organisasi Setda Kab. Tanah Laut
Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif		Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	15	103	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian
	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)	5 Unit Usaha	7 Unit Usaha	DPMD
	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	15 Unit Usaha	103 Unit Usaha	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian
MISI 3: MEMBANGUN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)					
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	62 (Baik)	NA	Bagian Organisasi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB (77.00)	B	Bagian Organisasi
		Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	BPKAD
	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi public	35.71	55.87	Dinas Kominfo

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)	20	40	Dinas Kominfo
MISI 4: MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS DAN RELIGIUSITAS DALAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT					
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia		Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	100	100	Badan Kesbangpol
	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	Badan Kesbangpol
	Meningkatnya wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	Badan Kesbangpol
	Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan	11	10	Kecamatan
MISI 5: MEMBANGUN SINERGITAS YANG BAIK ANTARTINGKAT PEMERINTAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
Meningkatkan kesejahteraan sosial		Angka Kemiskinan	4.37	4.57	BPS
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4.95	3.47	BPS
		Indeks Gini (skor)	0.255	0.232	BPS
		PDRB per kapita (ADHK)	34.73	29.67	BPS
	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (skor)	88.75	86.86	BPS
	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.8	3.52	BPS

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah	130	105.95	BPBD
		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	Satpol PP
		Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	20	56.32	Dinas Sosial
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas		Indeks Pembangunan Infrastruktur	71	43.31 3	Dinas PUPRP
	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	64	64.61	Dinas PUPRP
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	93	67	Dinas PUPRP
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	73	42.18	Dinas PUPRP
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak (%)	35	53.28	Dinas PUPRP
Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah		Persentase Pertumbuhan sektor unggulan daerah	5.04	11.27	BPS
	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa	128	602	Bagian Ekonomi

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		agunan dan bunga 0%			
		Pertumbuhan sektor Pertanian	3.52	1.81	BPS
		Pertumbuhan sektor Industri olahan	7.58	5.01	BPS
		Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah	290,000	193,671	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaan	95	84.1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.96	68.70	Dinas Perkim LH
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.96	68.70	Dinas Perkim LH
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	87	87	Dinas PUPRP
Peningkatan Upaya Membina Desa dan Menata Kota		Indeks Desa Membangun	0.750	0,68357	DPMD
	Meningkatnya Pembinaan Desa	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahan baik	100	100	DPMD
		Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun	100	100	DPMD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat	26	25	DPMD
		Jumlah Desa di bina berciri khas	5	6	DPMD
	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	7	0.33	Dinas PerkimLH
		Persentase penataan pasar Pelaihari (%)	50	50	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Hasil evaluasi dari tujuan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, dapat tercapai sesuai target sebanyak 8 (enam) indikator kinerja tujuan RPJMD Kabupaten Tanah Laut dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk indikator sasaran daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat tercapai sesuai target sebanyak 30 indikator kinerja Sasaran dari 47 indikator sasaran yang telah ditetapkan dan ada satu indikator yang tidak dapat di evaluasi disebabkan tidak tersedianya data tingkat kabupaten yakni indeks pembangunan pemuda.

Secara keseluruhan untuk Gambaran jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu belanja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Jumlah Program : 128

Jumlah Kegiatan : 250

Jumlah Sub Kegiatan : 717

Jumlah OPD : 40

Pagu belanja APBD : Rp. 2.220.694.238.313,00 (Perubahan APBD)

Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang terlihat dari kinerja belanja langsung APBD, dimana pada Tahun 2021 diperoleh rata-rata tingkat capaian RKPD sebesar 85.29 % untuk

kinerja keuangan dan 96.97 % untuk kinerja fisik. Berikut data capaian kinerja per perangkat daerah Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2.84 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	SKPD	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	523,333,315,276	448,321,939,375.00	85.67	95.95
2	Dinas Kesehatan	447,018,832,047	373,375,993,262.21	83.53	94.15
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	310,768,363,325	296,541,229,703.00	95.42	99.98
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	93,411,508,957	83,899,461,832.00	89.82	99.27
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	19,437,241,780	16,514,511,074.00	84.96	98.05
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,178,307,742	3,749,228,158.00	72.40	99.81
7	Dinas Sosial	19,743,333,841	13,585,822,292.00	68.81	98.9
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	15,394,743,445	11,327,431,259.98	73.58	98.05
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP dan PA	12,763,369,094	9,737,597,726.00	76.29	99.88
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	11,035,882,082	8,061,519,858.00	73.05	98.85
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,610,134,295	7,714,961,124.00	89.60	99.79
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17,913,929,343	12,498,256,484.00	69.77	95.13
13	Dinas Perhubungan	9,828,697,558	8,177,938,586.00	83.20	100
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	13,095,733,027	11,198,671,599.00	85.51	97.94
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,043,963,524	4,188,773,821.00	59.47	92.99
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	22,174,685,112	19,462,811,524.00	87.77	99.31
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6,296,924,750	4,931,257,128.00	78.31	93.29
18	Dinas Pariwisata	16,911,498,802	14,466,914,032.00	85.54	99.78
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	38,858,492,071	32,295,747,284.00	83.11	95.06

NO	SKPD	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	10,924,538,246	7,975,026,682.00	73.00	97.82
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	14,632,124,416	11,028,212,598.00	75.37	96.43
22	Sekretariat Daerah	78,265,490,458	68,772,133,014.00	87.87	98.5
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	69,248,368,264	45,174,057,250.00	65.23	90.68
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9,577,481,454	7,494,656,107.00	78.25	99.42
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	300,718,140,125	279,312,442,758.00	92.88	99.99
26	Badan Pendapatan Daerah	11,778,406,206	8,906,048,575.00	75.61	97.42
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41,939,609,677	21,352,818,435.00	50.91	97.6
28	Inspektorat Kabupaten	11,305,633,175	9,628,909,116.00	85.17	98.08
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9,835,939,948	7,419,233,111.00	75.43	91.34
30	Kantor Kecamatan Bajuin	3,792,312,700	2,988,655,500.00	78.81	99.14
31	Kantor Kecamatan Bati-Bati	5,862,471,761	3,193,967,522.00	54.48	94.51
32	Kantor Kecamatan Batu Ampar	4,021,765,833	3,327,247,943.00	82.73	98.88
33	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	4,519,847,252	3,728,319,237.00	82.49	99.26
34	Kantor Kecamatan Jorong	3,714,339,788	3,267,303,649.00	87.96	92.95
35	Kantor Kecamatan Kurau	4,709,025,562	3,128,171,477.00	66.43	97.37
36	Kantor Kecamatan Takisung	5,737,745,946	4,428,396,481.00	77.18	94.71
37	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	5,013,694,925	2,886,384,040.00	57.57	96.07
38	Kantor Kecamatan Panyipatan	4,282,361,284	3,095,419,440.00	72.28	95.22
39	Kantor Kecamatan Pelaihari	18,264,002,577	14,071,184,071.00	77.04	94.28
40	Kantor Kecamatan Kintap	3,731,982,645	2,841,605,508.00	76.14	100
	TOTAL	2,220,694,238,313	1,894,070,258,636	85.29	96.97

Tabel 2. 85 Anggaran dan Realisasi Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN	1.392.339.474.407,00	1,522,901,390,516.55	109,38
PENDAPATAN ASLI DAERAH	167.212.726.505,00	206.135.630.695,55	123,28
Pendapatan Pajak Daerah	41.615.000.000,00	43.638.422.656,00	104,86
Hasil Retribusi Daerah	6.301.915.303,00	5.743.153.528,80	91,13
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.836.676.685,00	9.836.676.685,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109.459.134.517,00	146.917.377.825,75	134,22
PENDAPATAN TRANSFER	1.184.440.698.375,00	1.274.449.541.251,00	107,60
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.097.579.440.375,00	1.174.467.043.937,00	107,01
Dana Perimbangan	968.433.260.375,00	1.045.900.191.937,00	108,00
Dana Insentif Daerah (DID)	19.072.439.000,00	19.072.439.000,00	100,00
Dana Desa	110.073.741.000,00	109.494.413.000,00	99,47
Pendapatan Transfer Antar Daerah	86.861.258.000,00	99.982.497.314,00	115,11
Pendapatan Bagi Hasil	86.161.258.000,00	99.282.497.314,00	115,23
Bantuan Keuangan	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.686.049.527,00	42.316.218.570,00	104,01
Pendapatan Hibah	482.500.000,00	3.203.438.570,00	663,93
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	40.203.549.527,00	39.112.780.000,00	97,29
BELANJA	2.220.694.238.313,00	1.894.067.926.592,83	85,29
BELANJA OPERASI	1.503.387.412.140,00	1.214.778.642.853,00	80,80
Belanja Pegawai	788.923.466.697,00	639.840.569.796,56	81,10
Belanja Barang dan Jasa	638.019.452.224,00	505.996.286.092,44	79,31
Belanja Hibah	57.810.893.219,00	53.691.496.964,00	92,87
Belanja Bantuan Sosial	18.633.600.000,00	15.250.290.000,00	81,84
BELANJA MODAL	466.438.684.170,00	443.098.788.114,83	95,00
Belanja Modal Tanah	3.293.636.400,00	2.897.145.120,00	87,96
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.194.794.158,00	87.589.675.673,00	85,71
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129.304.101.334,00	125.469.046.825,83	97,03
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230.514.460.184,00	226.307.789.870,00	98,18
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.131.692.094,00	835.130.626,00	73,79
BELANJA TIDAK TERDUGA	20.569.890.343,00	6.471.571.965,00	31,46
Belanja Tidak Terduga	20.569.890.343,00	6.471.571.965,00	31,46
BELANJA TRANSFER	230.298.251.660,00	229.718.923.660,00	99,75
Belanja Bagi Hasil	5.183.544.470,00	5.183.544.470,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	225.114.707.190,00	224.535.379.190,00	99,74
SURPLUS / (DEFISIT)	(828.354.763.906,00)	(371.166.536.076,28)	44,81
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	996.302.466.610,00	996.156.725.010,11	99,99
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	996.302.466.610,00	990.302.466.610,11	100,00

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	%
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.000.000.000,00	5.747.184.400,00	95,79
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	107.074.000,00	0,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	976.302.466.610,00	976.156.725.010,11	99,99
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	147.947.702.704,00	604.990.188.933,83	408,92

Sumber: BPKAD Kab. Tanah Laut, 2021

Adapun untuk realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan, kegiatan dan program pada RKPD 2021 tertuang dalam lampiran I dari Dokumen RKPD 2023 ini.

2.2.2. Faktor Penghambat, Faktor Pendorong dan Tindaklanjut

Tabel 2.86 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Tindaklanjut Prioritas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Prioritas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi Anggaran Untuk Pendidikan diatas 20% dan Untuk Kesehatan diatas 10% - Merupakan Bagian dari Pemenuhan SPM - Adanya Program Pelatihan Tenaga Kerja “Siap Kerja” Minimal 500 Orang Pertahun dan realisasinya untuk tahun 2021 mencapai 999 orang terlatih siap kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi Bencana Non Alam yaitu Pandemi Covid-19 - Petunjuk Teknis DAK Non Fisik Bidang Kesehatan terlambat terbit - Pola Pikir masyarakat dipedesaan belum peduli terhadap pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada dipedesaan terkait pentingnya Pendidikan - Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait Juknis DAK Non Fisik - Perlu adanya program lanjutan dari Program Pelatihan Tenaga Kerja “Siap Kerja” Minimal 500 Orang Pertahun berupa penyerapan tenaga kerja.
2	Prioritas 2 : Pengurangan Kemiskinan Dan Transformasi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi Sektor Pertambangan Mulai menurun sedangkan Sektor lain seperti pertanian dan Industri Olahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi Bencana Non Alam yaitu Pandemi Covid-19 - Data Kemiskinan masih belum sinkron antara data 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu memverifikasi ulang terkait data kemiskinan serta melakukan koordinasi terkait data kemiskinan tersebut ke TNP2K

No	Prioritas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>mengalami peningkatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah telah membentuk tim penanggulangan Kemiskinan - Pemerintah Daerah telah meluncurkan Program Unggulan “Gapura Karomah” yaitu Pinjaman dengan bunga 0% bagi Pelaku Usaha Mikro 	<p>daerah dengan data pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Kawasan Industri Jorong Belum Optimal 	
3	Prioritas 3 : Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Program CSR dari Perusahaan-Perusahaan yang ada di Kab. Tanah Laut yang berwujud pembangunan infrastruktur dasar. - Pembangunan Infrastruktur merupakan dukungan untuk pengembangan wilayah khususnya Kab. Tanah laut sudah ditetapkannya kawasan industri jorong serta banyaknya potensi tempat-tempat wisata sehingga perlu perbaikan akses jalan ke tempat-tempat tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor diawal Tahun 2021 sehingga mengakibatkan beberapa infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan mengalami kerusakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian terkait penambahan anggaran untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah baik itu dari DAK atau dari Dana Lainnya.
4	Prioritas 4 : Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur. - Tingginya Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada beberapa kegiatan yang keuangannya tidak terserap 100% dikarenakan adanya efisiensi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan lebih intensif dan dilaksanakan secara berkala. - Proses pengadaan barang/jasa agar dilakukan seawal mungkin. - Meningkatkan Kualitas pada tahapan perencanaan

No	Prioritas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				selanjutnya, baik pada saat survey harga pengadaan barang pada penentuan dan perumusan output, maupun pada penyusunan aliran kas keuangan dan kinerja.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Pembangunan tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut sebesar 3,47% pada tahun 2021, angka ini menunjukkan pertumbuhan yang positif karena mampu bangkit setelah berkontraksi cukup dalam ke angka -1,99% pada tahun 2020 yang merupakan salah satu efek dari pandemi Covid-19. Namun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawah target dan di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,48% dan nasional sebesar 3,69%
- b. Terjadi peningkatan angka kemiskinan Kabupaten Tanah Laut, pada tahun 2020 angka kemiskinan sebesar 4,26% pada tahun 2021 sebesar 4,57%.

2. Peningkatan Kualitas SDM, Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik

- a. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 69,87. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 masih di bawah nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 71,28 dan nasional sebesar 72,29.

- b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 66,11 Kategori B, target akhir RPJMD Nilai SAKIP kategori A.
3. Pemantapan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang indikatornya tercermin pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk pemenuhan target RPJMD di tahun 2023. Nilai Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 sebesar 68,70, masih di bawah IKLH Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 70,92.
 - b. Tingginya potensi bencana di Kabupaten Tanah Laut yang tercermin pada Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 dengan risiko tinggi, sehingga perlu kebijakan dalam memperkuat ketahanan bencana.
 - c. Belum tercapainya target proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak pada tahun 2021 sebesar 73% dengan realisasi 42,18%.
 - d. Capaian target persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 64,61% dengan target pada tahun 2023 sebesar 85%.
 - e. Belum tercapainya target persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 93% dengan realisasi sebesar 67%.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kondisi aktual, dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai keuangan urusan pemerintah daerah yang dihadapi saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2023 serta solusi dari permasalahan tersebut. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator melihat kesejahteraan masyarakat, karena dari Pendidikan mencerminkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Adapun permasalahan bidang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masih di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu rata-rata lama sekolah 7,89 tahun

sedangkan Provinsi 8,34 tahun dan harapan lama sekolah 12,31 tahun sedangkan Provinsi 12,81 tahun.

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan sektor menjadi prioritas yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan pada bidang kesehatan yang dihadapi Kabupaten Tanah Laut antara lain dalam 2 (dua) tahun terakhir terdapat permasalahan dalam Kesehatan ibu melahirkan. Permasalahan ini terlihat dari adanya peningkatan kematian maternal dari tahun 2020-2021 dengan jumlah kematian maternal pada 2020 sebanyak 8 dan 2021 sebanyak 17 kematian maternal. Selain itu, SPM urusan bidang Kesehatan pelayanan Kesehatan ibu bersalin tahun 2021 belum memnuhi target dengan realisasi 97,86% dari 100% target SPM. Diperlukannya upaya untuk menekan angka kematian maternal, peningkatan pelayanan Kesehatan, dan Kesehatan lingkungan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terjadinya Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor diawal Tahun 2021 sehingga mengakibatkan beberapa infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan mengalami kerusakan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Laut.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki target pencapaian 100% untuk SPM dengan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten. Permasalahan pada penerapan SPM bidang urusan perumahan rakyat yaitu tidak adanya kegiatan kebijakan pemerintah yang membutuhkan relokasi penduduk pada suatu permukiman di Kabupaten Tanah Laut.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Adapun permasalahan pada bidang ini yaitu belum optimalnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha terhadap penanggulangan bencana. Selain itu belum maksimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Tanah Laut.

6. Sosial

Belum sempurnanya database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga diperlukan sebuah aplikasi untuk pemenuhan database tersebut agar pelayanan di bidang Sosial dapat berjalan dengan maksimal.

II. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Belum banyak pelatihan informal (wirausaha baru/tenaga kerja mandiri) yang bertujuan untuk menyebarkan informasi seputar kegiatan usaha, pengembangan wawasan, dasar pengelolaan usaha dan pemanfaatan peluang.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan guna meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini membutuhkan komitmen, sinergi, dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi terkait.

3. Pangan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor pola pangan harapan (PPH) belum mencapai kondisi ideal.

4. Pertanian

Masih kurangnya SDM yang berkompeten di urusan Pertanian.

5. Lingkungan Hidup

Nilai Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 sebesar 68,70, masih di bawah IKLH Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 70,92.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana dan prasarana penunjang masih belum sesuai dengan Permendagri No 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDES masih rendah.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penguatan advokasi dan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pelaksanaannya masih menemui permasalahan antara lain :
- Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program Bangga

Kencana, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran.

- Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga yaitu TFR 2,51 tahun 2020 angka ini belum mencapai target yang diinginkan yaitu 2,30.
- Pelaksanaan Advokasi dan KIE belum efektif ditandai dengan pengetahuan masyarakat tentang KB dan alat kontrasepsi dan pasangan usia subur /PUS tidak diikuti dengan dengan menjadi peserta KB.
- Peran tenaga lapangan KB dan bidan dalam konseling KB belum optimal
- Masih belum optimalnya penyampaian informasi mengenai program Bangsa Kencana Kurang optimalnya penegakan hukum kepada masyarakat pengguna jalan/edukasi masyarakat.

9. Komunikasi dan Informatika

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Bertambahnya indikator penilaian untuk pemenuhan penilaian dan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tanah Laut oleh Kementerian PAN dan RB sedangkan pada saat pengaplikasiannya masih ditemui kendala antara lain diperlukannya pemeliharaan perangkat dan infrastruktur SPBE, peningkatan kapasitas SDM SPBE di masing-masing SKPD.

10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pada Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah kurangnya inovasi dalam pengembangan produk yang dikarenakan kurangnya keadaran dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang.

11. Penanaman Modal

Belum maksimalnya kegiatan promosi investasi karena pandemi covid-19 pada tahun 2019-2021.

12. Kepemudaan dan Olahraga

Belum maksimalnya pemetaan jumlah dan potensi pemuda serta Pembina di setiap kecamatan dan desa.

13. Statistik

Permasalahan yang ada pada bidang statistik adalah sering terjadinya tumpang tindih data yang kurang akurat dan valid. Hal ini terjadi dikarenakan:

- Belum adanya pedoman / regulasi yang mengatur pengisian data aplikasi Satu Data Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut
- SKPD sebagai produsen data tidak melakukan updating, validasi dan sinkronisasi data-data pembangunan daerah
- Data statistik sektoral belum tersaji secara menyeluruh
- Perlunya peningkatan SDM pengelolaan data statistik sektoral

14. Persandian

Sering terjadinya pencurian dan pemalsuan data maka diperlukan keamanan informasi terhadap data-data pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Laut. Belum adanya sosialisasi terkait pengamanan data dan informasi serta belum adanya SDM mumpuni terkait keamanan informasi.

15. Perpustakaan.

Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai literasi. Saat ini pemahaman masyarakat mengenai literasi hanya sebatas buku bacaan. Sedangkan literasi itu luas mencakup manuskrip, video, audio.

16. Kearsipan

Belum terlaksananya digitalisasi arsip termasuk arsip daerah dan sejarah termasuk propertinya.

III. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang ada pada bidang Kelautan dan Perikanan adalah masih belum optimalnya produksi penangkapan ikan perairan laut dan perairan umum yang dikarenakan rendahnya kesadaran nelayan tentang dokumen perizinan kapal, masih banyaknya nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, belum lengkapnya sarana dan prasarana perikanan tangkap, dan belum adanya data terpadu yang akurat tentang hasil produksi perikanan tangkap.

2. Pariwisata

Permasalahan utama bidang Pariwisata adalah kurang optimalnya layanan kepariwisataan yang dikarenakan oleh kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal, kurangnya sarana prasarana yang

representatif, belum maksimalnya penggalian potensi objek wisata, kurangnya promosi kepariwisataan, dan kurangnya SDM pelaku usaha ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Permasalahan pada bidang pertanian adalah belum sebandingnya percepatan pertumbuhan populasi ternak dengan konsumsi, hal ini diakibatkan permintaan terhadap produk peternakan yang semakin meningkat, belum optimalnya penerapan teknologi peternakan, dan belum optimalnya usaha pengolahan hasil peternakan.

4. Perdagangan

Belum maksimalnya pelaksanaan promosi seperti pameran atau expo yang beberapa tahun kebelakang tidak diselenggarakan akibat dari pandemi covid-19, sehingga berdampak pada promosi produk-produk unggulan daerah.

5. Perindustrian

Kurangnya motivasi masyarakat untuk menekuni bidang industri pengolahan dikarenakan inovasi rendah dan prediksi tentang kendala pemasaran produk yang akan dihadapi. Selain itu untuk Kawasan Industri Jorong (KIJ), belum ada calon Pengelola Kawasan yang serius dan memiliki kemampuan berinvestasi maksimal di Kawasan Industri Jorong.

IV. Fungsi Penunjang Urusahan Pemerintahan

1. Administrasi Pemerintahan Umum

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan *social society* dan nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih perlu direvitalisasi di setiap jenjang birokrasi;

2. Perencanaan Pembangunan

Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya perencanaan pembangunan serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

3. Keuangan

Adanya kendala dalam penggunaan SIPD Penatausahaan.

4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Masih rendahnya jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya.

5. Penelitian dan Pengembangan

Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah serta belum termanfaatkannya hasil kajian penelitian dan pengembangan menjadi kebijakan.

6. Pengawasan Pembangunan

Masih kurangnya pemahaman dan komitmen SKPD untuk melaksanakan SAKIP dan RB secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro, proyeksi Tahun 2023 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2023. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan pertemuan yang telah dilaksanakan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25 April 2022 disepakati Target Indikator Makro Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pertumbuhan Ekonomi : 4.0 - 5.05
2. Indeks Pembangunan Manusia : 70.4 – 70.72
3. Tingkat Pengangguran Terbuka : 3.21 - 2.50
4. Tingkat Kemiskinan : 4.35 - 4.30
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 68.47
6. Indeks Gini Ratio : 0.225

3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

Analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan pembangunan berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah meliputi:

1. Kondisi internal
 - a. Faktor kekuatan
 - 1) Potensi sumber daya alam

Potensi sumber daya alam yang sangat besar di Kabupaten Tanah Laut didominasi pada sektor pertanian, pertambangan, dan pariwisata terutama wisata alam dan wisata edukasi.

2) Aspek demografi

Aspek demografi di Kabupaten Tanah Laut cenderung mengalami penambahan pada setiap tahunnya. Dengan didukung oleh sumber daya manusia, usia angkatan kerja yang cukup besar maka diharapkan menjadi kekuatan untuk menggerakkan roda perekonomian pembangunan Kabupaten Tanah Laut.

3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Tanah Laut cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya yang menandakan bahwa tingkat belanja masyarakat baik makanan maupun non makanan mengalami kenaikan. Ini berarti tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik yang dapat menjadi modal untuk menumbuhkan perekonomian Kabupaten Tanah Laut.

4) Investasi

Investasi Kabupaten Tanah Laut cenderung meningkat khususnya PMDN. Hal ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan infrastruktur yang memadai, kondisi keamanan dan ketertiban yang relatif kondusif, terbangunnya pelabuhan swarangan, adanya kawasan peruntukan industri menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. serta Adanya regulasi tentang kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif bagi investor.

5) Komitmen pemerintah daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan peningkatan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal tersebut diwujudkan dengan berbagai inovasi daerah yang mengoptimalkan potensi lokal yang mensejahterakan masyarakat.

b. Faktor kelemahan

1) Pemanfaatan sumber daya alam

Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal.

2) Nilai tambah produk pertanian

Nilai tambah produk-produk pertanian di Kabupaten Tanah Laut masih belum di manfaatkan secara optimal menjadi bahan-bahan olahan, sehingga keragaman hasil produk pertanian belum memungkinkan memiliki nilai tambah (*added values*).

2. Kondisi eksternal

a. Faktor peluang

1) Pemulihan Ekonomi

Seiring dengan telah menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia, secara langsung akan berdampak dengan pola kehidupan masyarakat khususnya kondisi perekonomian. Pendapatan dan konsumsi masyarakat diprediksi akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini akan menjadi momentum untuk pemulihan ekonomi khususnya di Kabupaten Tanah Laut

2) Posisi *geostrategic*

Dengan telah ditetapkannya Kawasan Industri Jorong dan Kawasan Banjarbakula (Kecamatan Bati-bati dan Tambang Ulang) nantinya akan menjadi suatu koridor pertumbuhan ekonomi baru di Tanah Laut. Hal ini juga akan mendorong pertumbuhan investasi dan menjadi fokus dari paket kebijakan ekonomi melalui beberapa strategi antara lain kemudahan perijinan, insentif investasi dan percepatan infrastruktur pendukung.

3) Pasar bebas ASEAN

Kondisi pasar bebas ASEAN membuka peluang bagi produk-produk lokal baik dari segi tenaga kerja, produksi maupun pemasaran.

b. Faktor ancaman.

1) Pasar bebas ASEAN.

Pasar bebas ASEAN menjadi ancaman yang serius bagi pelaku ekonomi di Kabupaten Tanah Laut sebab persaingan akan semakin tajam. Ketidaksiapan daerah dalam menghadapi persaingan tersebut akan menyebabkan Kabupaten Tanah Laut menjadi tujuan bagi pemasaran produk dan tenaga kerja terlatih.

2) Perubahan iklim.

Perubahan iklim akibat pengaruh pemanasan global memberikan dampak pada dunia. Kecenderungan perubahan iklim yang tidak menentu mengganggu pola tanam petani, perkembangan dan penyebaran organisme

pengganggu tanaman, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian finansial.

Adapun strategi yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah yaitu:

1. Pengoptimalan dan pengembangan pemanfaatan sumber daya alam
2. Peningkatan kualitas tenaga kerja
3. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi
4. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal
5. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan strategi di atas antara lain:

1. Perencanaan yang menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik
2. Pengembangan potensi wilayah
3. Peningkatan komoditas produksi unggulan
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Peningkatan ketrampilan bagi tenaga usia kerja dan
6. Pengembangan infrastruktur wilayah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program*, dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan (a) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, (b) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan (c) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai

relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut diatas juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakekatnya adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah terdiri atas: (a). pendapatan asli daerah; (b). pendapatan transfer; dan (c). lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri atas hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; hasil kerja sama daerah; jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah; pendapatan denda retribusi daerah; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; pendapatan dari BLUD; dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan Transfer meliputi:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat mengatur pendapatan transfer pemerintah pusat ini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas :

 - 1) Dana perimbangan yang terdiri atas Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (DAK). DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas: pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan; pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang

Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan cukai hasil tembakau; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran Uin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Dana Transfer Khusus (DAK) bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana insentif daerah

Dana insentif daerah sebagaimana bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu

3) Dana desa.

Dana desa sebagaimana bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

- 1) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

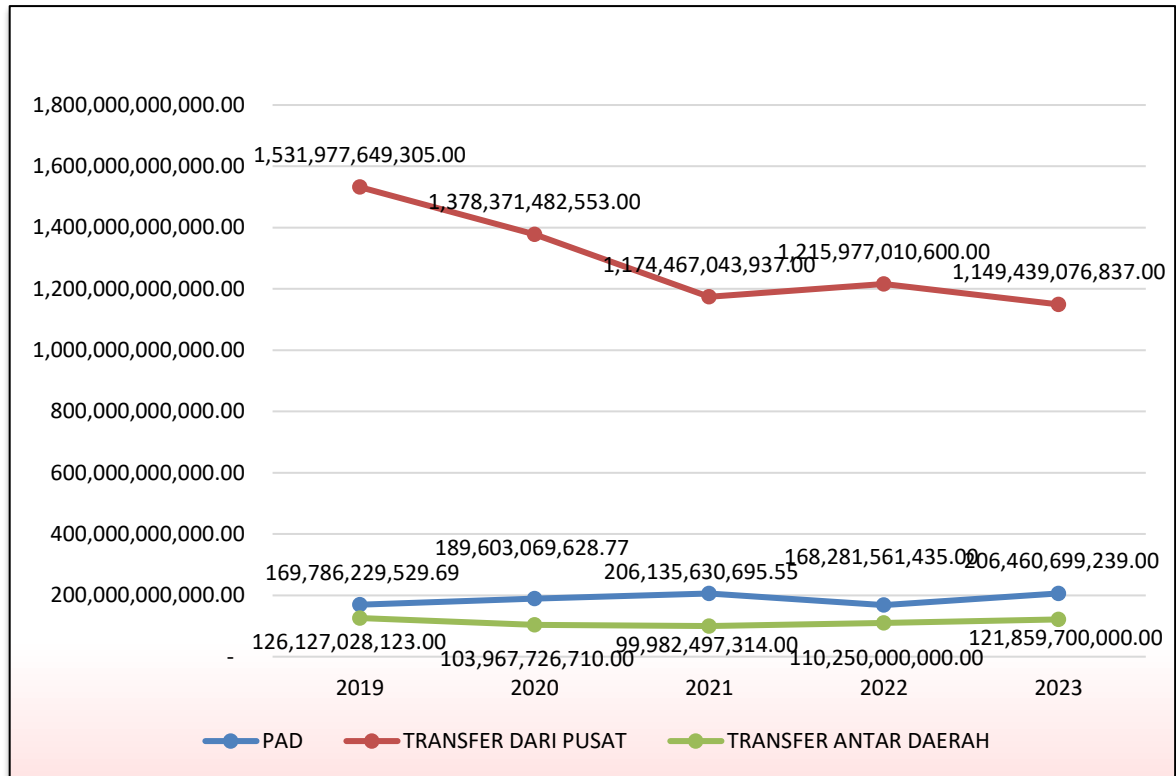
Gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023

Kode 1	Uraian 2	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Pergeseran APBD 2022	RKPD TAHUN 2023 3
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp. 1.871.377.390.246,69	Rp. 1.613.752.681.343,77	Rp. 1.522.901.390.516,55	Rp. 1.494.508.572.035,00	Rp 1.477.759.476.076,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp. 206.135.630.695,55	Rp. 168.281.561.435,00	Rp 206.460.699.239,00
4.1.01	Pajak Daerah			Rp. 43.638.422.656	Rp. 36.575.000.000,00	Rp 42.569.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah			Rp. 5.743.153.528,80	Rp. 7.936.345.500,00	Rp 9.800.440.042,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Rp 9.836.676.685,00	Rp. 14.626.000.000,00	Rp 11.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah			Rp. 146.917.377.825,75	Rp. 109.144.215.935,00	Rp 143.091.259.197,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER			Rp. 1.274.449.541.251,00	Rp. 1.326.227.010.600,00	Rp 1.271.298.776.837,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			Rp. 1.174.467.043.937,00	Rp. 1.215.977.010.600,00	Rp 1.149.439.076.837,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan					Rp 1.045.439.076.837,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp 551.132.630.837,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp 494.306.446.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik					Rp -
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik					Rp -
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)					Rp -
4.2.01.05	Dana Desa					Rp 104.000.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah			Rp. 99.982.497.314,00	Rp. 110.250.000.000,00	Rp 121.859.700.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil					Rp 121.859.700.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			Rp. 42.316.218.570,00		
4.3.1	Pendapatan Hibah			Rp. 3.203.438.570,00		
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan			Rp. 39.112.780.000,00		

Sumber : Badan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2022

Gambar 3.1
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2019 – 2023



Sumber : Badan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2022

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu perlu adanya arah kebijakan pendapatan yang mengarah kepada peningkatan pendapatan yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah.

Dalam hal usaha meningkatkan pendapatan daerah sampai saat ini masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi terutama dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun permasalahan dimaksud antara lain adalah :

1. Penyusunan perencanaan pendapatan pajak daerah dan retribusi belum optimal;
2. Sumber daya manusia yang belum memenuhi kompetensi dan kebutuhan organisasi dalam meningkatkan pendapatan daerah (belum memiliki juru sita, pemeriksa pajak, pejabat penilai/appraisal);
3. Database pajak daerah dan retribusi belum termutakhirkan secara keseluruhan dan belum terintegrasi secara penuh;

4. Setting tarif pajak daerah dan retribusi yang sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi daerah;
5. Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi yang masih rendah;
6. Pelayanan yang masih belum optimal;
7. Belum optimalnya kinerja BUMD.

Melihat analisis kondisi perkembangan perekonomian yang ada, mengamati perkembangan pembangunan dan melihat permasalahan yang ada, maka strategi yang ditempuh dalam peningkatan pendapatan daerah ialah:

1. Peninjauan dan penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manajemen/pengelolaan potensi pendapatan asli daerah.
3. Mendorong peningkatan investasi di daerah.
4. Perlu melakukan kajian terhadap potensi pendapatan.
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait pendapatan.
6. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat untuk memperoleh dana APBN.

Dengan strategi tersebut diatas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut.

1. Peninjauan dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah,
2. Meningkatkan kualitas BUMD,
3. Meningkatkan inovasi peningkatan pendapatan,
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pada obyek pajak/retribusi,
5. Meningkatkan kualitas SDM,
6. Meningkatkan pelayanan perijinan,
7. Mempercepat pembangunan infrastruktur.

Kemudian upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan reviu atas peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.
- b. Melakukan penelitian dan kajian potensi pendapatan asli daerah (PAD).
- c. Peningkatan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pada BUMD.
- d. Menambah penyertaan modal kepada BUMD.
- e. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.
- f. Memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

- g. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah,
- h. Penegakan peraturan daerah,
- i. Mengintensifkan penagihan pajak dan retribusi daerah,
- j. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat kaitannya dengan keajiban pembayaran pajak daerah,
- k. Melakukan bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah,
- l. Melakukan penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan,
- m. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak/retribusi daerah menuju pelayanan prima,
- n. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di kawasan pertumbuhan ekonomi dengan harapan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat.
- o. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait pendapatan.

Melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok SKPD.

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Kemudian Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kemudian Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah harus dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan daerah harus diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas: pelayanan umum; ketertiban dan keamanan; ekonomi; perlindungan lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata; pendidikan; dan perlindungan sosial.

Kemudian Belanja Daerah menurut organisasi harus disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan harus disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan rinciannya paling sedikit mencakup: (1). target dan Sasaran; (2). indikator capaian Keluaran; dan (3). indikator capaian Hasil.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- 1) Belanja operasi yaitu merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis: (1). belanja pegawai; (2). belanja barang dan jasa; (3). belanja hibah; dan (4). belanja bantuan sosial
- 2) Belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas : (1). Belanja Modal Tanah; (2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin; (3) Belanja Gedung dan Bangunan; (4). Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan (5). Belanja Aset Tetap Lainnya.
- 3) Belanja tidak terduga yaitu merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 4) Belanja transfer yaitu merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis: (1). belanja bagi hasil; dan (2). belanja bantuan keuangan.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan maka menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: (1). mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2). digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan (3). batas minimal kapitalisasi aset.

Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan /atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan terdiri atas: (a). bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; (b). bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; (c). bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten / kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; (d). bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau (e). bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal belanja dimaksud tidak mencukupi, menggunakan: (a). dana terduga sebagaimana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau (b). memanfaatkan kas yang tersedia.

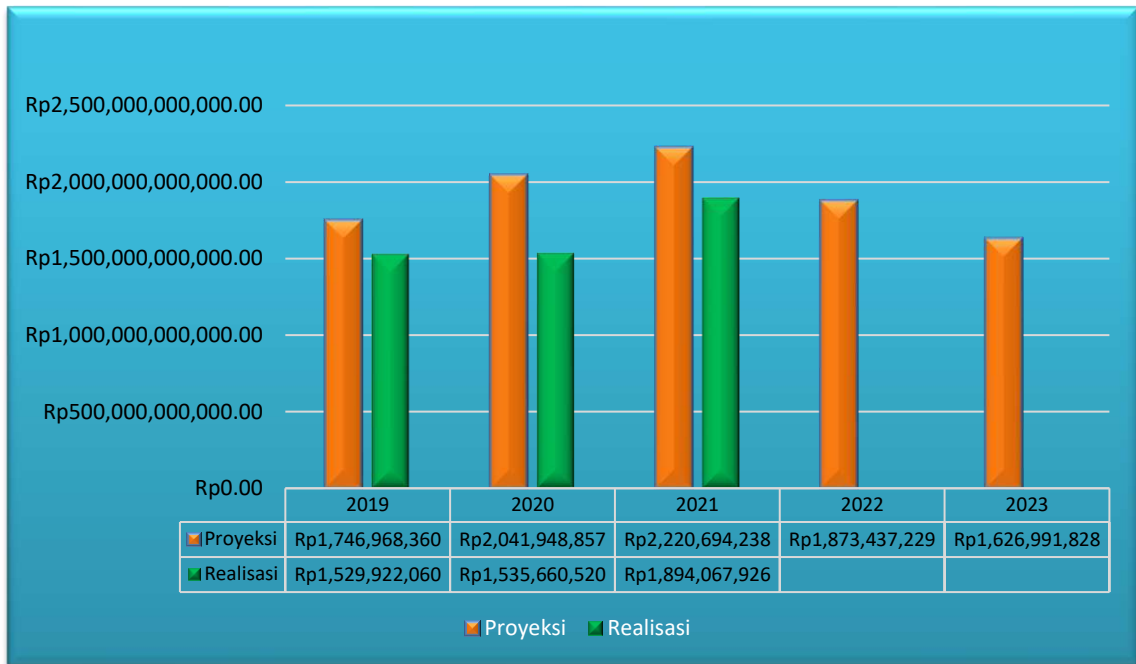
Proyeksi belanja daerah Kabupaten Tanah laut 2022 sebesar Rp1.614.659.138.141,00 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut
TA 2019 - 2023

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	PERGESERAN APBD TAHUN 2022	RKPD TAHUN. 2023
5	BELANJA	Rp. 1.529.922.060.481,93	Rp. 1.535.660.520.668,00	Rp. 1.894.067.926.592,83	Rp. 1.873.437.229.894,00	Rp. 1.626.991.828.215,00
5.1	BELANJA OPERASI			Rp. 1.214.778.642.853,00	Rp. 1.352.376.127.088,00	Rp. 1.157.648.342.607,00
5.2.01	Belanja Pegawai			Rp. 639.840.569.796,56	Rp. 768.259.861.097,00	Rp. 644.434.937.260,00
5.2.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp. 505.996.286.092,44	Rp. 527.271.844.129,00	Rp. 452.999.943.681,00
5.2.05	Belanja Hibah			Rp. 53.691.496.964,00	Rp. 44.579.621.862,00	Rp. 49.075.901.666,00
5.2.06	Belanja Bantuan Sosial			Rp. 15.250.290.000,00	Rp. 12.264.800.000,00	Rp. 11.137.560.000,00
5.2	BELANJA MODAL			Rp. 443.098.788.114,83	Rp. 275.008.352.689,00	Rp. 209.411.550.708,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah			Rp. 2.897.145.120,00	Rp. 420.000.000,00	Rp. 20.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp. 87.589.675.673,00	Rp. 37.287.327.113,00	Rp. 57.194.594.484,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp. 125.469.046.825,83	Rp. 74.439.266.140,00	Rp. 81.719.789.094,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi			Rp. 226.307.789.870,00	Rp. 162.556.563.310,00	Rp. 69.942.106.130,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			Rp. 835.130.626,00	Rp. 305.196.126,00	Rp. 293.950.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			Rp. 6.471.571.965,00	Rp. 22.226.879.377,00	Rp. 25.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga			Rp. 6.471.571.965,00	Rp. 22.226.879.377,00	Rp. 25.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER					Rp. 234.931.934.900,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil					Rp. 5.236.944.004,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan					Rp. 229.694.990.896,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Tanah Laut, 2022

Gambar 3.2
Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPKAD Kabupaten Tanah Laut, 2022

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas: (a). penerimaan Pembiayaan; dan (b). pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari: (1). SiLPA; (2). pencairan Dana Cadangan; (3). hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4). penerimaan Pinjaman Daerah; (5). penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (6). penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan: (1). pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; (2). penyertaan modal daerah; (3). pembentukan Dana Cadangan; (4). Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (5). pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Tabel 3.3.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2023

6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp. 591.805.608.669,58	Rp. 922.210.305.934,34	Rp. 996.156.725.010,11	Rp. 439.668.194.461,00	Rp 204.232.352.139,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 591.688.396.169,58	Rp. 922.160.938.434,34	Rp. 990.302.466.610,11	Rp. 433.668.194.461,00	Rp 200.232.352.139,00
6.1.45	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. 117.212.500,00	Rp. 49.367.500,00	Rp. 5.747.184.400,00	Rp. 6.000.000.000,00	Rp 4.000.000.000,00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			Rp. 107.074.000,00		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. 11.100.000.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 50.000.000.000,00	Rp 55.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan			Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 40.000.000.000,00	Rp 20.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	Rp. 1.100.000.000,00				Rp 25.000.000.000,00
	PT. Bank Kalsel					Rp 25.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00
	PT. BPR (Gapura Karomah)	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO					Rp 149.232.352.139,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Tanah Laut, 2022

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018- 2023 yang memuat visi “**Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI (*Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual Dan Sinergi*)**” dan dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi setiap program pembangunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Laut dalam periode 5 tahun dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah

yang terintegrasi, sinkron dan sinergis dengan pembangunan provinsi dan nasional serta dinamikanya.

Selanjutnya tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kab. Tanah Laut

Visi : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI		
Misi 1 : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Peningkatan akses, kualitas manajemen sekolah, serta kualitas proses pembelajaran seperti yang diamanatkan dalam SPM bidang Pendidikan, serta untuk menuntaskan wajar 9 tahun dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal strategis lain yang perlu ditekankan adalah menyangkut ketepatan kelompok sasaran, baik pada pendidikan PAUD, pendidikan dasar maupun kesetaraan. Karena ketepatan kelompok sasaran tersebut akan dapat menurunkan angka ketimpangan pendapatan di masa yang akan datang.
	Meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk penyiapan tenaga kerja yang tangguh baik sebagai entrepreneur maupun pegawai
Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan.
		Peningkatan pemyarakatan paradigma sehat serta keberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatannya.
		Peningkatan Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan untuk pemenuhan standar pelayanan kesehatan. Terkait dengan Program Pelayanan Kesehatan On Call, maka diperlukan Pedoman Teknis yang komprehensif sebagai dasar penyelenggaraannya.
Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Difokuskan untuk peningkatan kualitas layanan pendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
		Peningkatan realisasi pelaku perizinan dan non perijinan jenis non usaha sehingga pelaku usaha memenuhi persyaratan usaha yang telah ditetapkan.
		Peningkatan Kinerja Keluarga Berencana untuk pengendalian Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) dan peningkatan kesejahteraan keluarga
		Peningkatan akses pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas untuk memastikan terpenuhinya hak-hak administratif masyarakat serta meningkatkan ketepatanan perhitungan jumlah penduduk sebagai dasar dari kebijakan publik.

Visi : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI		
		<p>Peningkatan pelayanan Kecamatan serta optimalisasi peran kecamatan dalam upaya gerakan desa membangun.</p> <p>Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan perlu dikembangkan untuk memasukkan aspek (kandungan) lokal.</p>
	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	<p>Peningkatan hasil dari pembinaan adat dan budaya desa yang mendukung pengembangan perekonomian di tingkat desa</p> <p>Peningkatan keserasian kebijakan pembinaan kepemudaan untuk memastikan peningkatan jumlah Organisasi Pemuda Aktif, Persentase Wirausaha Muda, serta persentase peroleh medali di tingkat nasional dan provinsi</p>
	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Memfasilitasi Pelayanan SKPD Berbasis Teknologi Informasi
Misi 2 : Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif		
Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Peningkatan upaya penerapan inovasi dalam pelayanan publik melalui pola replikasi <i>best practices</i> yang telah terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Peningkatan penerapan inovasi pada sistem produksi di tingkat usaha yang potensial.
	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Peningkatan pengembangan industri kreatif daerah skala kecil dan menengah.
Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)		
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	<p>Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (GG) untuk meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi, termasuk di dalamnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahanan daerah</p> <p>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembinaan Maturitas Penerapan SPIP</p>
	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan keterbukaan informasi penyelenggaraan pelayanan publik SKPD.
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Peningkatan pemanfaatan Data/Informasi berbasis TI untuk mendukung penerapan e-Government
Misi 4 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat		
Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama di lingkungan birokrasi dan masyarakat	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Penguatan kemitraan pengembangan pengamalan nilai-nilai keagamaan untuk peningkatan lembaga keagamaan dalam peningkatan toleransi keagamaan.
	Meningkatnya wawasan kebangsaan	<p>Peningkatan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan</p> <p>Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat yang mengarah pada kejujuran dan keadilan</p>
	Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Diarahkan untuk peningkatan peran lembaga keagamaan dalam peningkatan produktivitas umat

Visi : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI		
Misi 5 : Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
Peningkatan kinerja pembangunan yang berkualitas bidang ekonomi dan sosial budaya (Pembangunan Inklusif)	Meningkatnya kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Inklusif Peningkatan Keserasian Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang bermuara pada APBD yang <i>Pro Growth, Pro Poor, Pro Job, Pro Environment</i>
	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan Kesempatan Kerja untuk pengurangan ketimpangan dan pengurangan kemiskinan
	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Pengurangan resiko bencana serta peningkatan penyelesaian gangguan trantibum
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas dan sumberdaya energi	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas dan sumberdaya energi	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang meningkatkan interkoneksi antarpusat pertumbuhan
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya untuk peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah
		pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengembangan bidang ketenagalistrikan
Peningkatan kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sesuai potensi daerah
		Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		Peningkatan kualitas fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan khususnya di wilayah potensial serta peningkatan linkage sektoralnya.	
Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan untuk penguatan cadangan pangan serta desa berketahanan pangan	
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Peningkatan Kinerja Pengelolaan Limbah dan Persampahan
Peningkatan Upaya Membangun Desa, Menata Kota	Meningkatnya Desa Membangun	Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Desa untuk mendukung gerakan desa membangun.
	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Peningkatan keserasian Perencanaan Pengembangan Kota-kota untuk penyediaan sarana dan prasarana dasar dan pengurangan permukiman kumuh.

Sumber : RPJMD Kab. Tanah Laut Tahun 2018-2023

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan

sasaran pembangunan daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran pembangunan di Daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya.

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan dengan menyesuaikan arah kebijakan, yang telah disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, agar program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah serta untuk meningkatkan rasa tanggung jawab untuk pencapaian kinerja program oleh Perangkat Daerah.

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2023

Identifikasi Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023 pada Pra Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2022 yaitu terbagi menjadi:

1. Isu Global
 - Pasokan Pangan dan Energi
 - Pembatasan Mobilitas
 - Investasi
 - Mobilitas
2. Isu Nasional
 - Defisit Fiskal
 - Investasi
 - Rantai Nilai
 - Daya Beli
3. Isu Lokal
 - Pemantapan Pemulihan Ekonomi
 - Daya beli
 - Pengangguran
 - Pemerataan
 - Bencana

Pemerintah akan mendorong pemulihan ekonomi pada tahun 2023. Dari Pemulihan Ekonomi Menuju Transformasi Ekonomi. Transformasi Ekonomi merupakan strategi jangka Menengah – Panjang yang perlu dilanjutkan. Pemerintah menargetkan konsumsi tumbuh di atas 5% pada tahun 2023 karena kegiatan ekonomi diperkirakan akan normal kembali. Pemerintah menyesuaikan dengan kondisi domestik yang mengarah pada tren pemulihan, karena konsumsi yang tumbuh mendukung pertumbuhan ekonomi tahun ini. Lonjakan inflasi global terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang mencapai 7%, tentu merupakan dampak dari pemulihan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut telah mengangkat Indonesia masuk ke dalam kategori negara berpenghasilan menengah ke atas pada tahun 2021. Perekonomian Indonesia tumbuh 3,7% pada tahun 2021, dengan PDB per kapita sebesar Rp62,2 juta atau US\$4.349 per tahun. Pada 2019, sebelum wabah COVID-19, PDB per kapita Indonesia adalah Rp59,3 juta. Untuk mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah tahun lalu menghabiskan Rp455,62 triliun, dialokasikan untuk kesehatan (Rp122,5 triliun), perlindungan masyarakat (Rp154,8 triliun), dan penguatan pemulihan ekonomi (Rp178,3 triliun).

Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia TW I Tahun 2022



Gambar 6 Infografis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Triwulan I-2022
Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian Covid-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap. Kemudian pada tahun 2022 pemerintah melanjutkan pemberian vaksin dosis lanjutan (Booster), ini merupakan upaya pemerintah demi mencapai *herd immunity* dalam mempersiapkan diri menuju tatanan kehidupan baru (new normal).

Gambar 4.2 Upaya Pengendalian Covid-19 dengan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster)



Sumber : Kementerian Kesehatan

Dampak pandemi Covid-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2023, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai *herd immunity* perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem Kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

Sasaran dan arah kebijakan di tahun 2023 disusun berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2021 dan berbagai masukan dari hasil konsultasi publik, perkembangan mutakhir dari isu nasional dan global serta pengarahannya Presiden Joko Widodo pada sidang paripurna pada Agustus 2021 lalu. Tema RKP 2023 adalah "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Sesuai dengan tema RKP 2023 maka arah dan kebijakan RKP 2023 akan fokus pada 8 (delapan) arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi isu kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respons terhadap perubahan iklim.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, dan sanitas.
8. Pembangunan ibu kota negara (IKN).

Gambar 4.3 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023, antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) sebesar 5,3 -5,9%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) sebesar 5,3-6,0 %
3. Rasio Gini sebesar (Nilai) 0,375- 0,378
4. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02%
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31-73,49
6. Nilai Tukar Petani/NTP (Nilai) sebesar 103-105
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 106-107
8. Tingkat Kemiskinan (%) sebesar 7,5-8,5%

RKP 2023 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional, disusun dengan prinsip *money follows program* dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Tabel 4.2 Tema RKP dan Prioritas Nasional Tahun 2023

Tema RKP 2023	Prioritas Nasional (PN)	
<i>Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.</i>	PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	PN 2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
	PN 3	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
	PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	PN 5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
	PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022

Gambar 4.4 7 Prioritas Nasional



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Sebagai *clearing house* pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas merumuskan sejumlah Major Project (MP) untuk pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) RKP 2023. Adapun Major Project (MP) tersebut, yakni:

1. Kawasan Industri Prioritas dan *Smelter*,
2. Pengelolaan Terpadu UMKM,
3. *FoodEstate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan),
4. Destinasi Pariwisata Prioritas,
5. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi,
6. *Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay*,
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara,
8. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial,
9. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
10. Reformasi Pendidikan Keterampilan,
11. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
12. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu,
13. Transformasi Digital, dan
14. Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3.

Gambar 4.5 Penekanan (*Highlight*) Major Project RKP Tahun 2023



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran strategis.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diberdayakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, adapun permasalahan daerah tersebut yaitu:

1. Pandemi Covid-19
2. Struktur Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Masih Belum Kuat

4. Banjir dan Covid-19;

Sementara itu Prioritas daerah provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Tema RKPD dan Prioritas Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2023

Tema RKPD 2023	Prioritas Daerah (PD)	
Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan	PD 1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing
	PD 2	Optimalisasi Sektor Industri, Umkm, Pertanian Dan Pariwisata
	PD 3	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah
	PD 4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik
	PD 5	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana
	PD 6	Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara Dan Sebagai Pendukung Food Estate

Sumber : Bappeda Prov. Kalsel Tahun 2022 (diolah)

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran pembangunan di Daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan

3. Sumber Daya Manusia Yang Belum Berdaya Saing
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Yang Belum Optimal
5. Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan
6. Perpindahan Ibu Kota Negara Baru ke Kalimantan Timur dan Penetapan Food Estate di Kalimantan Tengah
7. Belum efektifnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengidentifikasi permasalahan daerah yang muncul atau yang berkaitan dengan pandemi covid-19. adapun permasalahan daerah tersebut meliputi:

1. Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid 19
 2. Meningkatnya Pengangguran karena Pekerja pada Perusahaan yang dirumahkan dan di PHK
 3. Meningkatnya Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan
 4. Menurunnya Kontribusi UMKM dan IKM dalam menunjang perekonomian
- Dari permasalahan daerah tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan menetapkan Isu Strategis Daerah, yaitu:

1. Lingkungan Hidup
2. Infrastruktur
3. Sumber Daya Manusia
4. Ekonomi
5. Tata Kelola Pemerintahan
6. Gerbang IKN Baru dan Food Estate

Dari isu strategis tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 yaitu, **“Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan”**. Dengan meletakan fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 pada :

1. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan;
2. UMKM dan Ketenagakerjaan;
3. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata;

misi, tujuan dan sasaran strategis.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diberdayakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi setiap program pembangunan.

Secara global dan nasional, Indonesia menghadapi sebuah krisis pandemi covid-19 yang akhirnya juga masuk pada krisis ekonomi, resesi ekonomi akan berdampak dalam terhadap perekonomian daerah, UMKM, sektor industri dan juga perdagangan. Banyak analisa mengatakan bahwa krisisi global ini bisa berkepanjangan dan memiliki potensi melahirkan krisis sosial dan juga bahkan krisis politik dan peradaban. Tentunya kondisi ini

menjadi alasan kuat akan pentingnya agenda kerja sama dan kolaborasi seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah memiliki tantangan besar dalam menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut muncul dari hasil evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2013 pada tahun 2021. Berikut kami tampilkan tabel hasil evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2013 pada tahun 2021.

Tabel 4.4 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2013

Tujuan	Indikator Tujuan	2019		2020		2021		Target		Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		Target		
		T	R	T	R	T	R	2022	2023			11	12	T	R	T	R	T	R	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Misi 1: BERKARYA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERBASIS TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA																				
Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68	69,04	68,5	69,38	68,7	69,87	68,9	70,1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	7,97	7,64	8,06	7,88	9	7,89	10	12	
		12,83	11,96	13,12	12,01	13,41	12,31	13,7	14		Harapan lama sekolah	12,83	11,96	13,12	12,01	13,41	12,31	13,7	14	
		500	1669	500	787	500	999	500	500		Meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja	500	1669	500	787	500	999	500	500
Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,3	69,04	68,5	69,38	68,7	69,87	68,9	70,1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	68,9	69,31	69,1	69,45	69,3	69,59	69,6	69,8	
		100	100	100	100	100	100	100	100		Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call	100	100	100	100	100	100	100	100	
Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	82,73	80	84,59	76,5 (Baik)	84,53	77,5 (Baik)	80 (Baik)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	2,2	2,99	1,48	2,81	1,38	2,32	1,2	1,1	
		100	100	100	100	100	100	100	100		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil	100	100	100	100	100	100	100	100	
		100	100	100	100	100	100	100	100		Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
		100	100	100	100	100	100	100	100		Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		45,7	NA	45,9	NA	46	NA	46,5	46,75		Indeks Pembangunan Pemuda	45,7	NA	45,9	NA	46	NA	46,5	46,75	
		62	138	68	61	74	136	81	89		Jumlah Atlet yang berprestasi	62	138	68	61	74	136	81	89	
100	100	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100			

Tujuan	Indikator Tujuan	2019		2020		2021		Target		Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		Target	
		T	R	T	R	T	R	2022	2023			T	R	T	R	T	R	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MISI 2: MENCIPTAKAN INOVASI DI SEGALA SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI																			
Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah penghargaan inovasi public	1	0	1	0	1	1	1	1	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	1 inovasi	5 inovasi	2 inovasi	5 inovasi	2 inovasi	6 Inovasi	2 inovasi	2 inovasi
Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	5	10	25	25	15	103	20	25	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	4 Unit Usaha	5 Unit Usaha	7 unit usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha
		10	25	25	15	103	20	25	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	25 Unit Usaha	15 Unit Usaha	103 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25 Unit Usaha	
MISI 3: MEMBANGUN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)																			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	60	53	64	56,21	62		63	64	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB	B	BB (74)	B (65,88)	BB (77,00)	B	A (81)	A (81)
						(Baik)		(Baik)		Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
										Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Indeks keterbukaan informasi publik	11,9	16	23,81	23,73	35,71	55,87	47,62	59,52
											Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)	15	40	15	40	20	40	25	25
MISI 4: MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS DAN RELIGISITAS DALAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT																			
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	100	100	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik intern dan antar umat beragama (kasus)	0	2	0	3	0	0	0	0
										Meningkatnya wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0
										Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	10 Kec	11 Kec	11 Kec

Tujuan	Indikator Tujuan	2019		2020		2021		Target		Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		Target		
		T	R	T	R	T	R	2022	2023			T	R	T	R	T	R	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
MISI 5: MEMBANGUN SINERGITAS YANG BAIK ANTARTINGKAT PEMERINTAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																				
Meningkatkan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan	4,39	4,51	4,35	4,26	4,37	4,57	4,36	4,35	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,85	3,76	4,90	1,99	4,95	3,47	5	5,05	
											Indeks Gini (skor)	0,257	0,271	0,256	0,252	0,255	0,232	0,254	0,253	
											PDRB per kapita (ADHK)	31,5	30,16	33,07	29,12	34,73	29,67	36,81	39,02	
											Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (skor)	88,25	86,96	88,50	87,19	88,75	86,86	89,00	89,50
											Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,3	3,41	3	3,57	2,8	3,52	2,6	2,5
											Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah	150	151,36	135 (Sedang)	105,9 (sedang)	130 (Sedang)	105,95 (Sedang)	125 (Sedang)	120 (Sedang)
												Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
										Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	12,5	9,36	15	6,98	20	56,32	25	30		
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,5	51,95	73	53	71	54,66	72	73	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	38	59,61	43	67,55	64	64,61	80	85	
											Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	84	84	87	84	93	67	97	100	
											Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	65	32,74	70	38,90	73	42,18	75	80	
											Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak (%)	25	51,70	30	52,29	35	53,28	40	45	

Tujuan	Indikator Tujuan	2019		2020		2021		Target		Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		Target	
		T	R	T	R	T	R	2022	2023			T	R	T	R	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MISI 5: MEMBANGUN SINERGITAS YANG BAIK ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																			
Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan sektor unggulan daerah	5,02	6,81	5,06	-4,82	5,04	11,27	5,05	5,06	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0%	100	327	120	501	125	602	130	135
											Pertumbuhan sektor Pertanian	3,5	3,42	3,51	-0,34	3,52	1,81	3,53	3,57
											Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,56	2,63	7,57	-4,48	7,58	5,01	7,59	7,6
											Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah	280.000	346.366	285.000	330.241	290.000	193.671	300.000	350.000
										Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaan	95	81,5	95	82,8	95	84,1	95	95
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,21	58,06	60,58	69,71	60,96	68,70	61	62	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	60,21	58,06	60,58	69,71	60,96	68,70	61,34	61,71
											Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	70	74,19	78	82,66	87	87	92	98
Peningkatan Upaya Membina Desa dan Menata Kota	Indeks Desa Membangun	0,715 (Maju)	0,67 (berkembar)	0,73	0,67 (berkembar)	0,750 (Maju)	0,68357	0,800 (Maju)	0,815 (Mandiri)	Meningkatnya Pembinaan Desa	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahan baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
											Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun	100	100	100	100	100	100	100	100
											Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat	26	26	26	9	26	25	26	20
											Jumlah Desa di bina berdiri khas	5	5	5	5	5	6	5	5
											Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	12	0,51	10	0,44	7	0,33	3
										Persentase penataan pasar Peltahari (%)	20	20	35	20	50	50	60	80	

Sumber : BAPPEDA Kab. Tanah Laut Tahun 2022 (diolah)

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat total 47 Indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, dengan capaian pada tahun 2021 yaitu: 30 Indikator mencapai target (hijau), 16 Indikator tidak mencapai target (merah) dan terdapat 1 Indikator yang tidak dapat dievaluasi karena belum tersedia datanya (kuning). Dari hasil capaian IKU tersebut maka, identifikasi permasalahan pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan angka kemiskinan Kabupaten Tanah Laut, pada tahun 2020 angka kemiskinan sebesar 4,26% pada tahun 2021 sebesar 4,57%.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut sebesar 3,47% pada tahun 2021, angka ini menunjukkan pertumbuhan yang positif karena mampu bangkit setelah terkontraksi cukup dalam ke angka -1,99% pada tahun 2020 yang merupakan salah satu efek dari pandemi Covid-19. Namun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah

Laut masih berada di bawah target dan di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,48% dan nasional sebesar 3,69%

3. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 69,87. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 masih di bawah nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 71,28 dan nasional sebesar 72,29.
4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 66,11 Kategori B, target akhir RPJMD Nilai SAKIP kategori A.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang indikatornya tercermin pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk pemenuhan target RPJMD di tahun 2023. Nilai Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 sebesar 68,70 , masih di bawah IKLH Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 70,92.
6. Tingginya potensi bencana di Kabupaten Tanah Laut yang tercermin pada Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 dengan risiko tinggi, sehingga perlu kebijakan dalam memperkuat ketahanan bencana.
7. Belum tercapainya target proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak pada tahun 2021 sebesar 73% dengan realisasi 42,18%.
8. Capaian target persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 64,61% dengan target pada tahun 2023 sebesar 85%.
9. Belum tercapainya target persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 93% dengan realisasi sebesar 67%.
10. Belum adanya Arah Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs)).

Selanjutnya, isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah tersebut diatas maka, pemerintah daerah kabupaten Tanah Laut menetapkan 10 isu strategis seperti uraian berikut ini:

1. Penurunan Angka Kemiskinan;
2. Pertumbuhan Ekonomi;

3. Peningkatan Pendapatan Daerah;
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Permukiman;
5. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tanah Laut;
6. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup & Ketahanan Bencana;
8. Pembinaan Desa dan Penataan Perkotaan;
9. Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan;
10. Arah Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs)).

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional dan daerah. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergidan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Perspektif selama 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi ke depan. Prediksi dilakukan terhadap indikator - indikator pembangunan yang bersifat makro. Perspektif Kabupaten Tanah Laut untuk lima tahun ke depan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis.

Dari Permasalahan Daerah dan Isu Strategis diatas maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan Tema Pembangunan RKPD Tahun 2023 yang juga selaras dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023, yaitu **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Untuk Pemantapan Kebijakan Berinteraksi Dalam Membina Desa Dan Menata Kota Sebagai Pondasi Pembangunan Yang Berkelanjutan”**.

Dalam rangka penyesuaian terhadap hasil evaluasi pencapaian target pembangunan maka perlu dilakukan analisis terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah tahun berkenaan untuk mengetahui tingkat kesenjangan capaian terhadap target tahunan perangkat daerah dan kaitannya terhadap capaian indikator pembangunan daerah (indikator makro). Dari Analisis tersebut diperoleh permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Kemudian di dalam kerangka strategi dan arah kebijakan RPJMD yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Laut 2023. Pembangunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 akan difokuskan pada Prioritas Pembangunan yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Tema Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

TEMA PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN (PD)
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Untuk Pemantapan Kebijakan Berinteraksi Dalam Membina Desa Dan Menata Kota Sebagai Pondasi Pembangunan Yang Berkelanjutan	PD 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
	PD 2. Peningkatan Kualitas SDM, Akuntabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	PD 3. Pemantapan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Sumber : BAPPEDA Kab. Tanah Laut Tahun 2022 (diolah)

Sebagai satu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, maka dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dirumuskan dengan sepenuhnya menyinkronkan terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Sinkronisasi prioritas pembangunan daerah terhadap pembangunan nasional ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan dapat dicapai melalui pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, maka diperlukan keselarasan antara sasaran daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan. Gambaran tentang keselarasan sasaran daerah 2023 dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.6 Keselarasan Sasaran Daerah dengan Prioritas RKPD Tahun 2023

PRIORITAS RKPD	SASARAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang
	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang
	Meningkatnya Pertumbuhan	Pertumbuhan Ekonomi

PRIORITAS RKPD	SASARAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR SASARAN	
	Ekonomi	Indeks Gini PDRB per kapita	
	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0% Pertumbuhan sektor Pertanian Pertumbuhan sektor Industri olahan Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah	
	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaan Desa Berketahanan Pangan	
	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pembinaan Desa	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahan baik Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) Jumlah Desa di bina berciri khas
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah
		Meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan		Angka Harapan Hidup Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call	
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	
Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga		Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah Indeks Pembangunan Pemuda Jumlah Atlet yang berprestasi	
Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama		Jumlah konflik intern dan antarumat beragama	
Meningkatnya wawasan kebangsaan		Jumlah konflik sosial	
Meningkatnya aksi sosial keagamaan		Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan	
Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah		Indeks Pembangunan Gender	

PRIORITAS RKPD	SASARAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR SASARAN
	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD
	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah
		Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi publik
Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
Pemantapan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)
		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Persentase PMKS yang menjadi mandiri
	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
		Cakupan penduduk berakses air minum sehat
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten
	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
Persentase Penataan Pasar Pelaihari		

Sumber : Bappeda Kab. Tanah Laut

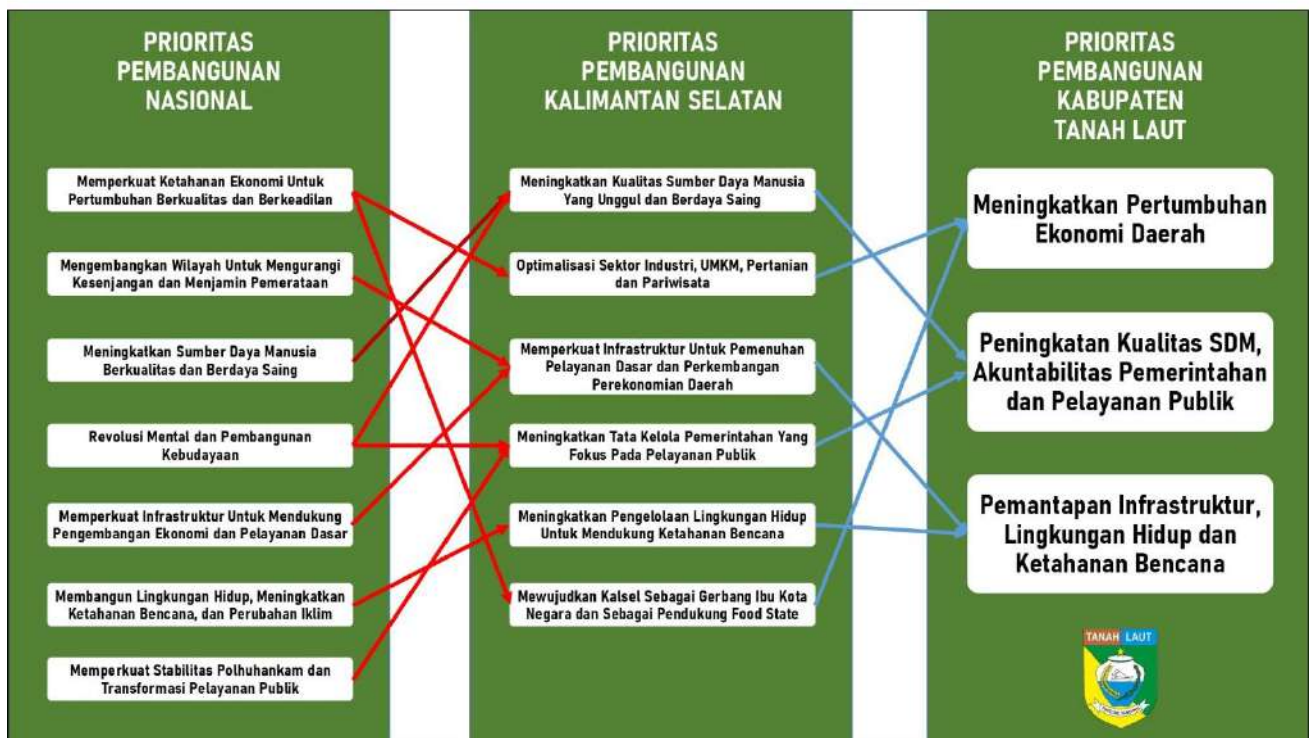
Arah kebijakan dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan tahun 2023 seperti uraian berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
 - a. Peningkatan produksi hasil pertanian
 - b. Penataan Klaster Industri
 - c. Peningkatan konektivitas sentra produksi produk unggulan
 - d. Pelaksanaan operasional dan optimalisasi fungsi pelabuhan Swarangan
 - e. Peningkatan potensi objek wisata yang telah ada

- f. Peningkatan destinasi objek wisata dan memunculkan destinasi wisata baru
 - g. Peningkatan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal
 - h. Peningkatan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan
 - i. Peningkatan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja
 - j. Peningkatan perlindungan sosial
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik
- a. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter
 - b. Peningkatan pembinaan olahraga dan generasi muda
 - c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan
 - d. Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan budaya
 - e. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk menyiapkan tenaga kerja yang tangguh baik sebagai entrepreneur maupun pegawai
 - f. Peningkatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
 - g. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
 - h. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan
 - i. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
 - j. Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana
 - k. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan jenjang TK, SD dan SMP
 - l. Peningkatan pelaksanaan pendidikan informal (Paket A, B, C)
 - m. Peningkatan jumlah Guru yang tersedia
 - n. Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap seni dan budaya
 - o. Menejemen Perubahan
 - p. Penataan Peraturan Perundang - Undangan
 - q. Penataan dan Penguatan Organisasi
 - r. Penataan Tata Laksana
 - s. Penataan Sistem Menejemen Sumber Daya Manusia
 - t. Penguatan Akuntabilitas
 - u. Penguatan Pengawasan
 - v. Whistle-Blowing System

3. Pemantapan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
 - a. Pemantapan dan Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur jalan, jembatan, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan perdagangan
 - b. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
 - c. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan
 - d. Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan bencana

Gambar 4.6 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kab. Tanah Laut Th. 2023



Sumber : BAPPEDA Kab. Tanah Laut Tahun 2022 (diolah)

Berikut disajikan tabel Sinkronisasi Program RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang mendukung Prioritas Daerah:

Tabel 4.7 Rekapitulasi Program RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 yang Mendukung Prioritas Daerah

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		4	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		5	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		7	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		8	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		9	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		10	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		11	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		12	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		13	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		14	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		15	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		16	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		17	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		18	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		19	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		20	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		21	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		22	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		24	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		25	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		26	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		27	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		28	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		29	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		30	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		31	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		32	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		33	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		34	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		35	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		36	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		37	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		38	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		39	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		40	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		41	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2	Peningkatan Kualitas SDM, Akuntabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		7	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		8	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		10	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		11	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		12	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		15	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		16	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		17	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		19	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		20	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		21	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		22	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		24	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		25	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		26	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		27	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		29	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		30	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dinas Komunikasi dan Informatika
		31	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		32	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		33	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		34	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		35	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		36	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		37	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		38	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		39	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		40	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		41	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		44	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		45	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		46	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		47	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
		49	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten
		50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		51	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
		52	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
		53	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Seluruh Kecamatan
		54	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan
		55	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		56	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		57	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		58	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		59	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh SKPD
3	Pemantapan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		5	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		6	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		9	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		10	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		12	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		13	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		15	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		16	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		17	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		18	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		20	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		21	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		22	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		23	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		24	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		25	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		26	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		27	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan

Sumber: BAPPEDA Kab. Tanah Laut, 2022

Selanjutnya kami sajikan tabel Rekapitulasi Program RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 yang Mendukung Prioritas Provinsi:

Tabel 4.8 Rekapitulasi Program RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 yang mendukung Prioritas Provinsi

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		7	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		8	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		10	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		11	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		12	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		15	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		16	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		17	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		19	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		20	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		21	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		22	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		24	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		25	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		26	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		27	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		29	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		30	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
		31	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		32	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		33	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		34	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		35	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		36	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITY DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		37	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		38	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		39	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		40	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		41	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		44	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		45	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		46	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		47	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
		49	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten
		50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
		51	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
		52	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
		53	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Seluruh Kecamatan
		54	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan
		55	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		56	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		57	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		58	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		59	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh SKPD
2	Optimalisasi Sektor Industri, Umkm, Pertanian Dan Pariwisata	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		4	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		5	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		7	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		8	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		9	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		10	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		11	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		12	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		13	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		14	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		15	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		16	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		17	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		18	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		19	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		20	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		21	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		22	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		24	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		25	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		26	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		27	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		28	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		29	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		30	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		31	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		32	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		33	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		34	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		35	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		36	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		37	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		38	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		39	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		40	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		41	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		5	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		6	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		9	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		10	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		12	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		13	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		15	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		16	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		17	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		18	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		20	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		21	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		22	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		23	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		24	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		25	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		26	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		27	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		7	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		8	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		10	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		11	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		12	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		15	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		16	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		17	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITY DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		19	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		20	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		21	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		22	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		24	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		25	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		26	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		27	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		29	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		30	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
		31	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		32	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		33	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		34	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		35	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		36	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITY DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		37	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		38	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		39	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		40	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		41	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		44	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		45	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		46	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		47	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
		49	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten
		50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
		51	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
		52	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
		53	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Seluruh Kecamatan
		54	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan
		55	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		56	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		57	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		58	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		59	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh SKPD
5	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		5	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		6	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		9	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		10	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		12	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		13	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		15	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		16	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		17	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		18	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		20	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		21	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		22	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		23	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		24	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		25	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		26	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		27	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
6	Mewujudkan Kassel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara Dan Sebagai Pendukung Food Estate	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		4	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		5	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		7	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		8	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		9	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		10	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		11	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		12	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		13	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		14	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		15	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		16	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		17	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		18	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		19	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		20	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITY DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		21	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		22	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		24	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		25	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		26	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		27	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		28	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		29	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		30	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		31	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		32	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		33	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		34	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		35	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		36	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		37	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		38	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		39	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		40	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		41	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Sumber : BAPPEDA Kab. Tanah Laut Tahun 2022

Kemudian kami sajikan juga tabel Rekapitulasi Program RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 yang mendukung Prioritas Nasional:

Tabel 4.9 Rekapitulasi Program RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 yang Mendukung Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		4	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		5	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		7	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		8	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		9	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		10	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		11	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		12	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		13	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		14	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		15	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		16	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		17	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		18	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		19	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		20	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		21	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		22	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		24	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		25	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		26	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		27	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		28	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		29	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		30	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		31	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		32	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		33	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		34	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		35	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		36	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		37	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		38	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		39	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		40	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		41	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		5	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		6	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		9	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		10	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		12	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		13	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		15	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		16	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		17	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		18	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		20	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		21	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		22	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		23	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		24	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		25	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		26	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		27	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
3	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		7	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		8	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		10	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		11	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		12	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITY NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		14	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		15	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		16	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		17	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		19	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		20	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		21	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		22	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		24	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITY NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		25	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		26	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		27	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		29	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		30	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
		31	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		32	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		33	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		34	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		35	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		36	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		37	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		38	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		39	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		40	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		41	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		44	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		45	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		46	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		47	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
		49	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten
		50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
		51	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
		52	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
		53	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Seluruh Kecamatan
		54	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan
		55	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		56	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		57	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		58	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		59	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh SKPD
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITY NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		7	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		8	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		10	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		11	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		12	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		15	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		16	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		17	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		19	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		20	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		21	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		22	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		24	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		25	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		26	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		27	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		29	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		30	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
		31	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		32	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		33	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		34	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		35	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		36	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		37	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		38	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		39	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		40	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		41	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		44	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		45	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		46	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		47	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
		49	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten
		50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
		51	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
		52	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
		53	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Seluruh Kecamatan
		54	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan
		55	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		56	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		57	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		58	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		59	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh SKPD
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		5	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		6	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		9	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		10	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		12	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		13	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		15	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		16	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		17	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		18	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		20	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		21	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		22	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		23	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		24	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		25	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		26	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		27	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		5	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		6	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		9	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		10	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		12	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		13	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		15	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		16	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		17	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		18	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		20	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		21	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		22	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		23	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		24	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		25	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		26	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		27	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
7	Memperkuat Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITY NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		7	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		8	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		10	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		11	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		12	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		15	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		16	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		17	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		19	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		20	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITY NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		21	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		22	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		24	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		25	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		26	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		27	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		29	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		30	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dinas Komunikasi dan Informatika
		31	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		32	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		33	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		34	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		35	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		36	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		37	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		38	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		39	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		40	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		41	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		44	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		45	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		46	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		47	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
		49	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten
		50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
		51	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
		52	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
		53	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Seluruh Kecamatan
		54	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan
		55	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		56	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		57	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		58	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJ AWAB
		59	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh SKPD

Sumber : BAPPEDA Kab. Tanah Laut Tahun 2022

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan dokumen rencana tahunan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. RKPD Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Rancangan RKPD Tahun 2023 disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD dengan tema **“MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH UNTUK PEMANTAPAN KEBIJAKAN BERINTERAKSI DALAM MEMBINA DESA DAN MENATA KOTA SEBAGAI PONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”**.

Adapun daftar pagu indikatif per SKPD yang akan digunakan dalam membiayai kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Daftar Pagu Indikatif per SKPD untuk membiayai Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	34	160	317.919.090.477,00
2	Dinas Kesehatan	10	40	158	274.219.313.730,00
3	RSUD Haji Boejasin	8	28	77	122.999.999.625,00
4	RSUD K.H. Mansyur Kintap	6	18	48	22.799.661.040,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	24	43	143	132.971.795.674,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	28	53	135	56.452.189.074,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8	24	83	13.385.236.527,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	21	61	4.652.919.360,00
9	Dinas Sosial	12	30	97	12.493.417.217,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	16	37	87	10.574.327.534,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16	38	82	8.951.014.577,00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	18	38	82	7.507.538.397,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	20	53	8.189.321.621,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	19	65	16.687.187.815,00
15	Dinas Perhubungan	6	36	71	8.736.023.571,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	10	24	74	9.343.001.924,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	24	42	76	9.959.714.981,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	26	60	4.669.394.206,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	8	30	83	12.506.895.159,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	22	50	5.407.510.581,00
21	Dinas Pariwisata	9	24	76	6.318.938.331,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	12	27	69	33.560.383.364,00
23	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	10	32	66	11.235.228.701,00
24	Sekretariat Daerah	6	36	132	71.943.947.642,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4	30	86	50.619.700.142,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	32	75	10.255.576.927,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	24	112	278.590.200.110,00
28	Badan Pendapatan Daerah	4	16	71	11.156.496.437,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	24	70	10.460.924.896,00
30	Inspektorat Kabupaten	6	21	50	13.856.809.483,00
31	Kantor Kecamatan Bajuin	12	24	67	4.024.428.520,00
32	Kantor Kecamatan Bati-Bati	12	24	63	4.523.490.016,00
33	Kantor Kecamatan Batu Ampar	8	20	55	4.232.456.612,00
34	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	11	19	36	4.579.792.359,00
35	Kantor Kecamatan Jorong	12	26	60	4.097.762.086,00
36	Kantor Kecamatan Kintap	12	27	80	4.479.611.142,00
37	Kantor Kecamatan Kurau	12	24	63	3.900.864.815,00
38	Kantor Kecamatan Pelaihari	12	27	87	16.406.114.992,00
39	Kantor Kecamatan Panyipatan	12	27	64	4.486.615.999,00
40	Kantor Kecamatan Takisung	12	24	65	4.568.568.754,00
41	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	12	22	55	4.464.076.553,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	24	69	8.804.287.244,00
TOTAL		454	1177	3316	1.626.991.828.215,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Tanah Laut 2022

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta gambaran konsisten antara RPJMD dengan RKPD Tahun 2023 yang menyeleraskan dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi dapat dilihat dalam lampiran RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan bagi suatu tahun perencanaan. Hal ini ditunjukkan menunjukkan pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun perencanaan dapat dicapai.

Indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah ini terdiri dari indikator makro serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan memberikan gambaran pencapaian kinerja tahunan.

Tabel 6.1 Target Indikator Makro Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,4 – 70,72
2.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,07
3.	Angka Harapan Hidup	69,80
4.	Indeks kepuasan masyarakat	80 (Baik)
5.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)	1,1
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%)	100,00
7.	Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)	100,00
8.	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100,00
9.	Jumlah Atlet yang berprestasi	89
10.	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100,00
11.	Jumlah penghargaan inovasi publik	1 penghargaan
12.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2 Inovasi
13.	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	25 Unit Usaha
14.	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	25 Unit Usaha
15.	Indeks Reformasi Birokrasi	64 (Baik)
16.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB
17.	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP
18.	Indeks keterbukaan informasi public	75,00
19.	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)	40 SKPD
20.	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	100
21.	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0
22.	Jumlah konflik sosial (kasus)	0
23.	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan	11 Kecamatan
24.	Angka Kemiskinan (%)	4,35 – 4,30
25.	Pertumbuhan Ekonomi	4,0 – 5,05

NO	INDIKATOR	TARGET
26.	Indeks Gini (skor)	0,225
27.	Indeks Pembangunan Gender (skor)	89,50
28.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.21 - 2.50
29.	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	120 (Sedang)
30.	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00
31.	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	30
32.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	85 %
33.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	73,00
34.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	100
35.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	80,00
36.	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0%	135
37.	Persentase Pertumbuhan sektor unggulan daerah	5,06
38.	Pertumbuhan sektor Pertanian	3,57
39.	Pertumbuhan sektor Industri pengolahan	7,60
40.	Jumlah wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	350.000
41.	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00
42.	Desa Berketahanan Pangan (%)	100,00
43.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	68.47
44.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	98,00
45.	Indeks Desa Membangun (skor)	0,815 (Mandiri)
46.	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahannya baik (%)	100,00
47.	Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Membangun	100,00
48.	Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat	20,00
49.	Jumlah Desa Dibina Berciri Khas	5
50.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	1,00
51.	Luasan RTH publik kota (Ha)	113,75
52.	Persentase Penataan Pasar Pelaihari	80 %
53.	Indeks Pembangunan Pemuda	46,75
54.	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak (%)	45 %
55.	Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%)	85 %

Secara umum indikator yang akan dicapai untuk memenuhi arah permendagri terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel 6.2 Target Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	
	Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	6,0
	Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	6,0
	Tingkat Inflasi Daerah (%)	5,00
	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	39,02
	Indeks Gini (skor)	0,225
	Penduduk miskin (orang)	14.412

NO	INDIKATOR	TARGET
	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,35
	Indeks Pembangunan Manusia (skor)	70.4 – 70.72
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	
	Angka melek huruf (%)	100,00
	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,07
	Harapan lama sekolah (tahun)	13,22
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	81,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	88,9
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	67
	Angka harapan hidup (tahun)	69,80
	Persentase balita gizi buruk (%)	1,00
	Persentase balita gizi kurang (%)	5,00
	Cakupan desa siaga aktif (%)	100,00
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,90
	Rasio penduduk yang bekerja (%)	68,75
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	7,00
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	5,00
	Indeks kepuasan masyarakat	80 (Baik)
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	12,35
	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP
	Skor PPH Ketersediaan (kg/kapita/tahun)	95,00
	Skor PPH Konsumsi (kg/kapita/tahun)	95,27
	Desa Berketahanan Pangan (%)	100,00
	Pertumbuhan sub-sektor tanaman pangan (%)	3,00
	Pertumbuhan sub-sektor tanaman hortikultura (%)	3,00
	Pertumbuhan sub-sektor perkebunan (%)	5,00
	Pertumbuhan sub-sektor peternakan (%)	3,00
	Pertumbuhan sub-sektor perikanan (%)	3,00
	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (%)	7,00
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	6,00
1.3	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	
	Jumlah grup kesenian	15
	Jumlah gedung kesenian	1
	Jumlah gedung olahraga	3

NO	INDIKATOR	TARGET
2	ASPEK PELAYANAN UMUM	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
2.1	Pendidikan	
	Angka melek huruf (%)	100,00
	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,07
	Harapan lama sekolah (tahun)	13,22
	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (%)	70,00
	Rasio Murid-Guru PAUD (rasio)	1 : 8
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	81,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	88,9
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	67,00
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	100,00
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	97,5
	Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	0,20
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	0,05
	Angka Kelulusan UN (AL) SD/MI (%)	100,00
	Angka Kelulusan UN (AL) SMP/MTs (%)	100,00
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	99,80
	Cakupan sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	95,00
	Cakupan sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik (%)	85,00
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1 : 85
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (rasio)	1 : 20
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar	1 : 20
	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	100,00
	Cakupan siswa SD yang memperoleh pembiayaan pendidikan (%)	100,00
	Cakupan siswa SMP yang memperoleh pembiayaan pendidikan (%)	100,00
	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (%)	80
	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B (%)	65,00
	Persentase peserta pendidikan kecakapan hidup yang meningkat keterampilannya (%)	100,00
	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	100,00
	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik (%)	100,00
	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik (%)	100,00
	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik (%)	100,00
	Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SD (skor)	65,00
	Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMP (skor)	70,00
	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses listrik (%)	100,00
	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses internet untuk tujuan pengajaran (%)	20,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses komputer untuk tujuan pengajaran (%)	50,00
	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses air minum layak	60,00
	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses fasilitas dasar per jenis kelamin (%)	60,00
	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses fasilitas cuci tangan (%)	100,00
	Capaian Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (%)	100,00
	Jumlah Desa yang memiliki PKBM aktif (desa)	20
	Jumlah Inovasi Pelayanan di Bidang Pendidikan	1
	Rata-rata nilai ujian SD/MI	62,29
	Rata-rata nilai ujian SD/Mts	62,45
2.2	Kesehatan	
	Angka harapan hidup (tahun)	69,80
	Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call	100,00
	Persentase balita gizi buruk (%)	100,00
	Persentase pemenuhan obat publik dan perbekalan kesehatan (%)	1,00
	Cakupan <i>buffer stock</i> obat Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Persentase Instalasi farmasi kabupaten yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar (%)	100,00
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (%)	75,00
	Cakupan kecamatan yang sudah memiliki puskesmas (%)	100,00
	Cakupan puskesmas terakreditasi (%)	100,00
	Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat (tema)	5
	Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	15,00
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun (%)	10,00
	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara (%)	10,00
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	1,00
	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi (%)	1,00
	Cakupan gizi buruk dan gizi kurang yang dapat ditangani (%)	100,00
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100,00
	Angka kematian akibat keracunan (kasus)	5
	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (%)	100,00
	Kasus Malaria (AMI) per 1.000 penduduk (kasus)	5
	Tingkat kematian akibat malaria (kasus)	1
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	30
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	20
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	100,00
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100,00
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100,00
	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	30
	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis (%)	100,00
	Proporsi kasus Kusta yang ditemukan dan diobati	100,00
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	1
	Penderita diare yang ditangani (%)	100,00
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	0,05
	Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV	1
	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	100,00
	Jumlah Lembaga Mitra Pembangunan Kesehatan (lembaga)	5
	Persentase penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	100,00
	Persentase penyalahgunaan narkotika yang menyelesaikan program rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	100,00
	Persentase penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)	100,00
	Prevalensi penyalahgunaan narkoba (%)	1,00
	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	0,05
	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan (%)	2,00
	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100,00
	Bidan yang Kompeten PPIA (%)	100,00
	Cakupan perawatan balita gizi buruk (%)	100,00
	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (%)	100,00
	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (%)	2,00
	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (%)	20
	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta (%)	2,00
	Prevalensi Malnutrisi (<i>wasting/obesitas</i>) pada anak balita (%)	2,00
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (%)	100,00
	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	5,00
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	9,2
	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	10,00
	Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita)	50,00
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan penanganan kesehatan bayi (%)	100,00
	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita (%)	100,00
	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	988,70
	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	5
	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan (%)	100,00
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)	100,00
	Prevalensi anemia pada ibu hamil (%)	20,00
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	100,00
	Cakupan pelayanan nifas (%)	100,00
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	100,00
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100,00
	Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (%)	10,00
	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100,00
	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	700
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100,00
	Cakupan Puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga sesuai standar (%)	100,00
	Cakupan SDM kesehatan yang terakreditasi (%)	100,00
	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	1 : 3000
	Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk	1 : 30.000
	Rasio Dokter per 100.000 penduduk	1 : 900
	Rasio Tenaga kesehatan per 100.000 penduduk	1 : 100
	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan (%)	100,00
	Cakupan masyarakat yang mendapat pengobatan jiwa (%)	100,00
	Angka kematian dari percobaan bunuh diri (kasus)	5
	Cakupan Rumah sakit yang sudah terakreditasi (%)	100,00
	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun (%)	5,00
	Indeks Kinerja Pelayanan RSUD dan Pelayanan Puskesmas (kategori)	Kategori: Baik
	Nilai Capaian SPM Kesehatan (%)	100,00
	Cakupan desa siaga aktif (%)	100,00
	Jumlah desa yang memiliki kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	10
	Cakupan Kelurahan/Desa <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100,00
	Persentase desa yang memiliki rumah tangga berPHBS (%)	100,00
	Persentase desa ODF	40,00
	Persentase desa STBM	65,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Persentase jenis obat yang memenuhi standar mutu khasiat dan keamanan (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di bidang kesehatan	1
	Indeks kepatuhan terhadap standar (area klinis)	100,00
	Indeks tingkat pengendalian infeksi di rumah sakit (area klinis)	100,00
	Indeks prosedur penanganan uji sampel (area klinis)	100,00
	Indeks pengendalian mutu (area klinis)	100,00
	Indeks keuangan (area managerial)	100,00
	Indeks utilisasi (area managerial)	100,00
	Indeks kepuasan pelanggan (area managerial)	100,00
	Indeks ketepatan waktu pelayanan (area managerial)	100,00
	Indeks temuan yang ditindaklanjuti (area managerial)	100,00
	Indeks tingkat kehandalan sumber daya (area managerial)	100,00
	Indeks sumber daya manusia (area managerial)	100,00
	Indeks pendidikan (area managerial)	100,00
	Indeks sarana dan prasarana (area managerial)	100,00
	Cakupan penyediaan alat kesehatan rumah sakit (%)	100,00
	Cakupan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit (%)	100,00
	Indeks promotif dan preventif (area managerial)	100,00
	Indeks capaian indikator medik (area klinis)	100,00
	Indeks level IT	100,00
	Cakupan penyediaan administrasi rumah sakit (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di rumah sakit	1
	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)	100,00
	Persentase puskesmas yang berkinerja baik	100,00
	Jumlah Inovasi pelayanan di masing-masing puskesmas	1
2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	85
	Persentase terhubungnya antar wilayah kecamatan melalui transportasi darat (%)	100,00
	Panjang jalan kabupaten yang dibangun (km)	10
	Persentase panjang jalan kabupaten yang ditingkatnya kualitasnya (%)	10,00
	Persentase jalan yang dipelihara (%)	100,00
	Persentase jembatan kabupaten dengan kualitas baik (%)	100,00
	Panjang jalan di Kota Pelaihari yang dilebarkan (km)	-
	Cakupan pengerasan dan pengaspalan Jalan Swarangan (%)	-
	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik (%)	45,00
	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat kabupaten	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	55,00
	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak (%)	75,00
	Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%)	85,00
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan (%)	100,00
	Cakupan pembangunan Kantor Bupati (%)	100,00
	Cakupan pembinaan badan usaha jasa konstruksi	100,00
	Tersedianya standar satuan harga jasa konstruksi	Ada
	Cakupan pembangunan gedung/bangunan/fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan (%)	100,00
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	100,00
	Persentase panjang saluran irigasi kabupaten yang direhabilitasi (%)	10,00
	Persentase beton/ bronjong /pasangan batu penahan abrasi yang dibangun sesuai standar (%)	100,00
	Panjang sungai yang dinormalisasi (km)	1,00
	Persentase kasus pelanggaran tata ruang yang dilaporkan dan ditangani (%)	100,00
	Jumlah Kebijakan tata ruang yang telah disusun (kebijakan)	1
	Cakupan kecamatan yang sudah memiliki RDTR (%)	65,00
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	98,00
	Persentase kesesuaian rencana pembangunan (pola dan struktur ruang) dengan RTRW Kabupaten	75,00
	Persentase pengawasan dalam pembangunan jalan desa (%)	100,00
	Persentase pembangunan jalan desa yang dibangun sesuai standar konstruksi (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	1
	Persentase teknologi konstruksi terbaru yang diaplikasikan dalam pembangunan (%)	50,00
	Cakupan pemeliharaan alat-alat konstruksi yang dimiliki (%)	100,00
2.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Jumlah rumah rakyat layak huni yang dibangun (rumah)	10
	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh (%)	1,00
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	75,00
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	1,00
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	2,00
	Cakupan pembangunan rumah pasca bencana (%)	100,00
	Jumlah kawasan pengembangan rumah komersil yang dibangun (kawasan)	2
	Luasan RTH publik kota (Ha)	113,75
	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap persampahan (%)	50,00
	Jumlah inovasi pelayanan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1

NO	INDIKATOR	TARGET
2.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (skor)	73,43 (sedang)
	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0
	Jumlah lembaga keagamaan yang aktif dalam peningkatan produktivitas umat (lembaga)	40 lembaga
	Jumlah konflik sosial (kasus)	0
	Persentase Forum Pembinaan Kebangsaan (FPK) kabupaten (%)	100,00
	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan bagi remaja usia sekolah (%)	20,00
	Cakupan pengawasan orang asing dan lembaga asing kabupaten (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pembinaan FKUB (%)	100,00
	Persentase rekomendasi FKDM yang ditindaklanjuti pihak terkait (%)	100,00
	Tingkat fasilitasi Forkopimda (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (%)	100,00
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pembinaan seni budaya daerah bagi remaja usia sekolah (%)	20,00
	Cakupan fasilitasi pengelolaan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat miskin (%)	15,00
	Tingkat fasilitasi dan tertib administrasi partai politik (%)	100,00
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada (%)	-
	Jumlah Desa sadar politik (desa)	5
	Jumlah Desa Peduli Toleransi	5
	Jumlah Inovasi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00
	Risiko penduduk terkena tindak pidana (per 100.000 orang)	50
	Persentase pelanggaran Perda yang ditindak (%)	100,00
	Cakupan penanganan penyakit masyarakat (%)	100,00
	Jumlah tindak pidana (kasus)	70
	Cakupan patroli petugas Satpol PP di lokasi prioritas (%)	100,00
	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1 : 2.500
	Rasio petugas linmas per 10.000 penduduk	1 : 50
	Rasio Poskamling per jumlah desa/kelurahan	1 : 5
	Cakupan ketersediaan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada objek strategis pemerintahan	100,00
	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran	100,00
	Desa Bebas Penyakit Masyarakat (desa)	15
	Jumlah Inovasi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1

NO	INDIKATOR	TARGET
2.6	Sosial	
	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	30,00
	Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan (%)	100,00
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	100,00
	Persentase PMKS yang tertangani (%)	100,00
	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	100,00
	Tingkat fasilitasi pembangunan KAT (%)	100,00
	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100,00
	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang aktif yang Aktif	15
	Cakupan peningkatan SDM kesejahteraan sosial (%)	100,00
	Cakupan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial (%)	100,00
	Cakupan penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang tepat syarat	100,00
	Persentase izin pengumpulan dana yang terbit dari permohonan tepat syarat	100,00
	Cakupan pemulihan trauma bencana alam dan sosial tepat syarat	100,00
	Jumlah Inovasi Pelayanan Dinas Sosial	1
	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	120 (Sedang)
	Cakupan fasilitasi Forum PRB tingkat kabupaten (%)	100,00
	Persentase ASN siaga dan tangguh bencana (%)	60,00
	Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana (%)	100,00
	Ketersediaan rencana kontigensi bencana daerah (Ada/Tidak)	Ada
	Cakupan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana (%)	100,00
	Cakupan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi penanganan pasca bencana (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pasca bencana (%)	100,00
	Desa tangguh bencana (desa)	15
	Jumlah Inovasi pelayanan BPBD	1
	Angka Kemiskinan (%)	4.35 - 4.30
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
2.7	Tenaga Kerja	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,90
	Rasio penduduk yang bekerja (%)	68,75
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	7,00
	Persentase Tenaga Kerja Siap Kerja	100,00
	Tingkat Pengangguran (%)	3.21 - 2.50
	Cakupan fasilitasi keselamatan dan perlindungan tenaga kerja (%)	100,00
	Fasilitasi Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan sengketa perusahaan-pekerja yang diselesaikan	35
	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	50,00
	Penetapan UMK (Ada/Tidak)	Ada
	Persentase pekerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100,00
	Persentase pekerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan (%)	100,00
	Persentase tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan setelah mendapatkan pelatihan (%)	100,00
	Jumlah tenaga kerja yang dilatih keterampilan di BLK	500
	Jumlah Inovasi pelayanan bidang tenaga kerja	1
2.8	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	
	Indeks Pemberdayaan Gender (skor)	120
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Laut (%)	30,00
	Proporsi kursi perempuan yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut di DPRD Kalimantan Selatan	30,00
	Persentase perempuan di yang menduduki jabatan pimpinan perangkat daerah (Kepala SKPD dan Kepala Bidang) di Kabupaten Tanah Laut (%)	50,00
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,81
	Jumlah ruang terbuka ramah anak (unit)	2
	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SD	100,00
	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMP	100,00
	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMA	100,00
	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan PT	100,00
	Rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada usia 15-24 tahun	100,00
	Jumlah kelompok usaha mandiri perempuan (unit)	10
	Kabupaten Layak Anak (kategori)	Nindya
	Ketersediaan pusat penanganan terpadu perlindungan perempuan dan anak (Ada/Tidak)	Ada
	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang ditindaklanjuti (%)	100,00
	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)	5,00
	Cakupan perlindungan tenaga kerja anak (%)	100,00
	Rasio KDRT (rasio)	1 : 1.000
	Desa peduli perempuan dan anak (desa)	2
	Jumlah inovasi pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	1
2.9	Pangan	
	Skor PPH Ketersediaan (kg/kapita/tahun)	95,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Skor PPH Konsumsi (kg/kapita/tahun)	95,27
	Cakupan ketersediaan data harga pangan (%)	100,00
	Cakupan pengawasan mutu dan keamanan pangan (%)	100,00
	Cakupan pemantauan distribusi pangan di pintu masuk utama kabupaten (%)	100,00
	Persentase Desa Rentan Pangan (%)	0
	Desa Berketahanan Pangan (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan bidang pangan	1
	Meningkatnya Ketersediaan pangan masyarakat	135.977
2.10	Pertanahan	
	Cakupan penyelesaian konflik tanah	100,00
	Cakupan inventarisasi tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	100,00
	Persentase tanah yang bersertifikat di Kabupaten Tanah Laut	100,00
2.11	Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	68.47
	Indeks Kualitas Udara (skor)	85,00
	Indeks Kualitas Air (skor)	75,00
	Kinerja Pelayanan Pengelolaan Limbah dan Sampah (%)	100,00
	Cakupan pengamatan dan pengukuran tingkat kerusakan lingkungan hidup (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan data lingkungan hidup Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Persentase sungai yang dipantau baku mutunya (%)	100,00
	Rasio kualitas udara yang dipantau pada titik pengamatan (%)	100,00
	Cakupan penghijauan di wilayah sumber air (%)	20,00
	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL (%)	100,00
	Persentase SDM yang mengikuti pelatihan AMDAL (%)	100,00
	Cakupan Pengembangan SDM Bidang lingkungan hidup (%)	100,00
	Cakupan penanganan penyelesaian kasus lingkungan hidup (%)	100,00
	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya kegiatan perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan bidang lingkungan hidup	1
	Persentase penyelesaian pengujian tepat waktu di laboratorium lingkungan (%)	100,00
	Cakupan penyediaan alat-alat laboratorium prioritas (%)	100,00
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%)	100,00
	Cakupan pelayanan pendataan dan pendaftaran penduduk (%)	100,00
	Cakupan pelayanan administrasi migrasi penduduk (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Rasio Cakupan Penduduk ber KTP (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan pelaporan dan data kependudukan (%)	100,00
	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	100,00
	Rasio pasangan berakte nikah (%)	100,00
	Persentase kepemilikan KK (%)	100,00
	Cakupan pembinaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan (%)	100,00
	Dokumen profil kependudukan kabupaten (Ada/Tidak)	Ada
	Cakupan kerjasama administrasi kependudukan yang ditindaklanjuti	100,00
	Desa sadar administrasi kependudukan (desa)	60
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Indeks Desa Membangun (skor)	0,815 (Mandiri)
	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahannya baik (%)	100,00
	Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun (%)	100,00
	Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat	20
	Cakupan ketersediaan data terkini profil dan potensi desa (%)	100,00
	Cakupan pendampingan penyusunan RPJM Desa (%)	100,00
	Cakupan pendampingan evaluasi kinerja RPJM Desa (%)	100,00
	Jumlah desa yang melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya	5
	Jumlah BUMDES yang berkembang (unit)	25
	Jumlah desa yang menerapkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan BUMDES (desa)	2
	Jumlah desa yang memiliki BUMDES yang bergerak di industri kreatif (desa)	1
	Cakupan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (%)	100,00
	Persentase LPM berprestasi (%)	15,00
	Cakupan pembinaan kelompok PKK (%)	100,00
	Persentase PKK aktif (%)	65,00
	Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan masyarakat	100,00
	Cakupan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa (%)	100,00
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100,00
	Cakupan desa yang tertib administrasi pemerintahan (%)	100,00
	Cakupan desa yang tertib administrasi tata kelola keuangan dan aset desa (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	1
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	2
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)	1,10
	Ketersediaan pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (Ada/Tidak)	Ada

NO	INDIKATOR	TARGET
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data parameter dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	7
	Ketersediaan regulasi pengendalian penduduk (Ada/Tidak)	Ada
	Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,25
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 (%)	5,00
	Persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur (%)	86,12
	Peserta anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang mengikuti KB (%)	70,00
	Persentase anggota Bina Keluarga (BKR) Berstatus Ber-KB (%)	85,00
	Persentase anggota keluarga UPPKS yang Ber-KB (%)	90,00
	Persentase PUS yang mendapat KIE (%)	55,00
	Unmeet need KB pada pasangan usia subur (%)	5,00
	Desa sadar KB (desa)	5
	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1
2.15	Perhubungan	
	Jumlah kasus kecelakaan (kasus)	20
	Cakupan revitalisasi terminal yang dikelola kabupaten (%)	50,00
	Penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum (Rp Juta)	22,32
	Penerimaan retribusi pengelolaan terminal (Rp Juta)	141,82
	Persentase angkutan umum yang layak digunakan di terminal (%)	100,00
	Cakupan pemasangan rambu-rambu yang memadai di ruas prioritas jalan kabupaten (%)	100,00
	Cakupan pemasangan petunjuk jalan di ruas jalan kabupaten (%)	100,00
	Persentase aksesibilitas antar wilayah kecamatan yang terhubung sarana transportasi umum (%)	100,00
	Cakupan penegakan pelanggaran lalu lintas (%)	100,00
	Cakupan kesiapsiagaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam acara prioritas (%)	100,00
	Pertumbuhan arus penumpang angkutan darat (%)	2,00
	Pertumbuhan barang yang terangkut angkutan darat (%)	6,00
	Pertumbuhan PRDB sub-kategori angkutan darat (%)	6,00
	Cakupan monitoring sarana perhubungan laut, sungai, dan penyeberangan (%)	100,00
	Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut (%)	1,00
	Pertumbuhan barang yang melalui dermaga pelabuhan	10,00
	Cakupan ketersediaan sarana navigasi angkutan laut, sungai, dan penyeberangan	100,00
	Pertumbuhan PRDB sub-kategori angkutan laut (%)	7,00
	Cakupan ketersediaan alat untuk pengujian kendaraan bermotor (%)	100,00
	Persentase pelayanan tepat waktu dalam pengujian kendaraan bermotor (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor (Rp Juta)	581,40
2.16	Komunikasi dan Informatika	
	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100,00
	Cakupan penyebaran informasi pembangunan daerah melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Cakupan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi (%)	100,00
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	80,00
	Persentase penduduk yang mengakses internet (%)	65,00
	Cakupan fasilitasi pembangunan BTS di Kabupaten Tanah Laut	100,00
	Cakupan ketersediaan sistem informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi (%)	100,00
	Cakupan pengembangan sistem aplikasi e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Persentase SKPD yang mempublikasikan kinerjanya dalam sistem informasi pembangunan daerah (%)	100,00
	Persentase SKPD di Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan dan terhubung sistem e-Government (%)	100,00
	Persentase SKPD yang sudah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (%)	100,00
	Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu dan tepat syarat	100,00
	Cakupan desa yang dapat mengakses layanan telekomunikasi (%)	80,00
2.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
	Jumlah UMKM yang berkembang (unit)	2
	Jumlah UMKM baru yang terbentuk (unit)	5
	Cakupan pembinaan UMKM dalam manajemen usaha dan pemasaran	20,00
	Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah (%)	100,00
	Cakupan penerbitan izin UKM yang tepat syarat dan tepat waktu (%)	100,00
	Jumlah koperasi baru yang terbentuk (unit)	4
	Persentase koperasi aktif (%)	100,00
	Persentase koperasi maju (%)	7,50
	Cakupan pembinaan koperasi terkait manajemen dan pengembangan usaha koperasi (%)	20,00
	Desa koperasi (desa)	2
	Desa tematik UKM (desa)	1
	Koperasi Aktif	110
2.18	Penanaman Modal	
	Capaian realisasi kesepakatan pelaku investasi (kesepakatan)	8
	Realisasi Investasi (Rp)	1.027.336.000

NO	INDIKATOR	TARGET
	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan (%)	5,00
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	2
	Persentase UMKMK yang bermitra dengan PMA/ PMDN (%)	7
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Rp miliar)	770.502
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) - (Rp miliar)	256.834
	Ketersediaan dokumen regulasi pada sektor penanaman modal (Ada/Tidak)	Ada
	Cakupan pemantauan kinerja realisasi penanaman modal (%)	100,00
	Ketersediaan SOP dalam pengurusan izin investasi (Ada/Tidak)	Ada
	Persentase permohonan perizinan jasa usaha yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat(%)	100,00
	Persentase permohonan perizinan non usaha yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	100,00
	Persentase pelaku usaha yang taat dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan UU (%)	100,00
	Persentase penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditindaklanjuti (%)	100,00
	Persentase pelayanan permohonan perizinan dan perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan data investasi, perizinan, dan non perizinan (%)	100,00
2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	
	Persentase Wirausaha Muda (%)	85,00
	Organisasi pemuda aktif (%)	99,00
	Jumlah kelompok pemuda yang berprestasi (kelompok)	2
	Cakupan pembinaan organisasi pemuda (%)	100,00
	Cakupan pemberian kepada pemuda berprestasi Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Jumlah pemuda berprestasi yang menerapkan teknologi tepat guna (pemuda)	2
	Cakupan organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan bahaya narkoba dan obat-obat terlarang (%)	100,00
	Persentase sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berfungsi dengan baik (%)	100,00
	Persentase cabang olahraga yang dibina (%)	70,00
	Persentase masyarakat yang rutin berolahraga rekreasi dan tradisional	17,50
	Cakupan pemberian penghargaan kepada insan olahraga Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Jumlah atlet berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	2
	Persentase perolehan medali di tingkat nasional dan provinsi (%)	100,00
2.20	Statistik	
	Persentase ketersediaan data indikator makro daerah tahunan di tingkat kabupaten (%)	100,00
	Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka (Ada/Tidak)	Ada
	Ketersediaan Buku PDRB Kabupaten (Ada/Tidak)	Ada

NO	INDIKATOR	TARGET
	Ketersediaan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat (Ada/Tidak)	Ada
	Ketersediaan Buku Indeks Pembangunan Manusia (Ada/Tidak)	Ada
	Ketersediaan Buku Statistik Daerah (Ada/Tidak)	Ada
	Persentase data SKPD yang dimuat dalam database satu data (%)	100,00
	Ketersediaan data kinerja sektoral dalam SIPD (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang statistik	1
2.21	Kebudayaan	
	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100,00
	Cakupan pelestarian dan pengembangan cagar budaya daerah (%)	100,00
	Cakupan pelestarian dan pengembangan sejarah dan tradisi daerah (%)	100,00
	Cakupan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah (%)	100,00
	Jumlah even budaya tingkat kabupaten yang diselenggarakan (kali)	2
	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	1
	Cakupan pembinaan organisasi budaya daerah (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi sanggar seni dalam festival budaya di tingkat provinsi dan nasional (%)	100,00
	Jumlah Desa Peduli Kesenian Daerah (desa)	2
2.22	Perpustakaan	
	Pertumbuhan pengunjung perpustakaan (%)	5,00
	Cakupan desa yang dikunjungi perpustakaan keliling (%)	20,00
	Cakupan pembinaan perpustakaan sekolah (%)	100,00
	Cakupan pemenuhan kebutuhan pustakawan (%)	100,00
	Desa Gemar Membaca (desa)	5
2.23	Kearsipan	
	Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah (%)	100,00
	Pengelolaan arsip secara baku di tingkat SKPD (%)	60,00
	Cakupan pemenuhan kebutuhan pengolahan dan penyimpanan arsip	100,00
	Cakupan pemeliharaan arsip daerah (%)	100,00
	Cakupan pemenuhan kebutuhan arsiparis (%)	100,00
	Persentase arsip daerah yang telah terdigitalisasi (%)	25,00
	Urusan Pilihan	
2.24	Kelautan dan Perikanan	
	Pertumbuhan sub-sektor perikanan (%)	3,00
	Produksi perikanan budidaya (ton)	1.360
	Nilai tukar pembudidaya ikan (skor)	113,14
	Cakupan pelaku usaha perikanan budidaya yang dibina (%)	20,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Jumlah sentra produksi perikanan budidaya yang dikembangkan	1
	Produksi perikanan tangkap (ton)	58.708
	Nilai tukar nelayan (skor)	107,73
	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (%)	100,00
	Cakupan pelaku usaha perikanan tangkap yang dibina (%)	20,00
	Jumlah sentra produksi perikanan tangkap yang dikembangkan	1
	Produksi olahan hasil perikanan (ton)	1.521,01
	Konsumsi ikan (kg/kapita/orang/tahun)	48,48
	Cakupan pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang dibina (%)	20,00
	Jumlah sentra produksi olahan produk ikan yang dikembangkan	2
	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang kelautan dan perikanan	1
2.25	Pariwisata	
	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	350.000
	PAD sektor pariwisata (Rp Juta)	815,80
	Cakupan pengembangan destinasi wisata baru (yang ada dikembangkan/destinasi baru) (%)	100,00
	Cakupan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang difasilitasi pemerintah daerah (%)	100,00
	Cakupan pembinaan masyarakat yang terlibat dalam sektor kepariwisataan (%)	20,00
	Kelompok sadar wisata yang berkembang (unit)	2
	Cakupan pengendalian dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan (%)	100,00
	Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (kali)	2
	Cakupan ketersediaan informasi pariwisata dalam situs pariwisata Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan data profil pariwisata Kabupaten Tanah Laut	100,00
2.26	Pertanian	
	Pertumbuhan sub-sektor tanaman pangan (%)	3,00
	Produksi padi (ton)	256.544
	Produksi jagung (ton)	210.573
	Produksi kedelai (ton)	1.092
	Produksi kacang tanah (ton)	2.651
	Produksi kacang hijau (ton)	238
	Produksi ubi kayu (ton)	24.380
	Produksi ubi jalar (ton)	3.783
	Cakupan fasilitasi penyediaan benih unggul komoditas tanaman pangan (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi perlindungan komoditas tanaman pangan (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan pemberian bantuan sarana pasca panen kepada petani tanaman pangan secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00
	NTP Tanaman Pangan (skor)	110,41
	Pertumbuhan sub-sektor tanaman hortikultura (%)	3,00
	Produksi cabai (kuintal)	15.248
	Produksi tomat (ton)	6.821
	Produksi bawang merah (ton)	5.319
	Produksi buah naga (ton)	494
	Cakupan fasilitasi penyediaan benih unggul komoditas hortikultura unggulan daerah (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi perlindungan komoditas tanaman hortikultura (%)	100,00
	Cakupan pemberian bantuan sarana pasca panen kepada petani tanaman hortikultura secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00
	NTP Hortikultura (skor)	115,93
	Pertumbuhan sub-sektor perkebunan (%)	5,00
	Produksi karet (ton)	9.517
	Produksi kelapa sawit (ton)	21.266
	Cakupan fasilitasi pengembangan dan peremajaan komoditas perkebunan unggulan daerah (%)	100,00
	Cakupan pemberian bantuan sarana pasca panen kepada petani tanaman perkebunan secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi perlindungan komoditas tanaman perkebunan (%)	100,00
	NTP Tanaman Perkebunan	118,77
	Cakupan petani yang meningkat keterampilan dan mantap dalam manajemen usaha setelah mendapatkan penyuluhan (%)	100,00
	Gapoktan yang memiliki lembaga keuangan mikro (unit)	15
	Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi produksi pertanian terbaru (unit)	4
	Penerapan Demplot teknologi pertanian (lokasi)	30
	Jumlah kelompok tani baru (pemula) (unit)	40
	Jumlah kelompok yang naik kelas lembaganya dari Pemula - Lanjut (unit)	40
	Jumlah kelompok yang naik kelas lembaganya dari Lanjut - Madya (unit)	7
	Jumlah kelompok yang naik kelas lembaganya dari Madya - Utama (unit)	1
	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok tani (kali per tahun)	21.170
	Cakupan pengadaan sarana dan alat mesin pertanian sesuai prosedur yang berlaku dan tepat syarat (%)	100,00
	Cakupan pemberian saran dan alat mesin pertanian kepada petani secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00
	Fasilitasi pengembangan percontaan sawah/perluasan area tanam (Ha)	3.005
	Fasilitasi pengembangan/pembuatan jalan usaha tani (km)	10
	Fasilitasi pengembangan/pembuatan jalan produksi (km)	20
	Fasilitasi pengembangan/pembuatan embung (unit)	3
	Fasilitasi pengembangan jaringan irigasi (ha)	200

NO	INDIKATOR	TARGET
	Fasilitasi optimalisasi pengelolaan lahan (Ha)	500
	Pertumbuhan sub-sektor peternakan (%)	3
	Cakupan peternak yang meningkat keterampilan dan mantap dalam manajemen usaha setelah mendapatkan penyuluhan (%)	100,00
	Persentase kelompok peternak yang dapat mengembangkan usahanya	25,00
	Cakupan ketersediaan data profil dan potensi pengembangan peternakan (%)	100,00
	Persentase pelaku usaha peternakan binaan yang bermitra dengan pihak lain	20,00
	Realisasi investasi sektor peternakan (Rp miliar)	10,00
	Cakupan pengadaan sarana dan prasarana peternakan sesuai prosedur yang berlaku dan tepat syarat (%)	100,00
	Cakupan pemberian sarana dan prasarana peternakan kepada petani secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00
	Produksi daging sapi (kg)	296.582
	Produksi daging kerbau (kg)	53.293
	Produksi daging kambing (kg)	13.384
	Produksi daging domba (kg)	433
	Produksi daging ayam ras petelur (kg)	1.420.466
	Produksi daging ayam ras pedaging (kg)	8.678.846
	Produksi daging ayam ras buras (kg)	580.759
	Produksi daging itik (kg)	79.910
	Produksi telur ayam ras (kg)	81.877.343
	Produksi telur ayam buras (kg)	2.336.746
	Produksi telur itik (kg)	1.485.244
	Cakupan fasilitasi pendistribusian bibit ternak unggul kepada masyarakat tepat syarat (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pengembangan pakan ternak unggul bagi peternak	100,00
	Cakupan fasilitasi pendistribusian semen bibit ternak unggul (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pelaksanaan inseminasi buatan (%)	100,00
	Jumlah Desa Lumbung Ternak (desa)	5
	Cakupan fasilitasi pencegahan penyakit ternak (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pemeriksaan penyakit ternak (%)	100,00
	Cakupan pengawasan produk asal hewan di wilayah prioritas (%)	100,00
	Persentase jaminan pangan asal hewan yang ASUH (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan (%)	100,00
	Cakupan pembinaan kelompok pengolah hasil peternakan (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pemasaran produk pasca panen hasil peternakan	100,00
	NTP Peternakan (skor)	121,67
	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan	1
2.27	Perdagangan	
	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (%)	7,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan rekomendasi TPID yang ditindaklanjuti (%)	100,00
	Persentase penyelesaian keluhan konsumen yang ditindaklanjuti (%)	100,00
	Cakupan monitoring ketersediaan stok dan harga barang (%)	100,00
	Cakupan rekomendasi pengurangan hambatan perdagangan dan pengawasan perdagangan yang ditindaklanjuti (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi peningkatan pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi peningkatan perlindungan konsumen di seluruh kabupaten (%)	100,00
	Cakupan pengembangan BPPMB (%)	100,00
	Cakupan pengawasan barang Ber-SNI wajib dan Jasa Daerah (%)	100,00
	Cakupan pelayanan kemetrolgion daerah (%)	100,00
	Cakupan standarisasi UTTP bidang perdagangan (%)	100,00
	Cakupan pembinaan bagi pedagang kakilima dan asongan (%)	100,00
	Cakupan pembinaan ketertiban dan keindahan pasar daerah (%)	100,00
	Cakupan pemeliharaan sarana prasarana pasar daerah (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan sarana prasarana pasar daerah (%)	100,00
	Penerimaan retribusi pelayanan pasar (Rp)	1.253.431.724
	Cakupan ketersediaan data profil pasar daerah (%)	100,00
2.28	Perindustrian	
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	6,00
	Pertumbuhan jumlah IKM	2,00
	Jumlah IKM berkembang	5
	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	2
	Jumlah sentra industri rakyat	5
	Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	20,00
	Persentase usaha industri dan kawasan industri yang beroperasi sesuai dengan NSPK (%)	100,00
	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	25 Unit Usaha
	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)	5 Unit Usaha
	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	25 Unit Usaha
	Cakupan fasilitasi rencana pengembangan Kawasan Industri Jorong	100,00
	Jumlah IKM	80
	Jumlah IKM Unggulan	35
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
	Cakupan penyepakatan batas antar kelurahan (%)	100,00
	Cakupan penyepakatan batas wilayah Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN Plus) (%)	100,00
	Peringkat LPPD (skor)	3,1750 (sangat tinggi)
	Skor EKPPD terhadap LPPD Kabupaten Tanah laut (kategori)	Sangat Tinggi
	Cakupan penyepakatan kerjasama pemerintah daerah yang ditindaklanjuti (%)	100
	Ketepatan waktu penyampaian LKPI dan LPPD	Tepat Waktu
	Cakupan Fasilitasi pelimpahan urusan pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan (kecamatan)	11
	Cakupan pemenuhan IKK (%)	100,00
	Persentase SKPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBN (%)	100,00
	Persentase SKPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBD (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Tata Pemerintahan	1
	Persentase produk hukum daerah/naskah perjanjian daerah/naskah keperdataan lainnya yang harmonis, menjamin kepastian hukum dan mengayomi kepentingan daerah dan masyarakat	100,00
	Persentase produk hukum daerah yang dibatalkan oleh Kemendagri dan Gubernur (%)	0
	Cakupan penanganan masalah hukum non litigasi (%)	100,00
	Persentase pelayanan bantuan hukum/konsultasi/advokasi hukum bagi aparatur, masyarakat dan pemerintah desa (%)	100,00
	Persentase pelayanan advokasi hukum bidang tindak pidana bagi masyarakat melalui bantuan hukum bagi masyarakat miskin (%)	100,00
	Persentase terpublikasikannya produk hukum daerah (%)	100,00
	Ketersediaan mekanisme penyusunan produk hukum (%)	100,00
	Persentase Raperda yang disetujui DPRD dalam Prolegda (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Hukum	1
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	A (81,00)
	Indeks Reformasi Birokrasi (skor)	6,4 (Baik)
	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	80 (Baik)
	Penghargaan inovasi publik (jumlah)	1 penghargaan
	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2
	Indeks keterbukaan informasi publik (skor)	75,00
	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD) (%)	25 SKPD
	Cakupan pemenuhan dokumen ketatalaksanaan (%)	100,00
	Persentase kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, dan tepat struktur (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan SKPD Kabupaten Tanah laut yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan (%)	100,00
	Persentase Rekomendasi dari ABK yang ditindaklanjuti (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Organisasi	1
	Cakupan Pembinaan Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) (%)	100,00
	Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Manajemen BUMD (Jumlah BUMD yang memenuhi kewajiban minimalnya (%)	100,00
	Cakupan Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi yang terlaksana	100,00
	Persentase Rekomendasi dari TPID yang ditindaklanjuti (%)	100,00
	Tingkat Inflasi Daerah (%)	5,00
	Cakupan komoditas strategis yang dikembangkan (%)	100,00
	BUMD yang berkembang dan menghasilkan keuntungan (%)	100,00
	Cakupan monitoring dan evaluasi perekonomian pembangunan (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Perekonomian Pembangunan	1
	Persentase SKPD yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE (%)	100,00
	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik (E- Procurement) sesuai standar (%)	100,00
	Tingkat pelanggaran pengadaan barang dan jasa (%)	0
	Tersusunnya laporan pengadaan barang dan jasa (dokumen)	1
	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1
	Cakupan fasilitasi Prasarana Peribadatan, Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Keagamaan yang memadai (%)	100,00
	Persentase fasilitasi kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	100,00
	Cakupan Fasilitasi kegiatan Syariah Keagamaan (%)	100,00
	Persentase Permohonan Bantuan Hibah yang terlaksana secara tepat syarat (%)	100,00
	Jumlah Guru TPA, Madin, Ponpes dan PAH yang aktif (orang)	3.072
	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Kesejahteraan Rakyat	1
	Cakupan ketersediaan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat (%)	100,00
	Cakupan pemberitaan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang terekspos ke media	100,00
	Cakupan kegiatan keprotokolan KDH/ WKDH/ Kepada SKPD /tamu Daerah sesuai jadwal secara tepat sasaran (%)	100,00
	Cakupan pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti (%)	100,00
	Cakupan publikasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	1

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan fasilitasi penyediaan jasa perkantoran (makanan dan minuman, komunikasi, air, listrik, kendaraan dinas/operasional, dan perlengkapan) untuk kantor dan rumah jabatan (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan (%)	100,00
	Persentase kelancaran pelayanan rumah tangga pimpinan (%)	100,00
	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana /aset milik Sekretariat Daerah yang terkelola dengan baik (%)	100,00
	Cakupan BMD yang telah diappraisal (%)	100,00
	Tingkat kapasitas SDM pengelola barang milik daerah (kategori)	Baik
	Persentase SKPD yang mengimplementasikan buku pedoman pelaksanaan APBD dan standar barang (%)	100,00
	Tersedianya Dokumen Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut (Ada/Tidak)	Ada
	Tersedianya Kodifikasi Barang Milik Daerah se-Kabupaten Tanah Laut (Ada/Tidak)	Ada
	Tersusunnya Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Ada/Tidak)	Ada
	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Umum	1
	Cakupan fasilitasi penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran, rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, penunjang SKPD, dan administrasi keuangan (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100,00
	Tersedianya dokumen Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD (dokumen)	-
	Tersedianya dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra dan RKPD (dokumen)	1 dokumen
	Nilai LAKIP perangkat daerah (kategori)	BB
	Opini pemeriksa terhadap laporan keuangan (kategori)	WTP
	Survei kepuasan masyarakat (kategori)	Baik
	Cakupan administrasi kepegawaian yang dikelola dengan tertib (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Tata Usaha dan Keuangan	1
	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam RPJMD maupun RKPD (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Kelengkapan (%)	100,00
	Terintegrasinya program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD (%)	100,00
	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai Prolegda (%)	100,00
	Persentase rekomendasi DPRD dari LKPj yang dilaksanakan (%)	100,00
	Persentase rekomendasi DPRD dari RDP yang dilaksanakan (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi rapat-rapat kegiatan DPRD (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi kegiatan reses dan penyusunan pokok pikiran DPRD (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	100,00
	Cakupan informasi parlemen yang terdokumentasi dan dipublikasikan kepada Masyarakat (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan capaian kinerja perangkat daerah dalam SIPD	100,00
	Cakupan ketersediaan kinerja perangkat daerah dalam laman resmi perangkat daerah (%)	100,00
	Cakupan penyediaan kelengkapan dan jasa bagi pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di Sekretariat DPRD	1
	Cakupan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa dan pemerintahan umum di kecamatan (%)	100,00
	Cakupan koorinasi dan fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan (%)	100,00
	Cakupan perwakilan desa yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan di kecamatan (%)	100,00
	Cakupan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (%)	100,00
	Cakupan monitoring dan evaluasi hasil Musrenbang Desa (%)	100,00
	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	11 Kecamatan
	Cakupan pelayanan yang diberikan kecamatan kepada masyarakat sesuai dengan SOP (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di Kecamatan	1
	Cakupan ketersediaan profil yang berisi data potensi pengembangan kelurahan (%)	100,00
	Cakupan koordinasi dan fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kelurahan (%)	100,00
	Cakupan RW yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan pengembangan ekonomi di lingkup kelurahan (%)	100,00
	Cakupan penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lingkup kelurahan (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di lingkup Kelurahan	1
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan	
	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (kategori)	Baik
	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan ekonomi dan sumber daya alam (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan ketersediaan bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam (%)	100,00
	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan sumber daya alam (%)	100,00
	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan sosial dan budaya (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sosial dan budaya (%)	100,00
	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sosial dan budaya (%)	100,00
	Indeks kinerja TKPKD Kabupaten Tanah Laut (kategori)	Baik
	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah (%)	100,00
	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan bidang infarastruktur dan pengembangan wilayah	100,00
	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah (%)	100,00
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda (Ada/Tidak)	Ada
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (Ada/Tidak)	Ada
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada (ada/Tidak)	Ada
	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100,00
	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100,00
	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra SKPD (%)	100,00
	Cakupan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	
	Cakupan kajian kelitbangan yang disusun menjadi rekomendasi kebijakan daerah (%)	80,00
	Persentase kajian yang dipublikasikan dalam jurnal atau bulletin (%)	10,00
	Cakupan pemanfaatan hasil kajian kelitbangan (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di Bidang Penelitian dan Pengembangan	1
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	
	Cakupan pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi manajerial (%)	100,00
	Cakupan pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi teknis	100,00
	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi (%)	100,00
	Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai (%)	0
	Persentase peserta ujian dinas yang lulus (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Penerapan Merit System dalam manajemen kepegawaian (%)	100,00
	Cakupan pegawai yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural secara tepat syarat (%)	100,00
	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar dan ikatan dinas (orang)	50
	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan sistem administrasi kepegawaian secara online	100,00
	Cakupan ketersediaan data aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan pembinaan dan pengembangan karir PNS (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	12,35
	Pertumbuhan PAD (%)	10,33
	Persentase pelanggaran wajib pajak daerah (%)	5,00
	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah (%)	15,00
	Cakupan ketersediaan sistem informasi pajak daerah (%)	100,00
	Ketersediaan data wajib pajak dan potensi penerimaan pajak daerah	100,00
	Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB (%)	7,00
	Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah (%)	20,00
	Cakupan ketersediaan sistem informasi retribusi daerah (%)	100,00
	Ketersediaan data potensi penerimaan retribusi daerah (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di Badan Pendapatan Daerah	1
	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP
	Penetapan APBD dan Perubahan APBD Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Berlaku (%)	100,00
	Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu dan sesuai aturan (%)	100,00
	Persentase SILPA terhadap Belanja APBD (%)	10,00
	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	10,00
	Persentase belanja pendidikan 20%	18,83
	Persentase belanja kesehatan 10%	13
	Perbandingan antara belanja langsung dengan tidak langsung	60 : 40
	Persentase SKPD yang menerapkan Laporan Keuangan yang berbasis Akrual (%)	100,00
	Persentase BMD yang sudah dilengkapi persyaratan untuk dipelihara dan dimanfaatkan (%)	95,00
	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat (%)	100,00
	Cakupan penertiban BMD (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1

NO	INDIKATOR	TARGET
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	
	Tingkat Maturitas Penerapan SPIP (skor)	Level 3,6
	Nilai Reformasi Birokrasi	7,5 (Baik)
	Level Kapabilitas APIP	Level 3
	Nilai hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan kategori minimal "BB"	75 (BB)
	Jumlah unit pelayanan publik terpilih sesuai WBK	1 SKPD
	Persentase temuan yang material pada obrik	10%
	Persentase PKPT yang dapat dilaksanakan (%)	100
	Persentase entitas pelaporan keuangan dengan laporan keuangan sesuai standar (%)	100
	Persentase pengawasan pengaduan masyarakat/instansi yang ditindaklanjuti (%)	100
	ASPEK DAYA SAING	
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	
	Pengeluaran per kapita penduduk per tahun (Rp)	12.303,32
	Persentase pengeluaran konsumsi makanan (%)	50,08
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	
	NTP Tanaman Pangan (skor)	110,41
	NTP Hortikultura (skor)	115,93
	NTP Tanaman Perkebunan	118,77
	NTP Peternakan (skor)	121,67
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (rasio)	1 : 275
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	75,00
	Kawasan industri yang dikembangkan (kawasan)	1
	Jumlah hotel (unit)	4
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	80,00
	Fokus Iklim Berinvestasi	
	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	100,00
	Jumlah demo	2
	Persentase pelayanan permohonan perizinan dan perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	100,00
	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	2 (25)
	Cakupan Perda yang mendukung iklim usaha (%)	100,00
	Fokus Sumber Daya Manusia	
	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	50,00
	Rasio ketergantungan (%)	45,00

Sumber : RPJMD Kab. Tanah Laut 2018-2023

Adapun Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, berikut target kinerja dari indikator perurusan sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2021.

Tabel 6.3 Target Indikator Per Urusan

NO	URUSAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Pendidikan	Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan (APS)	41
		Jumlah anak usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (APS)	77,95
		Rata-Rata kemampuan literasi SD berdasarkan assessment nasional	1,99
		Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan assessment nasional	2,02
		Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan assessment nasional	2,15
		Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan assessment nasional	2,03
		Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	37,56
		Pertumbuhan proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S 1/D IV	82,87
		Rasio pengawas dan penilik PAUD	3,20
2.	Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Rujukan terakreditasi	100
		Persentase Rumah Sakit terakreditasi	100
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1,1
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	100
		Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	100
		Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	100
		Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100
		Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100
		Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis	100
		Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	100
		Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	100
		Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan	100

NO	URUSAN	INDIKATOR	TARGET
		Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	100
		Pelayanan Kesehatan Balita	100
		Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	100
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (persen)	18,1
		Jumlah penurunan kematian Ibu (orang)	11
		Persentase FKTP terakreditasi	100
		Jumlah puskesmas yang dibangun di Kecamatan yang belum memiliki puskesmas	-
		Persentase orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	100
		Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (Treatment Coverage)	90
		Persentase Bayi Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100
		Annual Parasite Incidence (API) < 1/1000 penduduk	< 1
		Persentase posyandu aktif	80
		Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus) pada Balita (persen)	5
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100
		Persentase tatanan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	50
		Persentase capaian 8 aksi Konvergensi Penurunan Stunting	100
		Persentase penurunan jumlah kematian Ibu	49
		Penurunan jumlah kematian Ibu (AKI) per tahun	11
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan	100
		Jumlah puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM) (persen)	35
		Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga Kesehatan sesuai standar	83
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan)	100
		Persentase Sarana Produksi UMOT	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	80
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	6,9

NO	URUSAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	-
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	35,05
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	35,05
		Persentase PDAM dengan kinerja sehat	100
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan	50
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	53,49
		Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	85
		Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun (Ha)	803
		Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi (Ha)	1.094
		Tambahan Debit Air Baku	-
		Penyelesaian Materi Teknis RTRW	1
		Penyelesaian Materi Teknis RDTR	2
		Penetapan RTRW	1
		Penetapan RDTR	3
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	15
		Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitas Pemerintah	285
		Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas	750
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3611
		Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	450
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani	100
		Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	100
		Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota	45
		Persentase pelanggaran dan pengaduan trntibum dalam kab/kota yang ditangani	100

NO	URUSAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	30
		Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	10
		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	144
		Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum kab/kota yang Ditetapkan	1
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	5
		Jumlah Satgas Linmas Kab/Kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota	1
		Jumlah aparatur terkait kebencanaan di provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan	10
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	100
		Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota	60
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana	100
		Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial	2
		Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	5
		Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	100
6.	Sosial	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100
		Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	1
		Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)	124

NO	URUSAN	INDIKATOR	TARGET
		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	135
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya	11
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	10
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	15.714
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	6.000
		Jumlah Lembaga di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	5
		Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	146
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	15.000
		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	8
		Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	5.000
		Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	2
		Presentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100
		Presentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100
		Presentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100
		Presentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100
		Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1
		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	50
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	48.252
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	5
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1

NO	URUSAN	INDIKATOR	TARGET
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100
7.	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	60
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	180
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	80
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	20
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,5
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,67
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,91
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100
9.	Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	94
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (ton)	12,8
		Persentase daerah rentan rawan pangan	13
		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	77
10.	Pertanahan	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	1.000
		Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	400
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,47
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan (persen)	100
		Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (persen)	100
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun (persen)	100

NO	URUSAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	98
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100
		Pemanfaatan data kependudukan (persen)	80
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa Mandiri	4
		Jumlah Desa Berkembang	60
		Jumlah Desa Tertinggal	0
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	25
		Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) Berkembang	7
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	60,32
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,24
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	80
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,8
15.	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	0,61
		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0,61
		On Time Performance Layanan Transportasi	58,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	80
		Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 10 ribu Keberangkatan	0,058
16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase OPD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	80
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan	40

NO	URUSAN	INDIKATOR	TARGET
		sistem penghubung layanan pemerintah daerah	
		Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	100
		Persentase (%) perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kota cerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten/kota cerdas yang sudah ditetapkan	100
		Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	2
		Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	20
		Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional,(tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	80
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	85
		Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100
		Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	100
17.	Statistik	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	92
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	10

NO	URUSAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	50
18.	Persandian	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	1
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	1
		Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	1
		Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	52
19.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (persen)	10
		Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	0,52
		Terfasilitasinya UKM yang Berpotensi Masuk ke Dalam Rantai Pasok dan Ekspor (persen)	1,5
		Pertumbuhan Wirausaha (persen)	0,90
20.	Perdagangan	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100
		Tertib Usaha (persen)	100
		Persentase kinerja realisasi pupuk	91
		Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	0,11
		Inflasi Pangan Bergejolak (%)	3,5
21.	Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal (Rp)	1.027.336.000.000
22.	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Atlet yang berasal dari Kab/Kota yang masuk Pelatda	13
		Jumlah Atlet yang berasal dari Kab/Kota yang masuk Pelatda	1
		Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kab/Kota	125
		Persentase Wirausahawan Muda ditingkat Kabupaten/Kota	0,41
		Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab	120

NO	URUSAN	INDIKATOR	TARGET
23.	Kebudayaan	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	38
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	3
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	24
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	35
		Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	30
		Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0,50
24.	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	50
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10
25.	Kearsipan	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	1.500
		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	100
		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	100
		Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	1.500
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10
26.	Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	61,676
		Produksi Perikanan Budidaya (ton)	1.442,81
		Operasi kapal/speedboat pengawas (hari)	12
27.	Pariwisata	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp)	100.000.000
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	300.000
28.	Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (padi dan jagung)	3,5
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (cabai dan bawang merah)	4,48
		Persentase peningkatan Produktivitas Perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada)	3,75
		Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (ton)	8.280,8

NO	URUSAN	INDIKATOR	TARGET
		Jumlah Produksi Susu (ton)	12
		Jumlah Produksi Telur (ton)	10.150
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	85
29.	Perindustrian	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	6,3
		Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	12,97
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	11.674
		Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp)	74.752.000.000

Sumber : Berita Acara Rakortekbang Tahun 2022

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan RKPD Tahun 2023 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, dan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rancangan kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

Dokumen RKPD ini menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Nota kesepakatan KUA dan PPAS akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. Kemudian fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

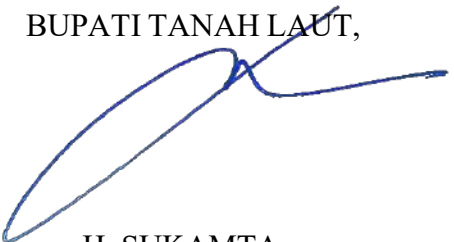
Agar program dan kegiatan masing-masing OPD dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing

masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi tidak kesesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Kemudian RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Jika pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RKPD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari, 30 Juni 2022

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA